



TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL

Perspektif-Perspektif Klasik

Editor **Vinsensio Dugis**

**Teori Hubungan Internasional
Perspektif-Perspektif Klasik
Vinsensio Dugis**

Cetakan Pertama, Desember 2016

Hak Cipta @ Cakra Studi Global Strategis (CSGS)

Desain Sampul & Tata Letak: Widya Septiyaningrum

Diterbitkan pertama kali di Indonesia oleh

Cakra Studi Global Strategis (CSGS)

Gedung B FISIP Unair

Jl. Dharmawangsa Dalam

Surabaya 60286

Jawa Timur - Indonesia

Telp: (031) 5046453; 61016125; Faks. (031) 5012442

global.strategis@gmail.com

www.csgsunair.org

iii + 159 hlm. | 15,5 x 23 cm. | ISBN 978-602-7851-70-2

Dicetak oleh:

PT Revka Petra Media

Jl. Pucang Anom Timur No. 5, Surabaya 60282, Jawa Timur

Telp. (031) 5051711; Faks. (031) 5016848

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Pengantar

Buku ini ditulis sebagai respons atas tantangan yang sudah bertahun-tahun dihadapi para penulis, terutama editor, ketika mengajar mata kuliah Teori Hubungan Internasional kepada mahasiswa. Dari sifat mata kuliahnya, hasil akhir yang diharapkan dari pengajaran Teori Hubungan Internasional adalah kemampuan dan ketrampilan mahasiswa untuk dapat secara tepat menggunakan teori sebagai alat analisis. Tetapi karena mata kuliah Teori Hubungan Internasional diajarkan kepada mahasiswa pada tahun pertama mereka di bangku kuliah, maka yang dibutuhkan pada saat-saat awal mereka mengenal mata kuliah ini adalah ketersediaan sumber bacaan yang dapat dengan lebih mudah memperkenalkan materi-materi dasar yang berkaitan dengan teori.

Masalahnya adalah, sumber bacaan yang tersedia memang sudah banyak, tetapi umumnya dengan format penulisan untuk mahasiswa tingkat lanjut. Selain itu, sebagian besar sumber-sumber bacaan yang tersedia masih merupakan karya penulis-penulis asing, ditulis dengan Bahasa Inggris, yang kadang-kadang menambah tantangan bagi sebagian mahasiswa yang kebetulan kemampuan penggunaan Bahasa Inggrisnya masih minim. Kondisi itu mengakibatkan lambannya mahasiswa membangun fondasi pemahaman dasar teori-teori hubungan internasional dan berakibat pada kerap tidak optimalnya mereka pada tahun-tahun setelahnya menggunakan teori sebagai alat analisis.

Bertolak dari kondisi itu, editor dan para kontributor berupaya mencari jalan keluar dengan menyusun buku ini. Para kontributor buku ini telah berupaya menyajikan masing-masing teori klasik hubungan internasional dengan gaya penulisan yang seringan mungkin bagi mahasiswa hubungan internasional pada tingkat awal --bahkan mungkin juga untuk kalangan umum non-hubungan internasional yang berminat

mengenai teori hubungan internasional—sehingga dapat dengan lebih mudah memahami teori-teori hubungan internasional. Buku ini lebih ditujukan sebagai buku pengantar. Harapannya ialah, setelah membaca buku ini para mahasiswa dapat dengan lebih mudah mencerna sumber-sumber rujukan lainnya terkait dengan perspektif yang hendak dipahami.

Buku ini menyajikan perspektif-perspektif klasik dalam teori hubungan internasional, tetapi diawali dengan uraian pengantar mengenai apa itu teori, bagaimana kedudukan teori dalam hubungan internasional, serta apa saja tujuan perlunya pemahaman teori dalam kajian hubungan internasional. Selain perspektif-perspektif klasik, masih ada juga teori-teori alternatif dalam hubungan internasional. Tentu akan lebih baik dan lengkap jika teori-teori alternatif ini dalam kesempatan lain diterbitkan juga dalam satu buku tersendiri.

Buku ini ditulis sebagai bagian dari program pengembangan kapasitas sumber daya yang ada di Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Untuk itu editor dan semua kontributor dalam buku ini mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung terrealisasinya penerbitan buku ini. Semoga tujuan penulisan dan penerbitan buku ini dapat termanfaatkan tidak saja untuk kalangan mahasiswa, tetapi juga kalangan umum.

Adapun kekurangan yang masih dapat ditemukan dalam buku ini, tentu saja sepenuhnya menjadi tanggungjawab masing-masing kontributor dan editor.

Surabaya, Desember 2016.

Daftar Isi

Kata Pengantar _____	i
Daftar Isi _____	iii

Bab 1: Teori & Teori Hubungan Internasional

Vinsensio Dugis _____	01
-----------------------	----

Bab 2: Realisme

I Basis Susilo _____	35
----------------------	----

Bab 3: Liberalisme

Vinsensio Dugis _____	55
-----------------------	----

Bab 4: Neorealisme

Radityo Dharmaputra _____	81
---------------------------	----

Bab 5: Neoliberalisme

Vinsensio Dugis _____	107
-----------------------	-----

Bab 6: Marxisme

Baiq L.S.W. Wardhani _____	125
----------------------------	-----

Bab 7: Konstruktivisme

I Gede Wahyu Wicaksana _____	147
------------------------------	-----

Para Penulis _____	175
--------------------	-----

Bab 1

Teori & Teori Hubungan Internasional

Vinsensio Dugis

Pengantar

Bab ini memaparkan pengertian teori dan kegunaan teori serta garis besar ciri disiplin hubungan internasional, dengan tujuan mengetahui kedudukan dan kegunaan teori dalam disiplin hubungan internasional. Diawali dengan menyajikan apa yang dimaksudkan dengan teori, bagian berikutnya melihat pengertian teori dalam hubungan internasional. Bagian selanjutnya merupakan kupasan mengenai kegunaan teori, yang kemudian diikuti oleh bahasan tentang tipologi dan klasifikasi teori. Bab ini selanjutnya diakhiri dengan bagian penutup. Dengan begitu, pembaca dapat dengan lebih cepat mengerti logika dan sekaligus dapat dengan lebih mudah memahami kajian-kajian tentang berbagai teori hubungan internasional pada bab-bab selanjutnya.

Apa itu Teori?

Kata teori sangat sering digunakan baik di lingkungan akademis maupun non-akademis. Uniknya, pemakaian yang sering ini ternyata diwarnai oleh banyaknya arti di balik penggunaan itu. Sebagaimana dikemukakan Waltz (1975:2), oleh kalangan pemelajar hubungan internasional, istilah teori digunakan secara bervariasi; sering dipakai

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

untuk merujuk karya-karya yang diawali dari hanya sekedar deskripsi, tetapi jarang ditujukan hanya untuk karya-karya yang memenuhi standar filsafat keilmuan. Keberagaman arti kata teori juga diakui Aron (1968). Menurutnya, di dalam terminologi Barat konsep teori mempunyai asal dan arti ganda dari dua tradisi yang berbeda.

Pertama teori sebagai pengetahuan kontemplatif, diturunkan dari tatanan dasar dunia yang dapat disejajarkan dengan filsafat. Disini teori berbeda tidak saja dari segi praktis tetapi juga dari segi pengetahuan yang disemangati keinginan untuk mengetahui dalam rangka memprediksi dan dengan demikian mampu bertindak. Jadi sebuah teori dikatakan semakin tinggi tingkatannya ketika semakin tinggi tingkat abstraksinya, sementara tingkat kepraktisannya semakin sedikit.

Kedua, teori sebagaimana dipahami secara ilmiah. Dalam konteks ini, teori adalah suatu hipotesis, sistem deduktif yang terdiri atas sejumlah hipotesis yang konsep-konsepnya diartikan secara presisi serta hubungan antar-konsep disajikan dalam bentuk hubungan yang berifat matematis. Elaborasi sistem ini berawal dengan konseptualisasi mengenai realitas yang diobservasi dilanjutkan dengan pembentukan aksioma atau hubungan-hubungan abstrak pada tingkat tinggi yang menuntun sistem dan memungkinkan ilmuwan menemukan dengan deduksi, baik formula yang dapat dijelaskan dengan baik maupun fakta-fakta yang dipersepsi melalui instrumen sehingga teori tersebut dapat tervalidasi atau tidak (Aron, 1968: 1-22).

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* teori dapat berarti “pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau (kejadian)”, misalnya teori tentang kejadian bumi dan teori tentang pembentukan negara. Selanjutnya teori juga diartikan sebagai “asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan”, misalnya teori mengendarai mobil, teori karang-mengarang, teori hitung dagang. Teori juga diartikan

sebagai “pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu”, yang contohnya bisa ditangkap dalam ungkapan “teorinya memang mudah, tetapi prakteknya sukar” (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991: 1041).

Paralel dengan pengertian sebelumnya, Collins dan Brash memberi arti teori sebagai “suatu rencana yang diformulasikan hanya di dalam pikiran”; “seperangkat aturan, prosedur, dan asumsi yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu”; “pengetahuan abstrak atau masuk akal”; “seperangkat hipotesis yang dihubungkan oleh argumen yang logis atau matematis untuk menjelaskan berbagai fenomena yang berhubungan di dalam terminologi yang umum” (Collins & Brash, 1982: 1214).

Sementara itu, Coulombis dan Wolfe (1985: 29) menyebutkan bahwa istilah teori berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah “melihat” atau “memperhatikan”. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa teori ialah suatu pandangan atau persepsi mengenai apa yang terjadi, sehingga pekerjaan berteori dapat diandaikan paralel dengan “pekerjaan penonton” yaitu “pekerjaan mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan” (Mas’oed, 1990, 218).

Ilmuwan lain, Dougherty dan Pfaltzgraff (1997: 15) mendefenisikan teori sebagai refleksi sistematis mengenai sejumlah fenomena, yang dibuat untuk menjelaskannya, serta menunjukkan bagaimana fenomena-fenomena tersebut berhubungan satu sama lain dalam suatu pola yang mempunyai arti dan masuk akal daripada hanya sekedar acakan sejumlah item dalam bidang yang tidak koheren. Setiap disiplin membutuhkan teori untuk menuntun penelitian, menyediakan dasar bagi suatu penjelasan, dan jika memungkinkan menuntun ke arah pembentukan kemampuan untuk memprediksi. Knutsen (1997: 1) menulis, teori adalah sekumpulan proposisi yang saling berhubungan yang

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

membantu menjelaskan mengapa kejadian-kejadian muncul seperti yang terlihat. Teori adalah abstraksi atau representasi spekulatif tentang realitas. Karenanya yang menjadi persoalan di dalam teori, bukanlah soal salah atau benar, tetapi apakah teori itu membawa pencerahan (*enlightening*) atau tidak, sehingga berteori pada dasarnya adalah membuat spekulasi dengan maksud memahami atau menjelaskan.

Sebagai upaya memperjelas pengertian teori, Waltz (1975: 2-3) memulai dengan membedakan pengertian antara hukum dan teori. Menurutnya istilah dan pengertian hukum sederhana tetapi dapat diterima secara luas. Hukum membentuk hubungan-hubungan antar-variabel berupa konsep-konsep yang dapat mempunyai nilai berbeda. Hukum dibentuk dan dirumuskan tidak saja berdasarkan pada hubungan antar-variabel yang pernah ditemukan, tetapi sebuah hubungan yang telah ditemukan berulang-kali. Sebaliknya, teori di dalam ilmu sosial umumnya dirumuskan dalam pernyataan yang menyerupai pernyataan hukum; tingkat kepastiannya tidak absolut sebagaimana hukum, tetapi lebih pada tinggi-rendahnya peluang kepastian. Waltz (1975: 3-4) selanjutnya mengidentifikasi adanya dua jenis pendefinisian teori.

Pendefinisian pertama melihat teori sebagai sekumpulan hukum yang menyinggung perilaku atau fenomena tertentu. Sebagai contoh, di samping pendapatan, hubungan dapat saja dibentuk antara pendidikan dan agama pemilih serta komitmen politik orang tuanya di satu pihak dan bagaimana mereka memilih di pihak yang lain. Jika kemungkinan terbentuknya hukum diambil secara keseluruhan maka korelasi yang lebih tinggi tercapai antara karakteristik pemilih (variabel bebas) dan pilihan partai (variabel dependen). Teori dengan demikian secara kuantitatif lebih kompleks dari hukum dan model pendefinisian ini sesuai dengan aspirasi ilmuwan sosial yang memilih membangun teori dengan pilihan hipotesis yang terverifikasi secara hati-hati.

Teori & Teori Hubungan Internasional

Pendefinisian kedua melihat teori tidak hanya sekedar sekumpulan hukum tetapi lebih merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan hukum. Sebagai contoh, hubungan antara dorongan dan gerakan yang ditimbulkan. Adalah sesuatu yang dapat diobservasi bahwa gerakan terjadi ketika ada dorongan yang diberikan; hukum. Penjelasan mengenai hubungan antara dorongan dan gerakan bisa berbeda tergantung kepada siapa kita bertanya. Berbagai penjelasan itulah yang kemudian disebut teori.

Atas dasar dua pembedaan definisi mengenai teori di atas, Waltz (1975: 4) lalu menyimpulkan bahwa hukum adalah fakta yang terobservasi (*laws of observation*), sementara teori adalah proses-proses spekulatif yang dikemukakan untuk menjelaskan fakta. Hasil eksperimental adalah permanen, sementara teori, seberapa pun kuatnya teori tersebut mendapat dukungan, mungkin saja tidak selamanya bersifat permanen. Hukum bersifat tetap sementara teori datang dan pergi (timbul dan tenggelam).

Mengacu pada berbagai definisi yang telah dipaparkan sebelumnya maka teori identik dengan alat atau kerangka berpikir yang dipakai untuk memahami suatu fenomena sehingga fenomena tersebut dapat dimengerti dan dipahami sebagai sesuatu yang mempunyai makna dan masuk akal. Teori adalah kerangka berpikir yang dibangun dengan menghubungkan sejumlah konsep melalui porposisi-proposisi yang logis sehingga dapat memberikan makna terhadap sejumlah fakta yang keberadaannya tidak beraturan.

Teori dalam Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah disiplin ilmu yang melibatkan sejumlah besar fakta tentang dunia. Tetapi seperti telah disebutkan sebelumnya, fakta-fakta ini hanya akan menjadi lebih bermakna dan relevan ketika tersedia suatu kerangka berpikir (teori) sebagai tempat bagi fakta-fakta tersebut untuk

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

dideskripsikan, dianalisis dan bahkan memperhitungkan sesuatu yang akan terjadi ke depan. Carr karenanya pernah menganalogikan fakta dengan karung/goni dan menulis, “a fact is like a sack, it won’t stand up till you’ve put something in it” [fakta itu ibarat karung yang tidak akan tegak berdiri jika tidak diisi sesuatu di dalamnya] (Carr, 1961: 11, dalam Woods, 1996: 9).

Dengan demikian di dalam disiplin hubungan internasional pun pengertian teori tidak berbeda dari pengertian yang telah disimpulkan sebelumnya. Hanya saja karena fakta dalam ilmu hubungan internasional sangat beragam jenisnya maka teori yang muncul dan berhasil dikembangkan pun sangat bervariasi. Akibatnya, pemaknaan tentang apa yang dimaksudkan dengan teori juga beragam. Tidak jarang pemaknaannya tergantung pada bagaimana dan untuk apa teori itu digunakan.

Walau demikian, Bull (1995: 181-182) mengemukakan bahwa teori hubungan internasional bisa dipahami sebagai sekumpulan proposisi-proposisi umum yang dikemukakan mengenai politik global/dunia (*world politics*). Proposisi tersebut mencakup proposisi-proposisi normatif, yang menyatakan konsiderasi-konsiderasi moral ataupun legal yang dapat diaplikasikan dan juga proposisi-proposisi positif yang mendefinisikan atau menjelaskan karakter aktualnya. Teori hubungan internasional meliputi teori-teori komprehensif yang mendeskripsikan atau menentukan politik internasional secara keseluruhan, tetapi juga teori-teori parsial yang hirau dengan beberapa elemen politik internasional semisal perang atau damai, strategi atau diplomasi.

Bull selanjutnya juga mengemukakan bahwa teori hubungan internasional juga meliputi teori tentang masyarakat internasional atau sistem internasional yang membahas mengenai hubungan berbagai unit (negara-negara, bangsa-bangsa, kelompok-kelompok supranasional, transnasional dan subnasional) yang membentuk politik global/dunia

Teori & Teori Hubungan Internasional

(*world politics*), termasuk juga teori mengenai unit-unit itu sendiri. Teori hubungan internasional meliputi juga teori-teori yang dikembangkan secara sadar untuk meniru metode ilmu-ilmu alam, yang artinya menolak apa saja yang tidak dapat dibuktikan secara logis, matematis atau tidak dapat diverifikasi secara ketat melalui prosedur-prosedur empiris; dan juga tentu saja teori-teori yang dikembangkan tanpa mengikuti persyaratan metodologis di atas.

Masih menurut Bull, teori hubungan internasional juga mencakup teori-teori yang secara sengaja dibuat melalui simplifikasi realitas misalnya dengan elaborasi model-model deduksi, termasuk juga teori-teori yang dibentuk melalui proses generalisasi induktif. Termasuk juga di dalam teori hubungan internasional ialah teori-teori yang memang secara sengaja tidak bermaksud memberi masukan bagi implementasi kebijakan dan juga teori-teori yang memang dirancang berorientasi kebijakan (*policy-oriented* atau *praxeological*).

Pemaparan mengenai teori yang dikemukakan Bull di atas secara implisit menunjukkan bahwa teori hubungan internasional bukanlah sebuah teori tunggal tetapi lebih merupakan kumpulan dari sejumlah teori. Keberagaman tersebut juga merefleksikan kompleksitas fenomena hubungan internasional sehingga pemahamannya membutuhkan sejumlah teori. “One World, Many Theories” [Satu Dunia dengan Banyak Teori], demikian tulis Walt (1998). Tetapi kita membutuhkan teori untuk memahami dunia yang setiap hari terus dibombardir informasi yang tak terhingga jumlahnya. Di samping itu, pemaparan Bull di satu sisi menunjukkan kekayaan teori di dalam disiplin hubungan internasional, tetapi di pihak lain justru menyiratkan kerumitan yang dapat diakibatkannya, baik ketika mengidentifikasi teori hubungan internasional maupun pada saat berupaya memahami teori-teori tersebut.

Secara garis besar Zalewski (1996) mengelompokkan tiga cara yang berbeda bagaimana teori umumnya ditinjau

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

oleh para ilmuwan hubungan internasional. Pertama, ilmuwan yang umumnya menulis teori sebagai alat (*theory as a tool*). Dalam pandangan mereka ini, teori adalah sesuatu yang digunakan oleh mereka yang berkeinginan untuk memberi arti terhadap kejadian-kejadian dalam politik internasional.

Kedua, ilmuwan yang menulis teori sebagai kritik (*theory as critique*). Di dalam konteks ini, teori diasumsikan secara aktif berhubungan dengan dunia nyata, dan sebagai alat yang mempunyai kegunaan yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian, selain menjelaskan fenomena, teori seharusnya juga dapat digunakan untuk mengubah atau mengatasi persoalan nyata.

Ketiga, ilmuwan yang memikirkan teori sebagai praktek kehidupan sehari-hari (*theory as everyday practice*). Kelompok ini umumnya beranggapan bahwa apa yang dilakukan kita sehari-hari pada umumnya ialah kegiatan berteori (*theorise*). Di dalam hal ini teori cenderung tidak dilihat sebagai suatu benda (*noun*) yang lalu berkonotasi alat yang dapat diambil, dimanfaatkan dan kemudian diperbaiki manakala perlu, tetapi lebih dilihat sebagai suatu kegiatan (*verb*). Meski demikian, Zalewski mengakui juga bahwa tidak semua ilmuwan hubungan internasional dapat dengan mudah dikelompokkan ke dalam satu dari tiga kategori ini (Zalewski, 1996: 340-353).

Kegunaan Teori

Salah satu ciri mengedepan disiplin hubungan internasional ialah ruang lingkupnya yang begitu luas sehingga mencakup begitu banyak aspek yang dapat ditelaah. Namun demikian, tujuan utama studi hubungan internasional ialah mempelajari perilaku internasional dari sejumlah aktor, baik aktor negara maupun aktor non-negara, di dalam arena transaksi hubungan internasional. Perilaku tersebut dapat berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam

Teori & Teori Hubungan Internasional

organisasi internasional dan jenis-jenis interaksi lainnya. Walaupun dalam kenyataannya aktor yang cenderung lebih berpengaruh dan efektif adalah aktor negara sehingga perilaku internasional yang paling banyak memperoleh perhatian para analis dan pemelajar hubungan internasional adalah perilaku negara, tetapi perilaku aktor-aktor non-negara seharusnya juga perlu mendapat perhatian. Dengan kata lain, ilmuwan hubungan internasional harus mempelajari apa saja yang dapat dipakai untuk memahami perilaku-perilaku aktor itu di dalam transaksi hubungan internasional.

Deutsch (1988: 6-10) adalah salah satu ilmuwan hubungan internasional yang secara eksplisit mengidentifikasi ruang lingkup studi hubungan internasional yang membatasi lingkup wilayah studi ilmu hubungan internasional ke dalam sejumlah pertanyaan mengenai duabelas masalah pokok. Pertama, bangsa dan dunia (*nation and world*). Kedua, proses-proses transnasional dan interdependensi internasional (*transnational processes and international interdependence*). Ketiga, perang dan damai (*war and peace*). Keempat, kekuatan dan kelemahan (*power and weakness*). Kelima, politik internasional dan masyarakat internasional (*international politics and international society*). Keenam, kependudukan versus pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup (*world population vs food, resources and environment*). Ketujuh, kemakmuran dan kemiskinan (*prosperity and poverty*). Kedelapan, kebebasan dan penindasan (*freedom dan oppression*). Kesembilan, persepsi dan ilusi (*perception and illusion*). Kesepuluh, aktivitas dan apati (*activity and apathy*). Kesebelas, revolusi dan stabilitas (*revolution dan stability*). Keduabelas, identitas dan transformasi (*identity and transformation*).

Ruang lingkup studi yang begitu luas dengan sendirinya menempatkan studi hubungan internasional dengan banyak aspek sebagai muatan studi yang pada gilirannya mengkondisikan situasi interaksi yang serba tidak terstruktur

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

dan tidak pula teratur. Hal demikian pada gilirannya ikut mempersulit upaya mengklasifikasi yang kemudian juga berimplikasi terhadap sulitnya upaya memahami dan mengerti fenomena dan pola-pola interaksi yang terjadi di dalam hubungan internasional. Dengan pernyataan yang cukup ekstrim, Spanier misalnya menulis bahwa politik internasional tidak begitu dirasakan maknanya oleh banyak orang, meskipun politik internasional semakin mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari (*international politics makes no sense to many people, even though it affects their daily lives more and more*) (Spanier, 1981: 3).

Atas dasar karakter disiplin yang bidangnya luas dan keberagaman fenomena serta pola-pola interaksi yang ada di dalamnya, maka dibutuhkanlah alat analisis atau teori. Teori membantu dalam mendeskripsi dan mengklasifikasi fenomena serta menjelaskan pola-pola interaksi hubungan internasional. Tanpa teori maka fenomena dan pola-pola perilaku tersebut hanya berupa serakan fakta tak bermakna. Sejalan dengan perkembangan kemajuan teknologi dan komunikasi, struktur interaksi dalam hubungan internasional semakin kompleks. Pada tingkat negara, fungsi-fungsi aktor yang umumnya hanya dijalankan oleh lembaga atau badan-badan yang dibentuk khusus (semisal lembaga diplomatik resmi) mulai bergeser peranannya akibat arus globalisasi. Batas-batas kedaulatan negara menjadi semakin relatif maknanya sehingga gejala ini pun seringkali digambarkan sebagai dunia tanpa batas (*borderless world*). Untuk itu teori sebagai alat bantu analisis semakin dibutuhkan.

Sementara itu, pada tingkat yang paling bawah globalisasi semakin meningkatkan, baik secara kuantitas maupun kualitas, dampak interaksi hubungan internasional terhadap hidup keseharian banyak orang. Dalam lingkungan yang dipengaruhi arus globalisasi ini, manusia seolah-olah terus dibombardir sejumlah informasi baik yang diperoleh melalui bacaan maupun didengar dan dilihat. Di pihak

Teori & Teori Hubungan Internasional

lain, upaya memahami pola dan dampak interaksi tersebut semakin tidak mudah. Kalaupun pola dan dampak interaksi tersebut dapat dipahami, hal itu cenderung terbatas pada sekelompok orang tertentu yang mungkin karena pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki mampu melakukan upaya pemahaman dimaksud.

Hal berikut yang juga ikut berpengaruh dengan apa yang dijelaskan sebelumnya ialah kemampuan manusia yang serba terbatas. Dalam konteks memahami fenomena hubungan internasional, keterbatasan itu setidaknya secara umum dapat dikategorikan menjadi dua tingkatan. Kategori pertama, keterbatasan yang dialami oleh manusia kebanyakan. Kategori ini meliputi mereka yang tidak mempunyai pengalaman teoritik atau edukatif resmi ataupun juga pengalaman praktis semisal tugas-tugas diplomatik. Reaksi yang muncul terhadap fenomena hubungan internasional umumnya lebih bersifat emosional, jauh dari pemikiran-pemikiran yang taktis dan strategis. Informasi yang diterima cenderung dilihat apa adanya. Oleh karena itu, pada kelompok kategori pertama ini, jangankan memahami, mengklasifikasi fenomena hubungan internasional saja bukanlah pekerjaan yang dengan mudah dapat dilakukan.

Kategori kedua, keterbatasan metodologis yang dimiliki oleh kelompok yang secara teoritik dan edukatif mampu melakukan kegiatan analisis terhadap fenomena hubungan internasional yang sedang terjadi. Kelompok ini masuk dalam kelompok kecil yang boleh jadi pengamat, analis, pemelajar, penstudi ataupun ilmuwan hubungan internasional yang secara khusus memberi perhatian terhadap fenomena-fenomena hubungan internasional yang terjadi. Dalam segala keterbatasan itu pemelajar ataupun ilmuwan hubungan internasional pada akhirnya dihadapkan pada situasi memilih. Dikatakan demikian, karena ada sejumlah besar fenomena yang terjadi dalam kurun waktu yang hampir bersamaan. Belum lagi ketika satu atau beberapa fenomena yang sama

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

tersaji dan dapat diketahui melalui berbagai macam media informasi. Situasi memilih inilah yang seringkali dianggap sebagai tantangan awal yang dihadapi analis ataupun ilmuwan hubungan internasional. Dikatakan sebagai tantangan karena ilmuwan hubungan internasional harus menemukan sasaran analisa yang tepat, yaitu apa yang harus ditelaah atau diamati dalam mempelajari ilmu hubungan internasional.

Terhadap keharusan memilih ini, Morgan (1987: 10) menulis bahwa hal pertama yang dihadapi adalah menentukan apa yang harus dilihat (*what to look at*). Morgan selanjutnya menjelaskan bahwa kita tidak dapat melihat semuanya karena secara fisik hal tersebut tidak memungkinkan. Di samping itu, lanjut Morgan, kita pun sesungguhnya tidak menginginkan itu. Pada umumnya kita hanya ingin melihat sejumlah fenomena yang kita rasakan penting. Oleh karena itu kita harus memutuskan apa yang dianggap penting, apa yang dianggap paling menarik dan apa yang kita anggap paling bermanfaat.

Untuk maksud yang sama, Singer (1961) menjelaskan sebagai berikut. Dalam setiap bidang kajian ilmu, terdapat sejumlah cara di mana sekumpulan fenomena bidang studi tersebut disortir dan ditata kembali untuk tujuan-tujuan analisis secara sistematis. Baik di dalam ilmu-ilmu fisik maupun sosial para pengamat boleh memilih untuk memusatkan perhatian pada bagian-bagian atau pada keseluruhan fenomena. Selanjutnya Singer menguraikan penjelasannya dengan analogi; bahwa para pengamat atau ilmuwan hubungan internasional boleh saja memilih antara bunga-bunga atau taman, karang atau kumpulan karang, pohon-pohon atau hutannya, rumah atau kampungnya, mobil atau lalu-lintasnya, remaja nakal atau kelompok gangnya, para anggota legislatif atau lembaga legislatifnya (Singer, 1961: 77).

Dihadapkan dengan keharusan memilih ini, Spanier berargumen dengan cara yang berbeda. Spanier melihat meningkatnya dampak interaksi hubungan internasional

Teori & Teori Hubungan Internasional

terhadap kehidupan keseharian banyak orang memunculkan keharusan memahami fenomena hubungan internasional. Dia menganggap bahwa pemahaman (*understanding*) adalah sebuah proses intelektual, dan proses memahami hubungan internasional seyogyanya muncul dengan anggapan bahwa kita harus mengorganisir potongan-potongan informasi yang berserakan yang kita dengar dan lihat setiap hari. Karena itu proses pemahaman (*making sense*) itu dimulai dengan mempelajari bagaimana menangani atau mengurus sejumlah besar informasi yang terfrakmentasi. Selanjutnya Spanier juga menguraikan bahwa persepsi kita cenderung serba selektif sementara dunia semakin serba kompleks. Karena itu, kita dipaksa untuk menyederhanakan realitas yang kompleks tersebut jika kita ingin memahaminya. Kita semua mempunyai gambaran tersendiri di dalam pikiran, yang dipakai untuk melihat dunia dan mencoba menjelaskannya. Persepsi tentang dunia inilah yang disebut model tentang dunia yang riil. Model-model demikian membantu mengorganisir informasi, menyeleksi fakta-fakta yang relevan, menata fakta-fakta tersebut pada suatu tatanan untuk selanjutnya diinterpretasi (Spanier, 1981: 5).

Dengan sedikit menoleh kembali pada bagian sebelumnya, maka nampak jelas bahwa teori mempunyai banyak manfaat atau kegunaan. Hal yang paling fundamental ialah teori merupakan alat bantu yang memungkinkan kegiatan deskripsi, eksplanasi terhadap fenomena hubungan internasional yang terjadi serta kemampuan prediksi terhadap apa yang mungkin terjadi di kemudian hari. Sebagaimana dikatakan Dougherty dan Pfaltzgraff (1997: 15), untuk menuntun penelitian setiap disiplin membutuhkan teori; teori dipakai sebagai alat untuk menyediakan dasar bagi suatu penjelasan, dan pada titik tertentu ketika memungkinkan teori menuntun ke arah kemampuan untuk memprediksi. Teori juga bermanfaat di dalam mendefinisikan apa yang kita pelajari dalam hubungan internasional, tujuan kita mempelajari itu, dan kategori-

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

kategori dalam hubungan internasional yang kemungkinan ditetapkan dalam menganalisa pola-pola perilaku dari aktor-aktor internasional (Woods, 1996: 9). Sebagaimana juga telah disinggung pada bagian awal bab ini, hubungan internasional adalah disiplin ilmu yang melibatkan sejumlah besar fakta tentang dunia, tetapi fakta-fakta ini hanya akan menjadi lebih bermakna dan relevan ketika tersedia suatu kerangka berpikir (teori) sebagai tempat bagi fakta-fakta tersebut untuk dideskripsikan, dianalisis dan bahkan memperhitungkan sesuatu yang akan terjadi ke depan.

Di samping manfaat dan fungsi teori sebagaimana disebutkan di atas, Morgenthau mengidentifikasi adanya sejumlah fungsi-fungsi intelektual dan politik dari teori (*intellectual and political functions of theory*) (Morgenthau, 1995: 36-52). Pertama, teori berfungsi sebagai justifikasi teoritik terhadap apa yang sedang diambil dan dilakukan oleh para pembuat keputusan. Morgenthau mencontohkan fungsi ini pada kebijakan yang diambil masa pemerintahan Presiden Truman dan wakilnya Acheson. Menurut Morgenthau, pada 1947 pola baru politik luar negeri Amerika Serikat yang terbentuk, termanifestasikan dalam empat temuan politik: Doktrin Truman, Kebijakan Pembendungan (*Containment*), Kebijakan Marshall, dan sistem aliansi Amerika. Keempat kebijakan ini mempunyai asumsi yang sama yaitu tanggungjawab Amerika Serikat di seluruh Wilayah Pengaruh Barat (*Western Hemisphere*) dengan jantung kebijakan ialah strategi pembendungan. Namun demikian, kebijakan pembendungan tidak pernah diformulasikan secara resmi tetapi muncul dengan sendirinya sebagai reaksi terhadap ancaman imperealisme Rusia. Tujuannya membatasi pengaruh kekuasaan Rusia di luar batas wilayah militer yang dibagi di akhir Perang Dunia II. Menurut Morgenthau, tidak ada teori yang sebelumnya mendukung kebijakan-kebijakan ini tetapi teoritis justru mengembangkan kerangka teoritik setelah kebijakan-kebijakan tersebut diambil dan dijalankan sehingga memberi pembenaran terhadap pemberlakuan

Teori & Teori Hubungan Internasional

kebijakan-kebijakan tersebut. Para pembuat keputusan membuat interpretasi terhadap apa yang dirasakannya sebagai ancaman sehingga kerangka teoritik yang kemudian dikembangkan para teoritis memberikan semacam persetujuan rasional terhadap kebijakan-kebijakan tersebut.

Kedua, berlawanan dengan yang pertama, teori berfungsi sebagai landasan atau dasar bagi pembuatan kebijakan. Morgenthau merujuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada dua periode pemerintahan Presiden Eisenhower di mana figur John Foster Dulles dan pikiran-pikiran teoritiknya sangat mendominasi. Teori di dalam hal ini mengembangkan sistem pemikiran koheren yang menjadi landasan pembuatan dan pelaksanaan politik luar negeri sehingga pelaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat dinilai dengan standar-standar pemikiran teoritik yang telah dibentuk sebelumnya. Karena itu di dalam konteks ini teori menyediakan kerangka kerja yang rasional bagi kalangan non-ortodoks dan posisi politik yang kritis baik di dalam pun di luar administrasi pemerintahan.

Ketiga, teori juga mempunyai fungsi intelektual dan politik untuk memainkan peran yang disebutnya nurani intelektual (*intellectual conscience*). Morgenthau mencotohkan situasi politik luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Kennedy. Ia menyebutkan bahwa politik luar negeri Amerika Serikat yang ketika itu didominasi oleh staf yang berlatar belakang teori (*foreign policy by theorists*) mengakibatkan tidak ada lagi ruang publik untuk memberi pengaruh. Para staf cenderung menganggap mengetahui banyak sehingga opini publik dan tekanan politik dalam negeri sering terabaikan. Di dalam hal inilah teoritis dituntut untuk memainkan nurani intelektual untuk mengingatkan para pembuat keputusan dan publik apa saja prinsip-prinsip kebijakan yang sebaiknya memang dilakukan dan sejauhmana pelaksanaan politik luar negeri tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

Keempat, teori seharusnya juga berfungsi sebagai masukan terhadap persiapan menuju ke suatu tatanan internasional baru yang secara radikal berbeda dengan tatanan internasional yang telah ada sebelumnya. Teoritis menurut Morgenthau harus mampu menunjukkan bahwa tatanan organisasi politik yang dibentuk semenjak revolusi Prancis 1789 tidak lagi valid dan karenanya harus digantikan oleh suatu tatanan yang lebih relevan.

Di samping keempat fungsi tersebut di atas, Morgenthau juga menyebut salah satu fungsi teori adalah menyediakan semacam tameng yang baik untuk melindungi komunitas akademik dari kontak dengan kehidupan dunia politik yang nyata. Fungsi inilah yang seringkali diperankan oleh mereka yang sangat mengutamakan metodologi di dalam upaya mengembangkan teorinya. Dengan demikian di dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan praktis, teori setidaknya berfungsi dalam tiga hal; pertama memberikan penjelasan (*theory as explanation*), kedua sebagai penuntun kebijakan (*theory as a guide to policy*), dan ketiga sebagai justifikasi (*theory as justification*) (Vincent, 1994: 29-39). Dalam konteks inilah Knutsen (1997) menyimpulkan teori memang mencerahkan (*theories enlighten*).

Tipologi dan Klasifikasi

Pemahaman mengenai tipologi teori penting setidaknya karena beberapa alasan. Pertama, pada tingkat awal, tipologi dan klasifikasi teori memberi kemudahan untuk memahami substansi teori. Artinya tipologi tertentu dapat lebih mengarahkan pemelajar (terutama pemula) ke suatu fokus tertentu sehingga dapat dengan lebih mudah memahami substansi teori. Kedua, pada tingkat yang lebih tinggi, tipologi dapat mempermudah identifikasi teori yang sesuai dengan kebutuhan baik untuk deskripsi, eksplanasi maupun prediksi. Teori-teori berjangkauan universal (*grand*

Teori & Teori Hubungan Internasional

theory) cukup kuat pada aspek deskripsi tetapi agak lemah pada aspek eksplanasi. Sebaliknya teori berjangkauan menengah (*middle-range*) dan teori-teori parsial kuat pada aspek penjelasan tetapi lemah pada aspek deskripsi. Ketiga, pada tingkat lanjut tipologi juga membantu upaya menilai teori.

Di dalam bagian pengantar karya yang dieditnya, Rosenau (1969: xvii-xx) secara umum mengelompokkan teoritis dan teori hubungan internasional berdasarkan fokus kajiannya ke dalam dua kategori yaitu kajian tentang aksi dan kajian tentang interaksi aktor-aktor sistem internasional. Kelompok pertama tertarik melihat keteraturan perilaku aktor-aktor, kemiripan tujuan yang akan dicapai, cara-cara dan proses-proses yang digunakan mencapai tujuan, serta mengkaji sumber-sumber sosial dari tujuan-tujuan dan cara-cara yang dipilih. Dengan kata lain, kelompok ini mempunyai perhatian terhadap studi-studi politik luar negeri. Mereka cenderung menganggap bahwa setiap saat kondisi sistem internasional dapat berubah karena tindakan-tindakan politik luar negeri negara-negara. Karena itu fokus kelompok pertama ini ialah lebih pada komponen sistem internasional.

Kelompok kedua sebaliknya hanya cenderung mengkaji pola-pola yang muncul dalam interaksi antar-negara, perimbangan kekuatan yang berkembang dalam berbagai situasi, pembentukan koalisi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perubahan-perubahan dalam sistem internasional, serta perkembangan institusi supranasional yang dapat mengatur satu atau lebih aspek-aspek sistem internasional. Dengan kata lain, kelompok ini memfokuskan dirinya pada studi politik internasional. Kelompok ini beranggapan bahwa setiap saat kondisi sistem internasional mensyaratkan penyesuaian perilaku dari komponen-komponen nasionalnya. Dengan demikian fokusnya adalah sistem internasional sebagai satu kesatuan.

Di dalam setiap disiplin ilmu terdapat berbagai jenis teori. Hal ini dapat dimengerti karena umumnya

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

di dalam masing-masing disiplin ilmu terdapat berbagai bentuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Tetapi meskipun demikian, tidak semua teoritis menunjukkan minat pada semua bentuk pertanyaan atau bahkan semua teori, sekalipun di dalam bidang disiplin ilmu yang ditekuni sendiri. Sebagaimana dalam disiplin ilmu lainnya, di dalam disiplin ilmu hubungan internasional juga dapat ditemukan teori-teori yang komprehensif atau teori-teori berjangkauan universal (*grand theories*) dan teori-teori parsimoni atau berjangka menengah (*middle-range theories*). Kebanyakan penulis terkenal memusatkan perhatiannya pada salah satu pendekatan di dalam setiap kategori atau bahkan ada yang mengakui dominasi teori berjangkauan universal tertentu sambil menekuni minatnya pada aspek-aspek teori yang lebih sempit.

Menurut Dougherty dan Pfaltzgraff (1997: 15-16), teori berjangkauan universal (*grand theory*) berisi pokok penjelasan umum mengenai sejumlah besar fenomena yang cakupannya luas. Contoh-contohnya adalah teori-teori realis atau kekuasaan dari Morgenthau dan Kissinger, teori-teori neorealis dari Waltz dan Kindermann, teori-teori sistem dari Kaplan dan Rosecrance, teori-teori neo-Marxis tentang perekonomian dunia kapitalis dari Wallerstein dan Chase-Dunn, dan teori-teori ketergantungan dari Samuel dan Valenzuela. Sementara itu contoh dari teori-teori parsimoni (*partial*) dan berjangkauan menengah (*middle-range*) yang menjelaskan fenomena dalam jumlah terbatas dengan sesedikit mungkin variabel meliputi antara lain (a) teori tentang pengaruh lingkungan geografi (Mahan, Mackinder, Spykman, Harold dan Margaret Sprout), (b) teori pola-pola komunikasi dan pembentukan komunitas (Deutsch), (c) teori fungsionalisme dan integrasi sektor atau bagian (Mitrany, Haas, Lindberg, dan Nye), (d) teori penggentar/deterrence (Brodie, Kahn, Snyder dan Diesing, serta Jervis), (e) teori mengenai pembangunan dan konflik internasional (Choucri dan North), (f) teori tingkah-laku aliansi (Riker dan Walt), (g) teori tingkah laku *bargaining* (Schelling dan Rapaport),

(i) teori pembuatan keputusan (Snyder, Allison, dan Paige).

Namun demikian, klasifikasi teori ke dalam grand/middle-range/parsimoni seringkali bukan merupakan klasifikasi yang presisi. Artinya, terdapat teori yang tidak mudah untuk dapat dikategorikan ke dalam salah satu dari klasifikasi tersebut atau bahkan mungkin sama sekali tidak dapat dikategorikan ke dalam keduanya. Klasifikasi teori tersebut di atas tentu saja berdasarkan jangkauan penjelasan dan variabel yang dicakupi penjelasan teoritik tersebut.

Selain atas dasar jangkauan, teori juga dapat diklasifikasi menurut ruang lingkup penjelasannya (teori mikro dan makro), berdasarkan tingkat-tingkatnya, dan juga atas dasar struktur internal teorinya. Selanjutnya teori dapat juga diklasifikasi berdasarkan fungsinya; deskripsi, eksplanasi, dan prediksi, meski untuk kategori ini terkadang dapat ditemukan teori yang dikembangkan dengan lebih dari satu fungsi. Seperti halnya teori dalam masing-masing bidang disiplin ilmu umumnya, teori-teori dalam disiplin ilmu hubungan internasional dapat juga diklasifikasi menurut sejumlah kategori tersebut di muka.

Menurut Hoffmann (1969: 30-40), upaya berteori dan teori yang dihasilkannya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Pertama, berdasarkan tingkat elaborasi (*degree of elaboration*). Sejumlah teori hanya terdiri atas *pertanyaan-pertanyaan* metodologis terhadap studi hubungan internasional. Pada tingkat yang lebih kompleks, dapat ditemukan *hipotesis* yang menuntun penelitian. Sementara tahapan terakhir ialah sejumlah *hukum* yang ditujukan untuk menjelaskan fenomena dan berarti menjawab pertanyaan atau menjadi hipotesis yang defenitif.

Kedua, berdasarkan ruang lingkup (*degree of scope*). Kategori ini meliputi upaya pada level teori-teori parsial (*partial theories*) dan upaya pada level teori-teori umum (*general theory*). Masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan sebagaimana di dalam sosiologi dan ilmu

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

politik domestik, sebagaimana juga telah sedikit disinggung dalam bagian sebelumnya di bab ini.

Ketiga, berdasarkan obyek. Di dalam klasifikasi ini dapat ditemukan di satu pihak teori-teori empiris (*empirical theory*) yang berorientasi pada studi mengenai fenomena konkret, dan di lain pihak teori filosofis (*philosophical theory*) yang berorientasi pada realisasi ide, yang menilai realitas menurut nilai-nilai tertentu atau menyediakan deskripsi tentang realitas berdasarkan konsep-konsep yang apriori mengenai sifat alamiah manusia dan berbagai institusi. Di samping itu, termasuk juga di dalam kategori ini teori-teori yang disusun oleh “ilmu-ilmu kebijakan” (*policy sciences*) yaitu teori berorientasi aksi (*action-oriented theory*), studi mengenai realitas bukan semata-mata untuk kepuasan pemahaman tetapi dalam rangka bertindak.

Hoffman juga menjelaskan bahwa teori-teori empirik (*empirical theories*) selanjutnya masih dapat diklasifikasikan atas dasar pertama, metode dan kedua, fokus. Pertama, atas dasar metode. Di satu sisi terdapat metode deduktif yang mencoba membangun model-model abstraksi dari sejumlah kecil postulat sedemikian rupa sehingga meliputi aturan-aturan rasional yang berlaku pada situasi yang berbeda. Di sisi lain metode induktif yang mencoba berawal dari realitas konkret dan mengidentifikasi signifikasi realitas sehingga menjadilebihjelas (*intelligible*). Kedua, atas dasar fokus. Teori-teori tertentu pada dasarnya merupakan konseptualisasi. Tujuannya ialah menganalisa dan menyempurnakan konsep-konsep utama dalam upaya memahami hubungan antar negara. Berbagai konseptualisasi ini menyediakan material untuk dua tipe teori lainnya yaitu, (1) skematisasi (*schematizations*), yang berupaya mendefinisikan aturan-aturan karakteristik pelaksanaan dan berbagai tipe hubungan darimana aturan-aturan ini berasal, (2) teori-teori yang hirau dengan faktor-faktor penentu dengan analisis yang sistematis mengenai sejumlah kekuatan yang mempengaruhi kejadian, beberapa jenis hubungan internasional yang terjadi atau mengapa faktor-faktor tersebut berlaku demikian.

Sepuluh Citra-Diri Teori Hubungan Internasional

Di luar kategori yang teridentifikasi sebelumnya, Steve Smith (1995) membuat klasifikasi berdasarkan urutan silsilah tema perdebatan yang ada (*genealogy of international relations theory*), yang disebutnya *ten-self images of international theory*. Bagian berikut ini selanjutnya memaparkan secara penuh dalam bentuk saduran apa yang tertuang dalam karya Smith.^{1*}

1. Teori Hubungan Internasional vs Teori Politik

Kontroversi mengenai kedua hal di atas berawal ketika paper berpengaruh Wight diterbitkan tahun 1966, dimana teori hubungan internasional didefenisikan sebagai ‘suatu tradisi berspekulasi tentang masyarakat negara, atau keluarga bangsa-bangsa, atau komunitas internasional, berlawanan dengan teori-teori politik yang lebih memperhatikan unsur spekulasi mengenai negara’. Wight berargumen bahwa tidak ada kumpulan teori hubungan internasional yang dapat menyaingi teori politik dan menganggap miskinnya perkembangan teori-teori hubungan internasional. Untuk menunjang argumennya, Wight menunjuk dominannya konsep negara di dalam teori politik sehingga sulit dibayangkan untuk berpikir mengenai komunitas dunia ataupun individu yang mempunyai hak lebih dari negara. Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa berbicara mengenai teori hubungan internasional membutuhkan penggunaan bahasa teori politik domestik dan ini menurutnya bukanlah sesuatu yang pantas kalau kita berbicara mengenai keberlangsungan teori. Karena itu Wight mengatakan bahwa tidak ada teori hubungan internasional selain filsafat mengenai sejarah sehingga hanyalah sejarahwan yang dapat

^{1*} Bagian ini sepenuhnya merupakan saduran dari karya Smith, Steve, (1995), “The Self-Images of a Discipline: A Genealogy of International Relations Theory”, dalam, Booth, Ken & Smith, Steve, *International Relations Theory Today*, (eds.), The Pennsylvania State University Press, 1-37.

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

menjelaskan dengan baik sifat dasar politik luar negeri dan mekanisme kerja sistem hubungan antar-negara.

Pendapat Wight nampaknya mendapat banyak kritik. Smith sendiri melihat bahwa Wight berawal dengan dikotomi yang keliru sehingga terkesan memberi potongan-potongan terhadap teori hubungan internasional. Jones juga melihat bahwa pandangan Wight hanya berlaku bagi tradisi hubungan internasional 'English School' karena menurutnya mereka telah memisahkan diri dari tema-tema klasik pemikiran politik. Sementara itu Brown menganggap kelemahan cara pandang Wight terletak pada penggunaan definisi teori politik sempit yang hanya mengenai negara sehingga membatasi teori hubungan internasional dari pembahasan yang lebih luas. Padahal masih ada aspek lain yang dicakup dalam definisi teori politik dan sebenarnya terdapat tumpang-tindih yang signifikan antara teori politik dan teori hubungan internasional. Sehingga pada dasarnya teori hubungan internasional adalah salah satu aspek dari aspek yang lebih luas mengenai teori-teori sosial, politik, etika dan ekonomi. Oleh karena itu, diskursus mengenai teori politik dan teori hubungan internasional umumnya dipresentasikan secara berbeda tetapi saling mengisi dan menyapa.

2. Komunitarian vs Kosmopolitan

Kategorisasi ini merujuk pada perdebatan yang telah cukup berkembang di dalam apa yang dikenal sebagai teori normatif (*normative theory*), walaupun terminologi ini kurang tepat karena menyiratkan adanya kategori non-normatif teori. Perbedaan antara kedua kategori ini sederhana. Teori-teori komunitarian berargumen bahwa komunitas politik adalah pemegang hak dan kewajiban di dalam masyarakat internasional, sebaliknya teori-teori kosmopolitan berargumen bahwa argumen-argumen moral harusnya berlandaskan tidak pada komunitas tetapi pada manusia secara keseluruhan

Teori & Teori Hubungan Internasional

atau individu-individu. Perdebatan antara kedua posisi ini telah membuka kesempatan terhadap pengembangan teori hubungan internasional yang normatif dan upaya menghubungkan teori internasional dengan perdebatan yang sama pada disiplin-disiplin lain, terutama filsafat moral, teori-teori sosial dan politik.

Problem utama kategorisasi ini ialah seolah-olah mayoritas teori hubungan internasional tidak pernah eksis. Padahal tujuan utama ketika disiplin hubungan internasional berkembang terpisah ialah menciptakan teori-teori yang otonom mengenai politik internasional. Ini mensyaratkan perlakuan terhadap politik internasional sebagai sesuatu yang berbeda dari poin-poin referensi teori sosial dan politik, apalagi perdebatan-perdebatan *obtuse* di dalam filsafat moral kontemporer.

3. Tiga Rs

Tiga Rs atau the Three Rs merujuk pada tiga kategori tradisi yang dibuat Wight mengenai teoritisasi internasional, yaitu realis (*realists*), rasionalis (*rationalists*) dan revolusionis (*revolutionists*) yang masing-masing padanannya adalah kaum *Machiavellians*, *Grotians*, dan *Kantians*. Kelompok pertama memandang politik internasional yang sifatnya anarkis, potensial terjadi perang terhadap satu sama lain. Kelompok kedua melihat politik internasional sebagai campuran antara konflik dan kerjasama, di mana masyarakat negara dan aturan-aturan perilaku eksis dan diperhitungkan. Sementara kelompok ketiga melihat politik internasional benar-benar mengenai soal kemanusiaan (*humanity*), *the civitas maxima*, karena itu masyarakat internasional negara-negara harusnya lebih penting.

Menurut Smith, ada tiga masalah utama sehubungan dengan tiga kategori ini. Pertama, adanya kemungkinan lain membagi teori politik internasional. Smith menyebut misalnya Michael Donelan yang membaginya ke dalam lima

tradisi yaitu hukum alam (*natural law*), realisme, fideisme (*fideism*), rasionalisme (*rationalism*), dan *historicism*, sedangkan Nardin dan Mapel bahkan menawarkan duabelas kategori berpikir mengenai etika internasional. Menurut Smith, soalnya bukan semata-mata semantik tetapi apa kategori dasar pembagian tersebut sehingga ketiganya benar-benar berbeda? Kedua, banyak ilmuwan yang tidak dapat dengan mudah dikategorikan ke dalam salah satu dari tiga kategori Wight. Dengan demikian terjadi semacam kekeliruan pembuatan unifikasi dan nuansa dari masing-masing kategori. Ketiga, berkaitan dengan pertanyaan apakah perdebatan antara ketiga tradisi itu dapat diatasi, atau pada level analisis akhir apakah ketiga kategori tersebut justru sangat bersifat relatif.

4. Tiga Gelombang “Perdebatan Besar” (*Great Debates*)

Suatu pembagian yang lebih luas mengenai perkembangan teori hubungan internasional dibandingkan dengan yang lainnya ialah yang dibuat atas dasar kronologi pandangan dalam perkembangan teori. Perspektif demikian cenderung membagi sejarah disiplin hubungan internasional ke dalam beberapa fase ketika suatu posisi teoritik dominan terhadap rival teori lain, sementara periode transisi antara dominasi kedua perspektif ditandai dengan “perdebatan besar” (*great debates*).

Berangkat dengan asumsi bahwa sebagai disiplin terpisah hubungan internasional dimulai awalnya oleh David Davies dari Woodrown Wilson Chair di Aberystwyth pada 1919, perkembangan teori hubungan internasional setidaknya telah melewati tiga fase perkembangan. Smith mengutip John Vasquez yang menulis “sejarah abad ke-20 penelaahan hubungan internasional secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap; fase idealis, tradisi realis, dan revolusi behavioralis”. Smith juga menunjuk Hedley Bull mengambil

Teori & Teori Hubungan Internasional

tiga fase perkembangan yang sama. Menurut Bull perspektif idealis atau doktrin progresif dominan antara 1920-an - 1930-an, realis atau teori-teori konservatif antara 1930-an - 1940-an, dan teori-teori “sosial ilmiah” (*social scientific*) antara akhir 1950-an - 1960-an yang awalnya bermula pada ketidakpuasan metodologis terhadap kedua perspektif terdahulu.

Jika ketiga perspektif tersebut di atas dominan pada masing-masing periode tersebut di atas, maka banyak perhatian yang difokuskan selama periode transisi sehingga timbulah apa yang dikenal dengan “perdebatan besar” (*great debates*). Perdebatan besar pertama (*first great debates*) adalah antara idealis dan realis pada akhir 1930-an dan awal 1940-an dan perdebatan besar kedua (*second great debates*) antara realis dan behavioralisme pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Belakangan banyak ilmuwan hubungan internasional yang juga membicarakan mengenai “perdebatan besar ketiga” (*third great debates*) tetapi terdapat sejumlah perbedaan mengenai siapa pihak utama di dalamnya. Maghoori dan Ramberg menyebut bahwa dalam perdebatan besar ketiga yang menjadi oposan adalah realis yang state-centric vs transnasionalis yang meliputi idealis dan behaviorealis. Lapid menunjuk perdebatannya antara positivisme (meliputi semua teori-teori terdahulu yang dominan) vs post-positivisme, teori yang menantang asumsi sentral positivisme.

5. Perdebatan Antar-Paradigma

Pertamakali diadopsi oleh Michael Banks tahun 1984 dan merujuk kepada situasi teori internasional pasca revolusi behavioralisme. Pandangan ini mendeskripsikan teori hubungan internasional yang semenjak awal 1980-an telah diterima sebagai suatu wisdom. Sentral argumennya, jikalau secara tradisional teori hubungan internasional didominasi oleh tiga paradigma utama (idealisme/realisme/behavioralisme), tetapi sejak 1980 tidak ada lagi yang dominan. Tetapi terdapat tiga alternatif pandangan

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

yang masing-masing menawarkan deskripsi yang relatif koheren dan logis, yaitu, realisme-neo-realisme, liberalisme-globalisme-pluralisme, serta neo-Marxisme-strukturalisme. Pembagian ini kadang-kadang memang problematik karena neo-realisme seringkali juga disebut struktural-realisme dan baik *word society* pun globalisme tidak terlalu mudah ditempatkan antara pluralisme dan neo-Marxisme.

Perdebatan antara ketiga paradigma ini terlihat ketika menjawab beberapa pertanyaan kunci seperti; siapakah/apa aktor-aktor utama di dalam hubungan internasional? Apa saja isu-isu utama di dalam hubungan internasional? Bagaimana proses-proses utama yang berlangsung di dalam masyarakat internasional dan bagaimana hasil akhirnya?

6. Negara-Sentris vs Transnasionalisme

Perdebatannya terfokus pada apakah negara merupakan fokus dalam teori-teori hubungan internasional atau tidak? Kalau negara-sentris setuju dengan pandangan demikian, maka sebaliknya transnasionalisme cenderung mengatakan tidak. Rujukan yang umumnya dipakai untuk perdebatan ini ialah karya Maghooori dan Ramberg yang membagi ketiga perdebatan utama menjadi tiga bagian; idealis vs realis, tradisional vs behavioralisme, sedangkan yang ketiga ialah negara sentris (realis pada perdebatan pertama dan tradisional pada perdebatan kedua) vs globalis/transnasionalisme (idealisme pada perdebatan pertama dan behavioralis pada perdebatan kedua).

7. Neo-realisme vs Neo-liberalisme

Berawal pada perdebatan negara sentris vs transnasionalisme tetapi lebih banyak mendekat ke perdebatan antara pluralis dan neo-realis pada awal 1980-an. Ada setidaknya enam poin perdebatan antara kedua kelompok ini; sifat dasar dan konsekuensi anarkisme hubungan internasional, kerjasama

Teori & Teori Hubungan Internasional

internasional, apa yang dapat diperoleh, isu-isu utama, kapabilitas dan intensi, institusi internasional.

Di dalam poin pertama, neo-realis melihat bahwa tindakan negara umumnya lebih didominasi oleh kebutuhan akan keamanan fisik, sementara neo-liberal menolak pandangan demikian, dan melihat adanya peran dari motivasi-motivasi lain. Untuk poin kedua, dibandingkan dengan neo-liberal, neo-realis menganggap bahwa kerjasama internasional sesungguhnya sangatlah sulit untuk dicapai. Untuk poin ketiga, neo-realis menekankan tentang capaian yang relatif bagi para pembuat keputusan di dalam berhubungan dengan kerjasama internasional, sementara neo-liberal menekankan akan pentingnya capaian yang absolut. Pada poin keempat, neo-realis cenderung berhubungan dengan isu-isu keamanan nasional, sementara neo-liberal sebaliknya cenderung melihat pada ekonomi-politik. Akibatnya, kedua kubu melihat prospek bagi kerjasama secara berbeda. Poin kelima, neo-realis konsentrasi pada kapabilitas ketimbang intensi, sementara neo-liberal sebaliknya lebih melihat pada intensi ketimbang persepsi. Poin keenam, neo-liberal yakin bahwa institusi internasional dapat mengurangi (menghilangkan) anarki internasional, sementara neo-realis pesimis dengan pandangan demikian.

Meski perdebatan antara kedua kubu cukup penting dan sempat mendominasi wacana teori hubungan internasional, terdapat anggapan bahwa perhatian yang kaku kepada kedua perdebatan ini, justru cenderung menyempitkan isu-isu yang dapat dicakup di dalam teori hubungan internasional. Di samping itu, perbedaan argumen pada keenam poin yang disebut di atas sesungguhnya tidaklah begitu kontras. Artinya, yang terjadi sesungguhnya adalah relativitas dari masing-masing perbedaan. Karena itu, ada juga yang menganggap bahwa keduanya sesungguhnya lebih merupakan bagian dari pandangan yang spesifik mengenai politik internasional, ketimbang dua alternatif yang secara

bersamaan memberi tempat di dalam mana debat mengenai teori hubungan internasional dapat berlangsung.

8. *Perdebatan Pasca-Positivis*

Masalah pokoknya menyangkut kritik terhadap dominasi realisme, yang muncul dari setidaknya empat kekuatan utama. Pertama, *critical theory*. Pengetahuan tentang dunia senantiasa harus dipahami dalam konteks kepentingan. Pandangan demikian berakar dan dikembangkan atas dasar pengaruh Frankfurt School, terutama pemikiran-pemikiran yang berasal dari Jurgen Habermas. Pengetahuan tidak bersifat netral sebagaimana dikemukakan kaum positivis, dan oleh karenanya kepentingan harus dipertimbangkan dalam menyelesaikan masalah.

Kedua, *historical sociology*. Meskipun cukup bervariasi, teoritis dalam kelompok ini menunjukkan bahwa negara, yang dalam banyak kasus dibentuk melalui proses perang, adalah produk interaksi antara kekuatan-kekuatan internal dan kondisi-kondisi eksternal. Karena itu pandangan ini mengecilkan arti realis, terutama neo-realis yang mengklaim kekuatan eksternal yang menentukan perilaku negara serta fungsi-fungsi negara yang setara.

Ketiga, para penulis feminis. Bidang perhatian para penulis feminis sesungguhnya sangat luas dan tidaklah mudah menemukan kesamaan tema dan asumsi di antaranya. Meskipun pandangan para penulis feminis sangat bervariasi, mereka mempunyai satu perhatian utama yaitu konstruksi gender. Mereka umumnya menentang asumsi non-gender yang senantiasa dikemukakan di dalam teori-teori dominan hubungan internasional serta mencoba membuktikan bagaimana asumsi-asumsi mengenai peran gender juga berlaku.

Keempat, kelompok penulis yang hirau terhadap pengembangan post-modern. Smith menyebut nama-nama

Teori & Teori Hubungan Internasional

seperti Foucault, Derrida, Nietzsche, Heidegger dan Virilio. Adapun aspek yang diserang kelompok ini ialah hal mendasar tentang realitas, atau kebenaran, serta struktur atau identitas yang merupakan hal mendasar (fokus) dalam teori hubungan internasional.

Menurut Smith kesamaan dari keempat kelompok pandangan ini ialah komitmennya terhadap teori hubungan internasional yang berbeda dari asumsi positivis dan realis. Keempatnya dapat dianggap sebagai post-positivis meskipun keempatnya berbeda terhadap fokus perhatian masing-masing. Kategori ini juga menyisakan persoalan, sebab mereka tidak disatukan oleh apa yang disepakati, tetapi justru oleh apa yang ditentang (oppose). Masalahnya, masing-masing pendekatan tentu mempunyai persalan masing-masing yang unik.

9. Konstitutif vs Teori Penjelasan (*Constitutive vs Explanatory Theory*)

Perdebatan ini merupakan isu meta-teori utama yang dihadapi teori hubungan internasional kontemporer, yaitu antara teori-teori yang berupaya mencari dan menawarkan penjelasan mengenai hubungan internasional dan kelompok yang memandang teori sebagai bentuk dari realitas itu sendiri. Pada level dasar, hal ini memperlihatkan perbedaan tentang bagaimana wujud dunia sosial itu sesungguhnya; apakah itu harus dilihat sebagaimana ilmuwan berpikir mengenai sifat dunia yang alami, atau apakah dunia sosial itu adalah sesuatu yang sesungguhnya kita ciptakan. Oleh karena itu, berbagai bentuk teori yang radikal dibutuhkan untuk menjelaskan masing-masing kasus, dan teori-teori ini tidak dapat dikombinasikan untuk membentuk suatu teori mengenai dunia sosial. Efek perdebatan ini adalah terbukanya kemungkinan peningkatan kecanggihan berpikir mengenai realitas.

10. Foundationalist dan Anti-Foundationalist International Theory

Kedua kelompok di dalam bagian ini adalah contoh konkrit dari perdebatan yang terjadi dalam *constitutive theory*, terutama yang berkaitan dengan masalah perbedaan epistemologi. Smith merujuk Hoffman dan Rengger yang telah mengajukan proposal tentang adanya dua tipe yang sangat berbeda di dalam teori hubungan internasional post-positivis. Berawal dari perbedaan pandangan keduanya tentang sifat alamiah teori hubungan internasional kritis (*critical international theory*), berakhir dalam paper bersama mereka tentang perbedaan yang berguna antara dua bentuk teori; teori interpretatif kritis (*critical interpretative theory*) dan interpretatif radikal (*radical interpretativism*). Yang pertama adalah kajian pada teori kritis (*critical theory*) yang oleh keduanya dipandang '*minimal foundationalism*', yang berarti mempunyai dasar pembuatan penilaian antara klaim-klaim kebenaran masing-masing rival. Dasar pembuatan penilaian ini berasal dari konsep kompetensi komunikasinya (*communicative competence*) Habermas dan pandangannya mengenai situasi pembicaraan yang ideal (*ideal speech situation*). Hal ini memberikan dasar demi terbukanya kemungkinan untuk mengevaluasi '*knowledge-constitutive interests*' yang terlibat di dalam teori-teori yang berbeda.

Teoritis interpretatif kritis (*critical interpretative*) berpendapat bahwa kriteria utama untuk menilai klaim-klaim kebenaran ialah apakah teori-teori itu emansipatori sehingga berbeda dari sekedar teori-teori yang bersifat *problem-solving*. Kalau yang pertama berupaya memperbaiki kondisi manusia, yang kedua hanya melihat dunia apa adanya dan tidak berupaya mengubahnya. Teori-teori yang memecahkan masalah (*problem-solving theories*) dianggap sebagai positivis sementara teori-teori interpretatif kritis (*critical interpretative theories*) dianggap emansipatori.

Radikal interpretatif (*radical interpretativism*) juga menolak positivisme sebagaimana interpretatif kritis (*critical*

Teori & Teori Hubungan Internasional

interpretative) tetapi tidak sependapat mengenai *minimal foundationalism*. Selanjutnya radikal interpretatif (*radical interpretative*) memfokuskan perhatiannya pada hubungan *power-knowledge* yang bahkan mempertanyakan klaim-klaim emansipatori teori-teori interpretatif kritis (*critical interpretativism theory*).

Penutup

Untuk mengakiri bab ini, perlu dicatat bahwa walaupun senyatanya terdapat begitu banyak teori dalam disiplin hubungan internasional, 'One World Many Theories' (Walt, 1998: 29-46), teori-teori ini mempunyai kesamaan dalam tiga hal berikut (Smith, 2007: 7-12). Pertama, sama-sama mempunyai komitmen tentang pentingnya teori di dalam menjelaskan interaksi hubungan internasional. Kedua, teori-teori hubungan internasional mempunyai sejarah tersendiri di dalam proses pengembangannya dan kerap berangkat dari tradisi intelektual yang berbeda. Ketiga, semua teori mengklaim adanya hubungan antara teori sebagai suatu abstraksi hubungan antara fenomena serta kenyataan sebagai suatu praktek interaksi hubungan riil.

Daftar Pustaka

- Aron, Raymond, (1968), "What Is A Theory of International Relations?", dalam, John C. Farrel & Asa P. Smith, *Theory and Reality in International Relations* (eds.), Columbia University Press, 1-22.
- Bull, Hedley, (1995), "The Theory of International Politics, 1919-1969", dalam, James Der Derian, *International Theory, Critical Investigation*, (ed.), New York University Press, 181-182.
- Carr, Edward Hallet, (1961), *What is History?*, Harmondsworth.
- Collins, W. M. & Brash, Graham, (1982), *The New Collins International Dictionary of the English Language*, William Collins.
- Coulombis, T. A. & Wolfe, J. H., (1985), *Introduction to Intenational Relations*, Prentice-Hall.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1991), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Balai Pustaka.
- Deutsch, Karl W., (1988), *The Analysis of International Relations*, 3rd edition, Prentice Hall.
- Dougherty, James E. & Pfaltzgraff, Robert L. Jr., (1997), *Contending Theories of International Relations, A Comprehensive Survey*, 4th ed., Longman.
- Hill, Christopher & Beshoff, Pamela, (1994), *Two Worlds of International Relations, Academics, Practitioners and the Trade in Ideas* (eds.), Routledge.
- Hoffman, Stanley, (1969), "Theory and International Relations", dalam, James N. Rosenau, *International Politics and Foreign Policy, a Reader in Research and Theory* (ed.), revised edition, Free Press, 30-40.

Teori & Teori Hubungan Internasional

Knutsen, Torbjorn L., (1997), *A History of International Theory*, 2nd edition, Manchester University Press.

Mas'ood, Mohtar, (1990), *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES.

McCain, Garvin & Segal, Erwin, (1973), *The Game of Science*, Brooks/Cole.

Morgan, Patrick M., (1987), *Theories and Approaches to International Politics, What are We to Think?*, 4th edition, Transaction.

Morgenthau, Hans, (1995), "The Intellectual and Political Functions of Theory", dalam, James Der Derian, *International Theory, Critical Investigations* (ed.), New York University Press, 36-52.

Rosenau, James N., (1969), *International Politics and Foreign Policy, a Reader in Research and Theory* (ed.), revised edition, Free Press.

Singer, J. David, (1961), "The Level-of-Analysis Problem in International Relations", *World Politics*, 14 (1), 77-92.

Smith, Steve, (1995), "The Self-Images of a Discipline: A Genealogy of Intrnational Relations Theory", dalam, Ken Booth & Steve Smith, *International Relations Theory Today* (eds.), The Pennsylvania State University Press, 1-37.

_____, (2007), "Introduction: Diversity and Disciplinarity in International Relations Theory", dalam, Tim Dunne et al, *International Relations Theories* (eds.), Oxford University Press, 1-12.

Spanier, John W., (1981), *Games Nations Play, Analyszing International Politics*, 4th edition, CBS College Publishing.

Vincent, John, (1994), "The Place of Theory in the Practice

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

of Human Rights”, dalam, Christopher Hill & Pamela Beshoff, *Two Worlds of International Relations, Academics, Practitioners and the Trade in Ideas* (eds.), Routledge, 29-39.

Walt, Stephen M., (1998), “International Relations: One World, Many Theories”, *Foreign Policy*, Spring, 29-46.

Waltz, Kenneth N., (1975), “Theory of International Relations”, dalam, Fred I. Greenstein & Nelson W. Polsby, *International Politics* (eds.), Addison-Wesley, 1-85.

Woods, Ngaire, (1996), “The Uses of Theory in the Study of International Relations”, dalam, Ngaire Woods, *Explaining International Relations Since 1945* (ed.), Oxford University Press, 9-31.

Zalewski, Marysia, (1996), “All These Theories, Yet the Bodies Keep Piling Up’: Theory, Theorists, Theorising”, dalam, Steve Smith, Ken Booth & Marysia Zalewski, *International Theory: Positivism & Beyond* (eds.), Cambridge University Press, 340-353.

<<<<>>>>

Bab 2

Realisme

I Basis Susilo

Pengantar

Dalam perkembangan studi hubungan internasional, realisme merupakan perspektif yang dominan sejak 1940-an, menggeser perspektif idealisme yang dominan sejak 1919 sampai 1930-an dalam mewarnai studi dan penstudi hubungan internasional. Perspektif realisme tidak hanya membentuk teori-teori tentang politik internasional tetapi juga menawarkan preskripsi politik internasional pada era antarperang itu.

Perspektif idealisme saat itu kehilangan sebagian besar pengaruhnya dan disaingi oleh perspektif realisme, karena perspektif idealisme itu tidak mampu menawarkan preskripsi yang bisa membuat stabil dan damai politik internasional pasca Perang Dunia I. Perspektif idealisme juga tidak mampu mencegah terjadinya Perang Dunia II. Sebagai pesaingnya, realisme muncul dan menjadi dominan dalam mempengaruhi studi hubungan internasional.

Empat dari beberapa sarjana hubungan internasional yang menjadikan perspektif realisme dominan dalam studi hubungan internasional adalah Harold J. Mackinder, E.H. Carr, Nicholas Spykman dan Hans J. Morgenthau. Namun, jauh sebelum disiplin ilmu hubungan internasional secara resmi berkembang sejak 1919 telah ada beberapa tokoh yang dikenal mendasari

perspektif realisme, tetapi belum terfokus pada disiplin ilmu hubungan internasional.

Dalam bab ini dibahas perspektif realisme itu, dengan membahas para tokoh yang mengenalkannya, asumsi-asumsi dan postulat-postulatnya, serta perskripsinya tentang politik internasional, dinamika perkembangannya, dan relevansinya dalam studi hubungan internasional. Tetapi sebelumnya, dibahas pemikiran-pemikiran beberapa tokoh yang mendahului dengan konsep-konsep realisme.

Para Realis Pendahulu

Dalam membahas beberapa tokoh realis pendahulu ini, penting untuk mengetahui dua hal. Pertama, bahwa tidak ada satu pun dari para penulis awal itu mengklaim diri mereka sendiri sebagai realis. Kedua, bahwa pembahasan mereka ini belum menjadikan hubungan internasional sebagai fokus utama mereka, kendati mereka sudah menyinggung dan membahas hubungan internasional, seperti Thucydides. Oleh karenanya, kendati perspektif realisme disumbang oleh para pemikir realis sebelumnya, tetapi pembentukannya sebagai sebuah perspektif teoretik untuk studi hubungan internasional baru terjadi setelah 1919, ketika ilmu hubungan internasional secara resmi dimulai, dan dominan sejak 1940-an.

Ada banyak pemikir yang bisa disebut realis, seperti Heraclitus (535-475 SM), Thucydides (460-395 SM), Niccolo Machiavelli (1469-1527), dan Thomas Hobbes (1588-1679). Selain itu, ada beberapa politisi yang menunjukkan sikap realisnya, seperti Cardinal de Richelieu, Otto von Bismarck, dan Abraham Lincoln. Richelieu selama Perang 30 Tahun menjelang Perjanjian Westphalia (1648) sudah membahas konsep-konsep kepentingan nasional, keamanan politik-riil, dan *raison d'état*. Bismarck, negarawan Prusia, menciptakan dan menggunakan konsep perimbangan kekuatan (*balance*

Realisme

of power). Lincoln, presiden AS, menunjukkan sikapnya yang amat realistik ketika menyatakan (Morgenthau, 1999: 47):

I do the very best I know how, the very best I can, and I mean doing so until the end. If the end brings me out all right, what is said against me won't amount to anything. If the end brings me out wrong, ten angels swearing I was right would make no difference.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sebagai suatu tradisi berpikir, realisme mempunyai sejarah panjang yang dapat ditelusuri pada sejumlah besar pemikir terdahulu. Tetapi dengan mempertimbangkan tempat yang tersedia, di dalam subbab ini, dibahas secara sangat ringkas tokoh dan pemikiran Heraclitus, Thucydides, Machiavelli, dan Hobbes.

Heraclitus adalah filsuf Yunan pada abad ke-6 SM yang menegaskan bahwa “[O]pposites are necessary for life, but they are unified in a system of balanced exchanges,” dan bahwa “[T]he underlying law of nature also manifests itself as a moral law for human beings.” (*Internet Encyclopedia of Philosophy*).

Heraclitus mengatakan bahwa semua manusia adalah hasil dari sebuah konflik. Sebagaimana ditulis oleh Mohammad Hatta pada 1926, Heraclitus mendasarkan pemikirannya pada empat asumsi sebagai berikut: (1) bahwa perjuangan adalah bapak segala sesuatu, (2) bahwa semua sumber mata pencaharian (*subsistence*) yang ada adalah produk dari lawan yang saling tarik-menarik atau tolak-menolak dasarnya yang satu ingin menyatukan (mengambil dalam satu tangan) dan yang lain ingin membagi, (3) bahwa tata dunia bergerak dinamis karena konflik, dan (4) bahwa “perjuangan” dalam konflik itu menjadi alasan terbentuknya negara-negara, alasan ambuknya imperium yang mencakup seluruh dunia menjadi sejumlah kecil negara-negara merdeka dan alasan penaklukan satu negara oleh negara yang lain (Pane, 2015: 2).

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

Thucydides adalah sejarawan yang memberi dasar bagi perspektif realisme karena ia dianggap memulai tradisi utama dari pemikiran realisme tentang politik internasional. Dalam bukunya *The History of Peloponnesian War* Thucydides membahas perang di abad ke-5 SM antara Sparta dan Athena dan berargumen bahwa sebab perang adalah peningkatan kekuatan negara dan ketidakamanan negara lain disebabkan oleh peningkatan negara pertama tadi. Thucydides menyimpulkan hal itu setelah menceritakan perang Atena dan Sparta (sekitar 420 SM) yang disebabkan peningkatan kekuatan Atena dan perasaan ketidakamanan dari Sparta akibat peningkatan kekuatan Atena itu. Thucydides menyimpulkan bahwa bukan agresivitas tetapi ketidakamanan yang menjadi sebab adanya perang. Dasar pemikiran realismenya juga menonjol ketika ia menekankan bahwa dalam menjelaskan politik, *might* lebih penting daripada *right* (Thucydides dalam Williams *et al.*, 1999: 216).

Debat dramatis “The Melian Dialogue” dalam buku *The History of Peloponnesian War* menjadi rujukan dalam teori hubungan internasional. Sebagai seorang teoretisi, Thucydides memberikan empat asumsi. Pertama, sifat manusia pada dasarnya egois dan mementingkan diri sendiri sejauh kepentingan pribadi mengatasi prinsip-prinsip moral. Dalam hubungan antarnegara ia menyatakan bahwa “identity of interest is the surest of bonds whether between states or individuals.” Kedua, kondisi hubungan antarmanusia selalu dalam kondisi anarkis. Ketiga, untuk mencapai keamanan, negara berusaha meningkatkan kekuatan mereka dan terlibat dalam perimbangan kekuatan untuk tujuan menghalangi agresor potensial, sehingga perang dilancarkan untuk mencegah negara peserta supaya tidak lebih kuat secara militer. Keempat, tidak ada tempat bagi moralitas dalam politik, atau bila ada ketegangan antara tuntutan moralitas dan tuntutan aksi politik yang amoral maka negara boleh bertindak dengan moralitasnya sendiri yang berbeda dari moralitas yang dianut secara umum.

Realisme

Machiavelli dikenal luas sebagai pemikir yang pertama menekankan penggunaan kekerasan oleh negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkannya. Perhatian utamanya adalah mengumpulkan, mempertahankan dan penggunaan *power*. Saran-saran yang diberikan secara eksplisit kepada para penguasa adalah tentang bagaimana menggunakan *power* sebaik-baiknya. Antara lain, yang penting, adalah penguasaan ketrampilan dalam berperang. Pandangannya yang realis tampak amat jelas dari tulisan Machiavelli yang dikutip Carr (1964: 63-64) sebagai berikut:

It being my intention to write a thing which shall be useful to him who apprehends it, it appears to me more appropriate to follow up the real truth of a matter than the imagination of it; for many have pictured republics and principalities which in fact have never been seen and unknown, because how one lives is so far distant from how one ought to live that he who neglects what is done for what ought to be done sooner effects his ruin than his preservation.

Untuk perspektif realisme, Machiavelli menyumbang tiga hal. Pertama, sejarah adalah rentetan sebab dan akibat yang dapat dianalisis dan dipahami dengan usaha intelektual, tetapi bukan yang diarahkan oleh “imaginasi”. Kedua, teori tidaklah menciptakan praktik, tetapi mempraktikkan teori. Ketiga, politik bukanlah fungsi etik, tetapi etik politik, sebagaimana orang “tetap *honest* karena keterpaksaan”; moralitas memang penting, tetapi tidak mungkin ada moralitas efektif di mana tidak ada otoritas efektif atau moralitas adalah produk *power*.

Hobbes yang menulis buku *Leviathan* pada 1651 menyatakan bahwa secara kodrati manusia itu sama satu dengan lainnya yang masing-masing mempunyai hasrat atau nafsu akan kekuasaan, akan kekayaan, akan pengetahuan, dan akan kehormatan (*appetite*) dan keengganannya untuk hidup

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

sengsara dan mati (*aversions*), yang menggerakkan tindakan mereka. Hobbes menegaskan bahwa *appetite* dan *aversions* manusia itu tidaklah terbatas, dan untuk memenuhinya manusia menggunakan *power*-nya masing-masing, sehingga terjadi benturan *power* antarsesama manusia.

Mengenai semua hal di atas, Hobbes (1983: 161) menulis sebagai berikut:

So that in the first place, I put for a generall inclination of all mankind, a perpetuall and restlesse desire of Power after power, that ceaseth in Death. And the cause of this, is not intensive delight, than he has already attained to; or that he cannot with a moderate power: but because he cannot assure the power and means to live well, which he hath present, without the acquisition of more.

Karena kondisi alamiah tidak aman, maka dengan akalnyanya manusia berusaha menghindari kondisi perang-satu-dengan-lainnya itu dengan menciptakan kondisi artifisial (buatan). Dengan penciptaan ini manusia tidak lagi dalam kondisi alamiah, tetapi sudah memasuki kondisi sipil. Caranya, masing-masing anggota masyarakat mengadakan kesepakatan di antara mereka untuk melepaskan hak-hak mereka dan menstransfer hak-hak itu kepada beberapa orang atau lembaga yang akan menjaga kesepakatan itu agar terlaksana dengan sempurna. Untuk itu orang atau lembaga itu harus diberi hak sepenuhnya untuk menggunakan semua kekuatan dari masyarakat.

Beberapa orang atau lembaga itulah yang memegang kedaulatan penuh. Tugasnya adalah menciptakan dan menjaga keselamatan rakyat (Hobbes, 1983: 376). Masyarakat sebagai pihak yang menyerahkan hak-hak mereka, tidak mempunyai hak lagi untuk menarik kembali atau menuntut atau mempertanyakan kedaulatan penguasa,

Realisme

karena pada prinsipnya penyerahan total kewenangan itu adalah pilihan paling masuk akal dari upaya mereka untuk lepas dari kondisi perang-satu-dengan-lainnya yang mengancam hidup mereka. Di lain pihak, pemegang kedaulatan mempunyai seluruh hak untuk memerintah dan menjaga keselamatan yang diperintah itu. Pemegang kedaulatan tidak bisa digugat, karena pemegang kedaulatan itu tidak terikat kontrak dengan masyarakat. Jelasnya, yang mengadakan kontrak adalah masyarakat sendiri, sehingga istilahnya adalah kontrak sosial, bukan kontrak antara pemerintah dengan yang diperintah.

Hobbes mendasarkan penjelasan-penjelasanannya pada asumsi bahwa kodrat hubungan antarmanusia itu bersifat konfliktual dan (oleh karenanya) anarkis. Untuk perspektif realisme, Hobbes menyumbang dua hal. Pertama, hubungan internasional amat beda dari hubungan antarpribadi di dalam masyarakat yang dikontrol negara. Hubungan internasional tidak dikontrol oleh negara yang memelihara tata-tertib. Kedua, kondisi hubungan internasional itu kondisi perang semua melawan semua (*bellum omnium contra omnes*), suatu arena di mana masing-masing negara saling beradu, sehingga sifatnya *zero-sum*, dalam arti perolehan satu negara adalah kehilangan dari negara-negara lain.

Dari kajian singkat atas masing-masing kontribusi pemikiran dari para realis pendahulu, setidaknya ada tiga hal yang dapat dikatakan sebagai persamaan dari para realis pendahulu ini (Jackson & Sorensen, 1999: 76). Pertama, umumnya mereka sama dalam berpandangan bahwa ketidakamanan dan konflik adalah situasi yang sifatnya permanen dalam kehidupan manusia yang senantiasa perlu mendapat perhatian untuk diatasi. Kedua, kunci untuk mengatasi situasi ketidakamanan tersebut dapat dicari pada pengetahuan politik dan kebijaksanaan (*wisdom*). Ketiga, tidak ada solusi akhir yang bersifat permanen di dalam menghadapi situasi ketidakamanan dan konfliktual.

Asumsi, Postulat dan Preskripsi

Dari pembahasan tentang tokoh dan pemikiran Heraclitus, Thucydides, Machiavelli dan Hobbes di atas, tampak jelas benang merah asumsi-asumsi dasar dan postulat-postulat yang mengarah ke perspektif realisme pada masa berakhirnya Perang Dunia II, sebagaimana dirangkum di subbab Pengantar dari bab ini.

Dari buku-buku sejarah studi hubungan internasional, nama E.H. Carr dan Hans J. Morgenthau paling sering disebut sebagai tokoh utama dari perspektif realisme. Ketika menulis *heading* “Realisme” dalam buku mereka, *International Relations: The Key Concepts*, Martin Griffiths dan Terry O’Callaghan (2002: 361) menyebut Carr dan Morgenthau sebagai “crucial figures in that development” perspektif realisme. Demikian juga Phil Williams *et al.* dalam buku *Classic Readings of International Relations* lebih menonjolkan Carr dan Morgenthau.

Padahal masih ada nama-nama lain yang pantas disebut sebagai tokoh penting perspektif realisme, seperti Harold J. Mackinder dan Nicholas Spykman, karena mengungkapkan sikap dan pemikiran yang amat realistis dalam kurun waktu sejak 1919. Oleh karenanya, dalam subbab ini dibahas empat tokoh, yaitu: Mackinder, Carr, Spykman dan Morgenthau.

Mackinder, dalam *Democratic Ideals and Reality* yang terbit pertama pada 1919 dan dicetak ulang pertamanya pada 1942, menganalisis perjuangan Mesir kuno, Yunani, Macedonia, Romawi, Eropa dan Inggris. Pendapatnya yang penting. Menurut Mackinder (1962: 2): “History consisted ultimately of the struggles for power among states and empires ... and the key to those struggles could be found in the geography.”

Carr yang pada 1939 menulis buku *The Twenty Years’ Crisis* menjelaskan kenapa idealisme telah gagal dalam melakukan fungsinya, dan bagaimana realisme

Realisme

menggantikannya. Carr berargumen bahwa pemahaman-pemahaman tentang keselarasan kepentingan --hal paling mendasari perspektif idealisme-- mudah disalahgunakan oleh dan demi kepentingan-kepentingan (*vested interests*) dari kekuatan-kekuatan besar yang menginginkan *status quo*. Carr juga menyerukan agar kembali ke realisme yang dianggapnya sebagai resep mengatasi utopianisme yang mengawali studi hubungan internasional (Carr, 1939: 13).

Spykman, dalam *America's Strategy in World Politics* (1942), menyarankan kepada Amerika dua hal. Pertama, Amerika harus mengadopsi kebijakan *Realpolitik* dengan mengakui bahwa *power* adalah "the real governing force in international relations." Kedua, Amerika harus mengakui perimbangan kekuatan Eroasia secara langsung berdampak pada keamanan Amerika. Spykman menulis bahwa perjuangan untuk kekuasaan (*the struggle for power*) diidentifikasi dengan perjuangan untuk *survival*, dan perbaikan posisi kekuatan relatifnya menjadi tujuan primer dari kebijakan internal dan eksternal negara. Bahkan tulis Spykman (1942: 18): "All else is secondary, because in the last instance only power can achieve the objectives of foreign policy." Karena amat sadar bahwa banyak pembuat kebijakan Amerika sering memasukkan moralisme dalam kebijakan luar negerinya, maka Spykman (1942: 18) menegaskan:

The statesman who conducts foreign policy can concern himself with values of justice, fairness, and tolerance only the extent that they contribute to or do not interfere with the power objective. They can be used instrumentally as moral justification for the power quest, but they must be discarded the moment their application brings weakness. The search for power is not made for the achievement of moral values; moral values are used to facilitate the attainment of power.

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

Sikap Spykman yang tampak amat realis juga bisa dilihat dari pernyataannya bahwa keinginan keamanan masing-masing negara tidak terhindarkan mendorong ke konflik. Spykman (1942: 24) menulis:

the margin of security for one is the margin of danger for the other, and alliance must, therefore, be met by counter-alliance and armament by counter-armament in an eternal competitive struggle for power. Thus it has been in all periods of history.

Morgenthau dengan bukunya, *Politics Among Nations* yang terbit pertama pada 1948, mulai mempengaruhi generasi pemelajar dan analisis hubungan internasional dengan perspektif realisme. Pemikiran Morgenthau tampak terpengaruh oleh asumsi dan postulat dari para tokoh pemikir realis pendahulunya. Ide-idenya tentang bagaimana menjalankan kebijakan luar negeri telah mempengaruhi para pembuat keputusan.

Morgenthau mendasarkan pemikirannya pada sikapnya terhadap beberapa hal: bahwa kodrat manusia sebagai secara esensial tidak berubah dan haus akan kekuatan (*power*), bahwa politik internasional, seperti halnya semua politik, adalah perjuangan kekuasaan dan bahwa negara-negara mendefinisikan kepentingan nasional mereka dalam batasan-batasan *power*, bahwa penting dan sentralnya *balance of power*, dan bahwa politik adalah wilayah aksi yang *distinct* dan otonom. Morgenthau (1948) menuliskan enam prinsip dari perspektif realisme.

Pertama, bahwa seperti aspek-aspek kehidupan lain, politik diatur oleh hukum-hukum objektif yang berasal dari kodrat manusia. Untuk memperbaiki masyarakat pertamanya perlu memahami hukum-hukum kodrat itu. Hukum-hukum objektif itu perlu diikuti, karena menentanginya hanya akan menemui risiko gagal. Objektivitas memungkinkan

Realisme

pengembangan teori yang rasional. Perbedaan perlu dilakukan antara kebenaran (apa yang benar secara objektif dan rasional yang didukung oleh bukti dan diterangi oleh akal) dan opini (apa yang hanya penilaian subjektif yang didasari rasa curiga dan *wishful thinking*).

Kedua, politik internasional harus dikaitkan dengan konsep kepentingan (*interests*) yang didefinisikan dalam batasan *power*. Konsep ini menyediakan kaitan antara akal yang berusaha memahami politik internasional dan fakta-fakta untuk dipahami. Politik adalah ruang otonom yang dipahami secara berbeda dari ruang-ruang lainnya, seperti ekonomi, etika, estetika, dan agama. Tanpa melihat politik sebagai ruang otonom, maka teori politik tidak mungkin dibangun, karena tidak bisa dibedakan antara fakta-fakta politik dan non politik, dan juga tidak bisa diukur tatanan sistematis pada bidang politik.

Ketiga, *interest* yang didefinisikan sebagai *power* adalah kategori objektif yang valid secara universal, tetapi tidak memiliki makna yang tetap. Ide tentang *interest* memang esensi dari politik dan tidak terpengaruh oleh ruang-ruang lingkup waktu dan tempat.

Keempat, moral memang bisa mempengaruhi tindakan politik, tetapi *prudence* menjadi *virtue* tertinggi dalam politik. Untuk itu, mesti dibedakan antara tuntutan moral dan syarat-syarat tindakan politik yang berhasil. Prinsip-prinsip moral universal tidak bisa diterapkan ke tindakan-tindakan negara dalam formulasi universal yang abstrak mereka, tetapi bahwa mereka harus disaring melalui dalam waktu dan tempat yang konkrit. Etika yang abstrak menilai tindakan menurut kesesuaiannya dengan hukum moral, etika politik menilai tindakan dari akibat-akibat politiknya.

Kelima, menolak untuk mengidentifikasi aspirasi moral dari negara tertentu dengan hukum moral universal.

Ada perbedaan antara kebenaran dan pendapat, ada perbedaan antara kebenaran dan *idolatry*. Semua negara berniat –dan beberapa telah berhasil menahan niat itu sekian lama—untuk menutupi aspirasi-aspirasi dan tindakan-tindakan khusus mereka dalam tujuan-tujuan moral yang universal. Mengetahui negara-negara itu sebagai subjek bagi hukum moral adalah satu hal, sementara berpura-pura mengetahui dengan penuh keyakinan tentang apa yang baik dan jahat dalam hubungan antarnegara adalah hal yang lain.

Keenam, perbedaan antara realisme politik dan mazhab-mazhab pemikiran yang lain adalah riil dan jelas. Secara intelektual, realis politik mempertahankan otonomi ruang politik, sebagaimana ekonom, ahli hukum, moralis mempertahankan otonomi ruang-ruang mereka masing-masing. Yang terpenting adalah ahli politik berpikir dalam batasan-kepentingan yang didefinisikan sebagai *power*, sebagaimana ekonom berpikir dalam batasan kepentingan yang didefinisikan sebagai kekayaan; ahli hukum berpikir dalam batasan kepentingan yang didefinisikan sebagai konformitas tindakan dengan prinsip-prinsip moral. Ekonom bertanya: “Bagaimana kebijakan ini mempengaruhi kekayaan dari masyarakat, atau salah satu segmen dari masyarakat?” Ahli hukum bertanya: “Apakah kebijakan ini berada dalam kesesuaian dengan aturan-aturan hukum?” Moralis bertanya: “Apakah kebijakan ini sesuai dengan prinsip-prinsip moral?” Dan realis politik bertanya: “Bagaimana kebijakan ini mempengaruhi *power* dari negara-bangsa?” (atau dari pemerintah federal, Kongres, partai, pertanian, dll.). Para realis politik bukannya tidak menyadari eksistensi dan relevansi dari standar-standar pemikiran lain, tetapi mereka harus mensubordinasikan standar-standar lain itu ke standar politik.

Secara ringkas tabel berikut menampilkan sejumlah asumsi filosofis dasar perspektif realisme.

Tabel 2.1
Asumsi-Asumsi Dasar Realisme

Isu	Pandangan	Terminologi
Sifat dasar manusia	Egois, individualistik	<i>The selfish-individualistic assumption</i>
Aktor penting	Negara	<i>The state-centric assumption</i>
Tindakan negara	Ibarat manusia mementingkan diri sendiri	<i>The state self-interested manner assumption</i>
Pertimbangan tindakan negara	Rasional demi kepentingan nasional	<i>The unitary rational-actor assumption</i>
Karakteristik sistem internasional	Anarkis – negara berinteraksi dalam konteks anarki	<i>The anarchy assumption</i>

Hubungan Internasional dalam Perspektif Realisme

Perspektif realisme berkembang dengan dinamikanya sendiri. Postulat dan perskripsi dari Morgenthau mendapatkan kritik dari dalam oleh para tokoh yang juga realis maupun neorealis. A.F.K. Organski, misalnya, mengkritik tajam pemikiran Morgenthau. Dalam bukunya *World Politics*, Organski (1958) menulis:

The sad truth is that the balance of power is neither a logical abstraction nor an accurate description of empirical fact ... Is a balance an equal distribution of power or an unequal distribution of power?

Organski menolak tiga asumsi *balance of power* yang dipakai Morgenthau, (1) bahwa ekuilibrium adalah

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

kondisi alamiah dari sistem internasional, (2) bahwa paritas *power* mempromosikan perdamaian sementara *preponderance of power* menyebabkan perang, dan (3) bahwa konsentrasi *power* menyebabkan koalisi untuk mengimbangi dan perang-perang melawan hegemoni untuk menciptakan kondisi ekuilibrium. Organski mengkritik konsep *balance of power* itu sebagai amat sangat statis, secara sempit lebih berfokus pada militer dan pada peran aliansi dalam mengagregasikan *power* melawan ancaman dari luar, kurang hirau pada sumber-sumber internal dari kekuatan nasional, dan tidak sensitif terhadap pentingnya pertumbuhan yang berbeda-beda antarnegara.

Organski lalu mengajukan asumsi bahwa sistem internasional itu hirarkis, di mana paling atas adalah *dominant power*, lalu di bawahnya ada *great powers*, *middle-powers*, dan *small-powers*. Perdamaian dan kestabilan internasional terjadi kalau *dominant power* mampu mempertahankan dominasinya dan mengatur hukum dan tata tertib internasional.

Pemikiran Organski ini tentang pentingnya tatanan internasional tidaklah sendirian. Beberapa sarjana hubungan internasional juga mementingkan tatanan internasional, seperti Jack Kugler dan G. John Ikenberry.

Perspektif realisme juga mendapatkan suntikan pencerahan dari perspektif neorealis, sehingga lebih memungkinkan mampu menjelaskan dan membuat perskripsi yang lebih meyakinkan untuk menghadapi persoalan-persoalan internasional yang lebih kompleks.

Perspektif neorealisme mendasarkan pada asumsi yang sama dengan realisme, tetapi berbeda pada beberapa postulat dan perskripsinya. Misalnya, bila perspektif realisme meyakini bahwa tindakan negara ditentukan oleh kepentingan nasionalnya dan aksinya dalam medan internasional, maka --sebagaimana dikembangkan oleh Kenneth Waltz (1992)-- perspektif neorealisme meyakini

Realisme

bahwa ada efek struktur internasional yang mempengaruhi tindakan negara di dalamnya. Pembahasan lebih rinci tentang perspektif neorealisme bisa dibaca di bab lain dalam buku ini.

Dari pembahasan tentang pemikiran para pendahulu dan para tokoh utama perspektif realisme, maka bisa dilihat benang merah perspektif realisme ini dalam melihat hubungan internasional. Pada dasarnya, hubungan internasional dilihat secara khas dalam perspektif realisme sebagai berikut.

Hubungan internasional adalah tempat negara-negara saling berinteraksi; negara adalah aktor utama dalam dunia internasional itu. Perilaku negara dalam interaksi hubungan internasional digerakkan secara rasional oleh kepentingan nasional, terutama kepentingan *survival* dan keamanan nasional. Di dalam mengejar kepentingan itu (*survival* dan keamanan nasional) negara menggunakan dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan (*power*); *power* adalah tujuan utama dan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri. Dalam kaitannya dengan hubungan antarnegara, kapabilitas *power* sangatlah menentukan; negara bertindak dalam pertimbangan *power*, tindakan semacam itu “bersifat politik”.

Selanjutnya, keinginan untuk mendapatkan *power* maksimum adalah keinginan universal. Dalam kaitannya dengan persaingan antarnegara, kelangkaan sumberdaya dan kurangnya wasit yang netral menyebabkan persaingan *power* antarnegara itu terjadi. Kemudian sistem internasional bersifat anarkis dan karenanya perdamaian dan kestabilan internasional bisa dibangun kalau ada perimbangan kekuatan (*balance of power*).

Secara garis besar fitur hubungan internasional dalam perspektif realisme dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2

Fitur Hubungan Internasional Ala-realisme

Variabel	Realisme
Aktor/unit analisis	Negara
Pandangan tentang aktor	Unitary
Dinamika perilaku	Negara aktor rasional - konsisten memaksimalkan tujuan nasional melalui kebijakan luar negeri
Isu utama	Keamanan nasional
Proses yang berlangsung	Kompetisi demi kepentingan nasional
Hasil (outcome)	Ketertiban terbatas (<i>limited order</i>) dalam masyarakat yang anarkis
Struktur sistem internasional	Negara-sentris (<i>state-centric</i>)
Prinsip-prinsip dasar penanda sistem internasional	Anarki – kompetisi demi kekuatan dan pengaruh politik
Distribusi power dan pengaruh	Terfrakmentasi – distribusi power yang tidak seimbang antarnegara

Penutup

Perspektif realisme menjadi salah satu dari beberapa perspektif yang berkembang dalam studi hubungan internasional. Karena sikap akademiknya yang menempatkan pertimbangan politik dan *power* secara *distinct* dan otonom, maka perspektif realisme ini merupakan perspektif yang paling kuat dari studi politik internasional. Karenanya, Michael Doyle menulis bahwa realisme adalah teori dominan kita, dan bahwa kebanyakan sarjana hubungan internasional adalah realis atau mengidentifikasi diri sebagai realis (Ben-Itzhak, 2013: 522).

Realisme

Tetapi karena studi hubungan internasional tidak hanya membahas politik internasional, tetapi juga aspek-aspek hubungan internasional lainnya --yang justru semakin lama semakin kompleks--, maka klaim bahwa perspektif realisme itu menjadi paling dominan tidak punya dasar yang kuat. Banyak studi hubungan internasional, apalagi yang membahas ikhwal kerjasama yang fungsional, tidak harus mengandalkan anarki dan penggunaan *power* sebagai asumsi dasarnya. Oleh karenanya, bisa dipahami bahwa Maliniak *et al.* --yang melakukan penelitian pada 2007 terhadap situasi disiplin hubungan internasional dari 1980 sampai 2006-- menyimpulkan bahwa karya yang telah dipublikasikan yang sesuai dengan tradisi realis jumlahnya ternyata relatif sedikit, dan bahwa realisme tak pernah menjadi paradigma paling populer bagi para penulis jurnal akademik dan pada 1999 posisinya nomor tiga sesudah konstruktivisme” (Ben-Itzhak: 522-523).

Namun, untuk pembahasan politik internasional, sebagai subbidang hubungan internasional, perspektif realisme tetap menjadi perspektif yang dominan dalam studi hubungan internasional, kendati dominasi itu tidaklah mutlak karena mendapat saingan dari perspektif-perspektif lain sebagaimana yang dibahas di bab-bab lain di dalam buku ini.

Daftar Pustaka

- Ben-Itzhak, Svetla, (2013), "Realisme dan Neorealisme," dalam, John T. Ishiyama dan Matijke Breuning (eds.), *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Kedua Puluh Satu: Sebuah Referensi Panduan Tematis Jilid 1*, Penerjemah Ahmad Fedyani Sifuddin, Kencana Prenada Media Group, 512-525.
- Carr, E.H., (1964), *The Twenty Years' Crisis: An Introduction to the Study of International Relations*, Harper and Row, dimuat sebagian dengan judul "The Realist Critique and the Limitations of Realism" dalam Phil William, Donald M. Goldstein, Jay M. Shafritz, (1999) *Classic Readings of International Relations* (eds.), Harcourt Brace & Company, 39-43.
- Griffith, Martin and O'Callaghan, Terry, (2002), *International Relations: The Key Concepts*, Routledge.
- Hobbes, Thomas, (1983), *Leviathan*, Penguin Books Ltd., 1651, cetak ulang.
- Hobbes, Thomas, (1990), *Leviathan*, the Clarendon Press, 1090), dimuat sebagian dengan judul "Relations Among Sovereigns" dalam Phil William, Donald M. Goldstein, Jay M. Shafritz, (1999) *Classic Readings of International Relations* (eds.), Harcourt Brace & Company, 35-43.
- Internet Encyclopedia of Philosophy: A Peer-Reviewed Academic Resource dalam <http://www.iep.utm.edu/heraclit/> diunduh pada 13 November 2016, jam 5:55 WIB.
- Jackson, R., & Sorensen, G., (1999), *Introduction to International Relations*, Oxford University Press.
- Machivelli, Niccolo, (1910), trans. N.H. Thomson, *The Prince*, P.F. Collier & Son, dimuat sebagian dengan judul

Realisme

- “Recommendations for the Prince” dalam Phil William, Donald M. Goldstein, Jay M. Shafritz, (1999) *Classic Readings of International Relations* (eds.), Harcourt Brace & Company, 30-35.
- Mackinder, Harold J., (1962), *Democratic Ideals and Reality*, W.W. Norton.
- Morgenthau, Hans J., (1973>1948), *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, 5th Edition, Alfred A. Knopf, dimuat sebagian dengan judul “Six Principles of Political Realism” dalam Phil William, Donald M. Goldstein, Jay M. Shafritz, (1999) *Classic Readings of International Relations* (eds.), Harcourt Brace & Company, 43-48.
- Organski, A.F.K., (1958>1968), *World Politics*, A. Knopf, dimuat sebagian dengan judul “Criticism of Balance of Power Theory” dalam Phil William, Donald M. Goldstein, Jay M. Shafritz (1999) *Classic Readings of International Relations* (eds.), Harcourt Brace & Company, 250-254.
- Pane, Nina, (2015), *Mohammad Hatta: Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977)* (ed), Penerbit Buku Kompas.
- Spykman, Nicholas, (1942), *America’s Strategy in World Politics*, Harcourt, Brace & Co.,.
- Thucydides, (1903), *History of the Peloponnesian War*, Penguin Books, dimuat sebagian dengan judul “Reflections on the Peloponnesin War” dalam Phil William, Donald M. Goldstein, Jay M. Shafritz, (1999) *Classic Readings of International Relations* (eds.), Harcourt Brace & Company, 222-230.

<<<<<>>>>>

Bab 3

Liberalisme

Vinsensio Dugis

Pengantar

Di dalam studi hubungan internasional, liberalisme adalah perpekstif tandingan utama (*a rival perspective - a nemesis*) dari perspektif realisme. Kedua perspektif ini secara dominan telah mewarnai studi dan penstudi hubungan internasional, termasuk menjadi cikal bakal munculnya teori-teori hubungan internasional alternatif. Sebagaimana halnya perspektif tandingannya realisme, liberalisme tidak hanya membentuk teori-teori tentang politik internasional tetapi secara tradisional juga menawarkan berbagai preskripsi politik global (*global politics*). Liberalisme, seperti halnya juga realisme, tumbuh dari suatu tradisi sejarah pemikiran panjang dengan klaim yang kuat untuk menjadi sebuah cara pandang alternatif – *historic alternative* (Dunne, 2001: 163). Pada abad tujuhbelas dan delapanbelas para filsuf liberal dan pemikir politik telah mulai perdebatan tentang kesulitan menciptakan keadilan, keteraturan, dan hubungan yang aman antara manusia (Steans, Pettiford, Diez, El-Anis, 2010: 23). Liberalisme tumbuh dengan tradisi optimisme berdasarkan nilai-nilai pengendalian-diri (*self-restrain*), moderasi, kompromi, demi terciptanya stabilitas dan perdamaian.

Perspektif liberalisme sempat tampil sebagai perspektif yang mempunyai pengaruh kuat selepas Perang Dunia I. Dipelopori oleh Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) berhasil dibentuk sebagai wujud dari implementasi konsep keamanan bersama (*collective security*) yang merupakan salah satu preskripsi perspektif

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

liberalisme untuk mencegah kembali terjadinya perang dan menciptakan perdamaian dunia (Griffiths, 1999: 95-99). Presiden Wilson menginginkan percaturan politik global ketika itu diatur secara lebih terbuka melalui hukum internasional yang dikeluarkan LBB.

Studi-studi akademis hubungan internasional antara Perang Dunia I dan II didominasi oleh pengaruh perspektif liberalisme yang percaya akan potensi sisi positif manusia, kekuatan aturan hukum (*rule of law*), demokrasi dan hak-hak asasi manusia (Steans, Pettiford, Diez, 2005: 22). Tetapi sejarah mencatat bahwa pecahnya Perang Dunia II menjadi bukti kegagalan preskripsi yang ditawarkan perspektif liberalisme, sekaligus menandai redupnya pengaruh perspektif liberalis, yang segera setelah Perang Dunia II digantikan oleh meningkatnya pengaruh perspektif realisme dalam studi hubungan internasional. Secara umum posisi perspektif liberalisme dalam studi hubungan internasional ditandai dengan pengaruh yang turun-naik yang bahkan juga sebagian ditandai oleh sejumlah kegagalan yang memalukan (Jahn, 2013: 15).

Jauh sebelum disiplin ilmu hubungan internasional secara resmi berdiri sejak setelah Perang Dunia I, ada banyak tokoh yang telah dikenal sebagai kontributor terhadap dasar pemikiran perspektif liberalisme, tetapi belum terfokus pada disiplin ilmu hubungan internasional. Kupan tentang perspektif liberalisme dalam bab ini meliputi bahasan tentang para tokoh yang mengenalkannya, asumsi-asumsi dan postulat-postulat liberalisme, serta perskripsi liberalisme tentang politik global, dinamika perkembangannya, dan relevansinya dalam studi hubungan internasional kontemporer.

Para Liberalis Pendahulu

Sebelum menelaah para tokoh liberalis pendahulu, ada sejumlah hal penting yang perlu diingat. Pertama, bahwa tidak

Liberalisme

ada satupun dari para tokoh penulis awal ini yang mengklaim diri sebagai kaum liberalis. Adalah para penstudi hubungan internasional di era setelah lahirnya hubungan internasional sebagai disiplin ilmu mandiri, yang merujuk pemikiran kaum liberalis terdahulu ini sebagai pijakan untuk mengembangkan lebih lanjut perspektif liberalisme. Kedua, pemikiran-pemikiran dasar para liberalis pendahulu ini belumlah secara utuh menyinggung hubungan internasional sebagai fokus kajian utama mereka, kendati satu-dua di antaranya seperti halnya Jeremy Bentham telah sedikit menyinggung tentang hukum internasional dan bentuk-bentuk interaksi yang timbal-balik. Oleh karena itu, sebagai suatu perspektif teoritik dalam hubungan internasional, pembentukan liberalisme baru terjadi setelah 1919, ketika ilmu hubungan internasional secara resmi dipelajari sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri.

Terdapat banyak tokoh yang dapat dikategorikan sebagai liberalis pendahulu. Tetapi di dalam berbagai literatur hubungan internasional, nama-nama berikut ini; John Locke (1632-1704), Adam Smith (1723-1790), Immanuel Kant (1724-1804), Jeremy Bentham (1748-1832), umumnya dianggap sebagai para pemikir terdahulu yang meletakkan dasar berpikir perspektif liberalis. Tokoh-tokoh liberalis pendahulu inilah yang oleh para penstudi hubungan internasional kontemporer dijuluki sebagai kaum liberalis klasik dan karya-karya pemikiran dasar mereka disebut liberalisme klasik. Liberalisme klasik pada dasarnya teori yang berkembang dari bawah (*bottom-up theory*), menganggap hubungan internasional sebagai politik yang berkembang keluar yang tadinya bermula dari wilayah politik domestik. Titik tekan pandangannya mulai dari dalam yang selanjutnya diproyeksikan ke luar batas wilayah *-beyond the border* (van de Haar, 2009: 17).

John Locke (1632-1704) adalah salah satu filsuf terbesar di Eropa pada akhir abad ketujuh belas yang telah

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

ikut memberi fondasi terhadap perspektif liberalis. Di dalam salah satu karya politiknya yang terkenal “The Second Treatise of Government”, Locke menuangkan pendapatnya tentang kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan sifat pemerintah yang legimitatif sebagai hak alamiah yang dibentuk melalui kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat, menekankan tentang pentingnya pemisahan kekuasaan serta oposisi terhadap sistem yang otoritarian. Dalam hubungannya dengan individu, Locke menekankan pentingnya rasio dan akal sehat di dalam mencari kebenaran (Uzgalis, 2016). Menurut Locke manusia adalah fondasi sesungguhnya realitas sosial; manusia ada terlebih dahulu sebelum kolektivitas, termasuk kolektivitas yang diorganisir negara; manusia ada sebelum negara ada, dan negara sebetulnya dibentuk untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia (Gabriel, 1994: 149).

Karena itu, Locke umumnya dikenal sebagai pendukung pemerintahan dengan kewenangan terbatas. Locke menggunakan teorinya mengenai *natural rights* untuk berargumen bahwa pemerintah asalnya berkewajiban melindungi masyarakat, mempunyai kekuasaan yang terbatas terhadap masyarakat, dan dengannya dalam kondisi tertentu dapat dijatuhkan oleh masyarakat (Connolly, *Internet Encyclopedia of Philosophy*, <http://www.iep.utm.edu/locke/>, diakses 01/08/2016). Dalam konteks ini negara bukanlah tujuan dalam dirinya sendiri tetapi instrumen kelembagaan yang dibentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan hidup bermasyarakat (Jemadu, 2008: 42).

Teori kontrak sosial yang dikemukakan Locke ini menekankan pentingnya prinsip *rule of law*, yang dalam perkembangannya menjadi salah satu dimensi penting perspektif liberalis. Dengan prinsip *rule of law*, negara menjamin keberlangsungan penghormatan atas hak-hak hidup, kebebasan serta kepemilikan individu (*life, liberty, property*) masyarakat. Lebih dari itu, manusia pada dasarnya senantiasa mempunyai sisi yang baik atau positif yang hanya mungkin

Liberalisme

terkorupsikan oleh bentuk-bentuk organisasi yang buruk. Weber (2005: 38) menulis manusia pada dasarnya secara moral baik (*all morally good*), maka negara dan masyarakat akan menjadi baik jika diorganisir dengan mekanisme komunikasi yang baik/murni (*pure communication*), sebaliknya menjadi buruk jika diorganisir melalui komunikasi yang tidak baik/murni (*impure communication*).

Negara hadir sebagai lembaga konstitusional (*constitutional state*) yang memberi jaminan terhadap keteraturan hidup dan saling respek dalam berinteraksi antar-warga masyarakat. Dengan prinsip serupa (*rule of law*) negara akan menghormati sesama negara lain dan di dalam pola interaksinya akan mendasarkan diri pada norma-norma saling percaya (Jackson & Sorensen, 1999: 99). Dengan kata lain, respek dan kepercayaan menjadi landasan berinteraksi negara, sehingga perbedaan dan potensi konflik menjadi sebuah kondisi yang dapat dihindari.

Uraian singkat tentang prinsip-prinsip dasar dari pemikiran Locke ini merupakan bagian dari asas-asas penting dalam perspektif liberalisme klasik, yang sebagaimana ditulis sebelumnya, ikut memberi kontribusi sebagai landasan pengembangan perspektif liberalisme dalam studi hubungan internasional kontemporer. Prinsip-prinsip ini menjadi bagian dari sejumlah asumsi dasar perspektif liberalisme.

Tokoh liberalis pendahulu lainnya adalah Immanuel Kant (1724-1804) seorang filsuf abad kedelapanbelas asal Jerman. Kant mempunyai banyak karya fundamental, tetapi gagasan dasar dari semua filsafat kritis Kant adalah otonomi manusia (*human autonomy*) yang menjadi titik tolak dari semua argumen yang dikembangkan Immanuel Kant (Rohlf, 2016). Kontribusi monumental Kant untuk hubungan internasional terdapat di dalam karyanya *Towards Perpetual Peace* (1795), dimana di dalam karyanya ini Kant membuat argumen tentang bagaimana perdamaian dunia dapat dicapai. Ide dasar yang ditulis Kant ialah bahwasanya perdamaian

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

dunia hanya mungkin dicapai ketika interaksi hubungan internasional meniru hubungan antar-individu di dalam suatu masyarakat yang adil, dimana *rule of law* menjadi prinsip dasar berinteraksi. Sama seperti halnya individu yang harus menghormati hak-hak orang lain untuk menentukan nasib sendiri, interaksi antar-negara seharusnya juga demikian; tidak ada negara yang diperbolehkan secara paksa dan sepihak ikut mencampuri konstitusi dan urusan pemerintahan negara lain. Selanjutnya, ibarat individu yang perlu mengatur pola hubungan dengan individu lain di dalam suatu masyarakat yang adil, maka negara juga perlu mengatur tata-kelola dengan negara-negara yang lain melalui suatu mekanisme federasi. Dengan demikian respek terhadap hukum menjadi jalan menuju perdamaian itu sendiri (Jankowiak, *Internet Encyclopedia of Philosophy*, <http://www.iep.utm.edu/kantview/#SH6c>, diakses 01/08/2016).

Dasar berpikir rasional dan respek terhadap hukum inilah yang dalam salah satu varian perspektif liberalisme menjadi pemicu berkembangnya teori-teori *democratic peace*, yang percaya bahwa negara-negara yang menjalankan sistem politik yang demokratis akan cenderung menjaga perdamaian di antara sesamanya (Panke & Risse, 2007: 90). Sementara warga negara yang hidup dalam negara dengan sistem monarki atau apalagi yang otoritarian cenderung mudah terlibat dalam konflik dan perang (Steans, Pettiford, Diez, 2005: 25).

Tokoh liberalis klasik lainnya yang juga telah memberi landasan dasar perspektif liberalis adalah filsuf asal Inggris, Jeremy Bentham (1748-1804) yang hidup pada era yang kurang lebih sama dengan Immanuel Kant. Bentham mengembangkan etikal teori yang dibuat atas prinsip dasar yang telah dikembangkan oleh John Locke yaitu *human nature*. Atas dasar itu Bentham juga mengembangkan filsafat hukum (Sweet, *Internet Encyclopedia of Philosophy*, <http://www.iep.utm.edu/bentham/>diakses 01/08/2016). Adalah Bentham yang memperluas argumen *constitutional state* yang

Liberalisme

awalnya dikemukakan Locke ke tingkat internasional sehingga memunculkan istilah hukum internasional, dimana Bentham yakin bahwa hukum internasional pada dasarnya berada dalam kepentingan rasional *constitutional states* sehingga negara-negara ini senantiasa memperhitungkan etika hukum ketika berinteraksi dengan negara-negara lainnya (Jackson & Sorensen, 1999: 99).

Sebagaimana para tokoh liberalis klasik sebelumnya, Bentham juga melihat manusia sebagai makhluk rasional. Bukti rasionalitas manusia ini dapat dilihat dari ketika seorang individu memperhitungkan untung-rugi dari setiap tindakan yang akan diambil. Menurut Bentham melalui filsafat utilitariannya, orang yang bertindak secara rasional akan cenderung memaksimalkan kepentingannya, dan untuk itu bekerja secara kolektif dipandang sebagai cara terbaik memaksimalkan capaian kepentingan individu (Sweet, *Internet Encyclopedia of Philosophy*, <http://www.iep.utm.edu/bentham/> diakses 01/08/2016).

Adam Smith (1723-1790) adalah salah satu tokoh liberalisme klasik, yang pemikirannya berkembang terutama dalam ranah ekonomi. Salah satu pemikiran dasar yang diwariskan dari tradisi pemikiran Smith ialah adanya saling ketergantungan antara masyarakat dengan masyarakat, antara negara dengan negara sebagai bagian dari *human nature*. Bertolak dari sinilah berkembang dalam tradisi perspektif liberalisme suatu tesis; saling ketergantungan terutama pada sektor ekonomi mendorong negara untuk tetap menjaga kerjasama dan dengan begitu maka negara-negara akan mencegah diri dari situasi konfliktual yang mengarah ke situasi perang terbuka. Hubungan ekonomi antara manusia sifatnya menyatukan, kekuatan pendamai dalam hubungan internasional (Walter, 1996: 143). Cara berpikir inilah yang salah satunya ikut mewarnai perspektif liberalisme dalam hubungan internasional, terutama yang berhubungan dengan *interdependence liberalism* (Jackson & Sorensen, 1999: 103-

107). Harmoni kepentingan menjadi dasar yang mendorong negara untuk saling bekerjasama, sekaligus menjadi mekanisme pencegahan atas terjadinya perang yang dianggap tindakan irasional (Muller, 1993: 145).

Asumsi, Postulat dan Preskripsi

Dari pembahasan pada bagian sebelumnya tampak jelas benang merah dari apa yang menjadi asumsi dasar-asumsi dasar dan potulat-postulat umum perspektif liberalisme. Terlihat jelas adanya sejumlah persamaan, yang oleh Jackson & Sorensen (1999: 109-111) diuraikan sebagai berikut. Kemajuan merupakan salah satu asumsi kunci kaum liberalis dimana kemajuan disini berhubungan dengan kemajuan individu. Selanjutnya kebahagiaan dan kepuasan juga merupakan bagian dari asumsi kunci pemikiran kaum liberalis. Modernisasi adalah proses kemajuan yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, dan proses ini memperluas kesempatan wilayah kerjasama yang menembus batas-batas internasional. Kemajuan itu sendiri berarti perubahan ke kehidupan yang lebih baik bagi setidaknya-tidaknya mayoritas individu, dan ketika alasan yang rasional diaplikasikan dalam hubungan internasional, maka hasilnya adalah kemungkinan terbukanya kerjasama internasional yang lebih besar.

Secara kolektif, kaum liberalis di era pasca Perang Dunia I mengedepankan pandangan tentang dunia berdasarkan prinsip-prinsip dasar berikut (Kegley Jr. & Wittkopf, 1997: 20). Pertama, sifat manusia pada dasarnya baik dan karenanya manusia mempunyai kemampuan untuk berbagi dan bekerjasama. Kedua, perhatian dasar manusia terhadap kesejahteraan sesama membuat kemajuan itu dimungkinkan. Ketiga, perilaku buruk manusia seperti halnya kekerasan, bukanlah karena cacatnya manusia tetapi karena keburukan institusi yang mendorong manusia bertindak ingrat diri dan saling menyakiti. Keempat, perang bukannya

Liberalisme

tidak dapat dihindari dan frekwensinya dapat dikurangi dengan menghilangkan pengaturan kelembagaan yang memicu terjadinya perang. Kelima, perang adalah masalah internasional yang membutuhkan upaya kolektif atau multilateral untuk mengontrolnya daripada upaya nasional. Keenam, masyarakat internasional harus mereorganisir diri untuk menghilangkan institusi yang menyebabkan potensi perang, dan negara-negara juga harus mereformasi sistem politiknya sehingga hak penentuan nasib-sendiri dan praktek pemerintahan yang demokratis dapat membantu mendamaikan hubungan antar-negara.

Jika dilihat sebagai satu-kesatuan, maka keenam prinsip diatas secara jelas memperlihatkan pusat berpijak cara berpikir perspektif liberalisme yang dimulai dari level individu, bergerak ke level negara, dan selanjutnya ke level internasional. Mereka umumnya memulai dengan teori tentang sifat alamiah manusia (*human nature*), kemudian menjelaskan perilaku manusia bukan karena sifat alamiah manusia, tetapi karena pengaturan institusional dan struktural (bagaimana manusia diorganisir), dan akhirnya menyimpulkan bahwa masyarakat internasional juga dapat diorganisir sehingga perilaku buruk negara dapat dikurangi atau bahkan dicegah samasekali (Weber, 2005: 41).

Berpijak pada filsafat-filsafat dasar pemikir liberalis klasik, Steans, Pettiford & Diez (2005: 30) menuliskan hal-hal berikut sebagai asumsi dasar perspektif liberalisme. Pertama, kaum liberalis percaya bahwa manusia adalah makhluk rasional, dimana rasionalitas ini dapat dilihat dalam dua bentuk; kemampuan mengartikulasikan kepentingan dan kemampuan memahami prinsip-prinsip moral dan hidup berdasarkan aturan yang berlaku. Kedua, kaum liberalis menghormati kebebasan individu diatas segalanya. Ketiga, kaum liberalis mempunyai pandangan yang positif dan progresif terhadap sifat alamiah manusia. Keempat, kaum liberalis percaya mengenai kemungkinan tercapainya

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

perubahan positif dalam hubungan internasional. Kelima, kaum liberalis mementingkan kemungkinan agensi manusia yang mendatangkan perubahan. Keenam, dengan cara yang berbeda, kaum liberalis menentang perbedaan antara wilayah domestik dengan internasional; liberalisme adalah doktrin universal sehingga mempunyai komitmen terhadap komunitas universal manusia yang melampaui identitas dengan, dan keanggotaan dari, komunitas negara-bangsa; sementara konsep saling ketergantungan liberalis dan masyarakat dunia mengisyaratkan bahwa dalam dunia kontemporer batas antar-negara menjadi semakin terbuka dan mudah dipenetrasi.

Dari paparan-paparan sebelumnya, terlihat jelas fokus dari perspektif liberalisme yaitu kebebasan, kerjasama, perdamaian, dan kemajuan. Penghormatan terhadap hak dan kebebasan individu menjadi dasar kerjasama untuk mencapai kepentingan secara kolektif. Saling ketergantungan melalui kerjasama ini membuat perang menjadi suatu tindakan yang irasional, sehingga perdamaian abadi sebagaimana yang pernah dikemukakan Immanuel Kant bukanlah merupakan suatu keinginan yang utopis, tetapi kenyataan yang mungkin dicapai melalui kolaborasi antar-negara, dan melalui kerjasama ini kemajuan sebagian besar komunitas dapat terealisasi. Institusi-institusi internasional dibutuhkan sebagai fasilitator mencapai kemajuan yang diinginkan.

Terdapat empat hal mendasar yang menurut Gray (1995: xi-xiii) menyatukan rangkaian pemikiran perspektif liberalisme. Pertama, individualis; yaitu mengutamakan moral individu di atas bentuk kolektivitas lainnya. Kedua, egaliter; menghargai persamaan karena status moral manusia yang setara dan menolak tatanan hukum atau politik yang menimbulkan perbedaan. Ketiga, universalis; menekankan universalitas moral manusia dan menempatkan bentuk-bentuk asosiasi lainnya pada level tingkatan kedua. Keempat, melioris; percaya bahwa institusi sosial dan tatanan politik dapat diperbaiki. Keempat hal inilah yang tidak saja mengikat,

Liberalisme

tetapi mewarnai berbagai tesis yang dikembangkan dalam kerangka perspektif liberalisme dalam studi hubungan internasional. Sebagaimana dipaparkan dalam bagian lain di bab ini, varian-varian perspektif liberalisme yang berkembang menjadi teori-teori yang spesifik dalam studi hubungan internasional senantiasa diwarnai oleh keempat hal mendasar sebagaimana dikemukakan oleh John Gray di atas.

Dalam formula yang hampir sama, berikut adalah asumsi filosofis dasar perspektif liberalisme.

Tabel 3.1
Asumsi-Asumsi Dasar Liberalisme

Isu	Pandangan	Terminologi
Sifat dasar manusia	Pengendalian-diri, berbagi kepentingan	<i>The self-restraint assumption</i>
Aktor penting	Negara & aktor-aktor bukan-negara	<i>The state & the non-state actors assumption</i>
Tindakan negara	Pengendalian-diri memungkinkan negara terlibat dalam tindakan kolaboratif dan kerjasama	<i>The self-restraint for collaborative & cooperative assumption</i>
Pertimbangan tindakan negara	Rasional demi kepentingan bersama	<i>The shared rational-actor assumption</i>
Karakteristik sistem internasional	Kerjasama atas dasar kepentingan bersama	<i>The mutual-cooperative assumption</i>

Hubungan Internasional dalam Perspektif Liberalisme

Perspektif liberalisme berkembang dengan dinamikanya sendiri. Dari pembahasan tentang pemikiran para pendahulu

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

dan para tokoh utama perspektif liberalisme, maka bisa dilihat benang merah perspektif ini dalam melihat hubungan internasional. Terlihat jelas pula ketidakberesuaian perspektif liberalisme dengan perspektif realisme di dalam asumsi dan prinsip-prinsip dasar yang dipakai sebagai landasan pengembangan masing-masing perspektif.

Terdapat setidaknya empat kluster tesis utama yang ada di dalam perspektif liberalisme (Moravcsik, t.t.: 1). Pertama tesis yang menyatakan bahwa demokrasi liberal cenderung lebih mengutamakan perdamaian dibandingkan bentuk-bentuk pemerintahan lainnya (*republican liberalism thesis*). Kedua, tesis yang menyebutkan bahwa distribusi yang salah atas kekuatan sosial atau adanya ketimpangan sosial yang tinggi mendorong terjadinya kondisi-kondisi yang menimbulkan konflik internasional (*pluralist/sociological liberalism thesis*). Ketiga, tesis yang mengatakan bahwa ketergantungan ekonomi adalah insentif terhadap perdamaian dan kerjasama (*commercial/interdependence liberalism thesis*). Keempat, hukum dan institusi internasional mendorong penyesuaian dan kerjasama internasional (*regulatory/institutional liberalism thesis*).

Atas dasar tesis-tesis tersebut di atas, perspektif liberalisme menggambarkan hubungan internasional sebagai arena negara-negara dan aktor-aktor non-negara lainnya saling berinteraksi. Tidak seperti halnya perspektif realisme yang memandang negara sebagai aktor utama, perspektif liberalisme melihat aktor-aktor non-negara juga sangat penting dalam percaturan politik global. Oleh karena itu, perspektif liberalisme memandang pluralisme sosial adalah sebuah kenyataan yang harus diterima dalam percaturan politik global. Liberalisme tidak sepakat dengan realisme yang menempatkan pentingnya negara di atas semuanya. Meskipun perspektif liberalisme menerima kenyataan pentingnya kehadiran negara dalam sistem internasional, tetapi aktor individu adalah kunci dalam hubungan internasional,

Liberalisme

dan sehubungan dengan itu menurut perspektif liberalis, politik domestik jangan sampai diabaikan. Para pendukung perspektif liberalisme menempatkan tekanan utama pada aksi dan kepentingan individu serta kelompok yang dapat termanifestasikan dalam aksi dan kepentingan negara.

Bagi perspektif liberalisme, persaingan yang ada dalam arena hubungan internasional adalah suatu kenyataan, yang melibatkan multi-aktor. Tetapi karena negara bertindak ibaratnya manusia yang penuh alasan dan pertimbangan rasional, maka persaingan yang ada lebih menyerupai sebuah permainan atau sport dimana ia dimainkan dengan aturan jelas yang telah disepakati. Persaingan antar aktor internasional yang melibatkan multi-aktor berlangsung di dalam suatu situasi dimana *rule of law* menjadi prinsip dasarnya (Gabriel, 1994: 150).

Adapun mekanisme yang diyakini dapat membantu memfasilitasi kepentingan individu dan kelompok serta negara ialah kehadiran institusi politik. Para pendukung perspektif liberalisme percaya bahwa di dalam sistem yang anarki, kerjasama adalah jalan terbaik menuju tercapainya kepentingan bersama. Untuk itulah maka dibutuhkan kehadiran organisasi-organisasi baik di tingkat regional maupun internasional. Institusi internasional dapat membuat kerjasama lebih mudah dan jauh lebih mungkin. Selain melalui institusi formal, fasilitasi kerjasama internasional dapat juga dilakukan melalui berbagai perangkat aturan yang dibuat untuk mengatur tindakan negara dalam bidang tertentu. Singkatnya, para pengusung perspektif liberalisme percaya bahwa institusi internasional menolong memajukan kerjasama di antara negara-negara.

Disamping memajukan kerjasama, perspektif liberalisme juga memandang bahwa semakin tinggi tingkat institusionalisasi yang terjadi dalam percaturan hubungan internasional, maka semakin signifikan situasi ini dapat

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

mengurangi efek kekacauan yang diakibatkan situasi anarki multipolar. Ketidakpercayaan yang boleh jadi masih muncul dari negara, dapat terfasilitasi melalui kehadiran institusi internasional. Dengan kata lain, menghilangkan rasa saling tidak percaya antar-negara dapat diatasi dengan berinteraksi melalui institusi atau organisasi internaional yang telah disepakati. Kedaulatan negara dapat tetap terjaga, sementara kerjasama demi tercapainya kepentingan bersama juga tetap bisa berjalan.

Secara garis besar fitur hubungan internasional dalam perspektif liberalisme dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Fitur Hubungan Internasional Ala-liberalisme

Variabel	Liberalisme
Aktor/unit analisis	Negara & Orgnisasi Non-negara
Pandangan tentang aktor	Negara terdiri atas berbagai komponen; sebagian beroperasi lintas batas negara
Dinamika perilaku	Keputusan tidak selalu optimal; perundingan, tawar-menawar, kompromi
Isu utama	Bervariasi, isu-isu sosial-ekonomi dan kesejahteraan mendahului keamanan nasional
Proses yang berlangsung	Manajemen isu-isu global
Hasil (outcome)	Perilaku berdasarkan aturan di dalam masyarakat yang poliarki
Struktur sistem internasional	Transnasional- banyak pusat kekuatan
Prinsip-prinsip dasar penanda sistem internasional	Saling ketergantungan
Distribusi power dan pengaruh	Relatif terdistribusi secara merata

Perkembangan Perspektif Liberalisme

Sebagaimana telah disinggung pada bagian awal bab ini, pecahnya Perang Dunia II menandai redupnya pengaruh perspektif liberalisme karena preskripsi-preskripsi yang ditawarkannya selepas Perang Dunia I gagal mencegah terjadinya Perang Dunia II. Meningkatnya dominasi perspektif realisme selama Perang Dingin berlangsung, terus mengenyampingkan perkembangan perspektif liberalisme sebagai suatu tradisi berpikir yang koheren.

Tetapi meski demikian, varian-varian perspektif liberalisme justru berkembang semakin banyak dengan menawarkan tesis-tesis yang lebih spesifik. Moravcsik (1997: 515) mengidentifikasi varian liberalisme yang *ideational*, komersial, dan republikan. Nye (1988: 246) membahas tentang varian liberalisme komersial, demokratik, regulatori, dan sosiologis. Jackson dan Sørensen (2003: 108) menyinggung varian liberalisme sosiologis, interdependen, institusional, dan republikan. Selanjutnya Dunne (1997: 150-154) mengupas tentang varian liberalisme yang internasionalis, idealis, institusionalis, termasuk masing-masing varian neo-nya. Sementara itu masih ada Doyle (1997: 206) yang membagi varian liberalisme yang imperialis, pasifis, internasionalis, serta Zacher dan Matthew (1995: 122-137) yang membedakan antara varian yang disebutkan republikan, komersial, kognitif, sosiologis, dan institusional.

Liberalisme republikan fokus pada institusi politik dan rejim, sedangkan varian yang komersial, interdependen dan pasifis berfokus pada soal-soal ekonomi, sementara varian yang *ideational* dan kognitif konsentrasi pada soal-soal ide, norma dan kultur (Jahn, 2013: 19). Subbab ini secara garis besar menyajikan sejumlah varian perspektif liberalisme, yang menjadi bagian penting dari perkembangan perspektif liberalisme. Meskipun dalam format yang singkat, penyajian ini setidaknya memperlihatkan sisi lain dari perkembangan

perspektif liberalisme, yang sebagaimana ditulis sebelumnya, walaupun boleh jadi perspektif liberalisme terkesan menurun pengaruhnya jika dilihat sebagai suatu perspektif yang koheren dibandingkan dengan perspektif realisme, tetapi sisi lain memperlihatkan 'kekayaan' dengan berkembangnya teori-teori turunannya yang coba dibahas secara garis besar pada bagian berikut subbab ini. Varian-varian liberalisme ini kerap juga dilihat sebagai bentuk respons sekaligus kritik yang lebih membumi perspektif liberalisme terhadap *anarchy-based view* perspektif realisme (Moravcsik, 1997: 514).

Liberalisme Republikan

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, liberalisme varian ini berfokus pada institusi politik dan rejim. Adapun tesis utamanya ialah demokrasi liberal cenderung lebih mengutamakan perdamaian dibandingkan bentuk-bentuk pemerintahan lainnya; negara-negara dengan rejim yang demokratis tidak saling berperang. Sebagaimana disinggung pada subbab tentang para liberalis pendahulu, Immanuel Kant adalah figur pertama yang mengawali tesis liberalisme republikan ini.

Dengan tesis dasarnya, para pendukung liberalisme republikan bersifat sangat positif terhadap meningkatnya jumlah negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis, sebab bagi kaum liberalis republikan meningkatnya jumlah negara demokratis di dunia memberi jaminan terhadap semakin terbukanya peluang terhadap terciptanya dunia yang semakin stabil dan damai, yang diwarnai berbagai kolaborasi.

Tentu ada banyak penjelasan mengapa negara-negara yang demokratis cenderung saling bekerjasama secara damai dan menghindari konflik. Merujuk pada karya Michael Doyle (1986), Jackson & Sørensen (1999: 123-124) menulis tiga

Liberalisme

alasan yang menyebabkan negara-negara yang demokratis bakalan cenderung saling bekerjasama secara damai.

Pertama, negara-negara dengan sistem pemerintahan yang demokratis, secara domestik mempunyai kultur penyelesaian konflik secara damai, dimana pemerintah dikontrol oleh warga-negaraanya. Kultur inilah yang selanjutnya dipraktekkan dalam pergaulan internasional oleh pemerintahan negara-negara yang demokratis. Kedua, negara-negara dengan sistem pemerintahan yang demokratis menganut nilai moral yang sama; cara-cara penyelesaian masalah yang damai jauh lebih superior dibandingkan cara-cara penyelesaian dengan kekerasan. Karenanya, negara-negara ini berada dalam suatu wilayah yang serupa; perilaku penyelesaian masalah dengan cara-cara damai didukung dengan penghormatan hak-hak individu pada level interaksi internasional. Ketiga, perdamaian antar-negara-negara demokratis diperkuat oleh kerjasama ekonomi yang saling mengisi kebutuhan timbal-balik.

Atas dasar itu maka bagi kaum liberalis republikan promosi demokrasi adalah kewajiban bagi negara-negara. Mereka sangat optimis terhadap perdamaian dunia jika tiga kondisi untuk itu dipenuhi; norma-norma penyelesaian konflik secara damai, fondasi moral yang memungkinkan negara-negara berinteraksi dalam suatu frekwensi saling pengertian (*mutual understanding*), kerjasam ekonomi dan saling mengisi kebutuhan timbal-balik (Jackson & Sørensen, 1999: 125).

Liberalisme Sosiologis

Kaum liberalis sosiologis cenderung menitikberatkan perhatiannya pada pluralitas aktor, sehingga kerap juga disebut *pluralist liberalism*. Mereka melihat hubungan internasional lebih sebagai suatu bentuk hubungan transnasional yang tidak hanya melibatkan negara, tetapi

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

juga multi-aktor lainnya selain negara. Karena itu, teris utamanya adalah; distribusi yang salah atas kekuatan sosial atau adanya ketimpangan sosial yang tinggi mendorong terjadinya kondisi-kondisi yang menimbulkan konflik internasional. Karena itu yang diperlukan dalam rangka menghadirkan perdamaian dunia ialah derajat keterhubungan yang melibatkan semua aspek dalam hubungan internasional yang bersifat transnasional, yang pada ujungnya membentuk sebuah komunitas keamanan (*security community*).

Di dalam sebuah komunitas keamanan, masing-masing bagian dari komunitas (negara dan non-negara) merasa menjadi bagian dari komunitas itu dan oleh karenanya merasa mempunyai kewajiban untuk mempertahankan keberlangsungan komunitas ini. Menurut Deutsch et al. (1957), komunitas keamanan yang dibayangkan oleh para pengusung liberalisme sosiologis ini dapat terbentuk jika memenuhi syarat, meningkatnya komunikasi sosial, mobilitas orang yang semakin tinggi, hubungan ekonomi yang kuat, jaringan transaksi timbal-balik antar anggota komunitas yang semakin luas.

Dalam formula yang lain, komunitas kemanan yang digambarkan diatas paralel dengan masyarakat internasional jaring laba-laba (*cobwel model*) yang diperkenalkan John Burton (1972), dimana hubungan eksternal dari warga masyarakat internasional dapat terjadi melalui dan oleh karena berbagai kluster kepentingan. Dengan begitu maka percaturan hubungan internasional bagi kaum liberal sosiologis lebih didorong oleh kerjasama yang saling menguntungkan dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan yang antagonis; individu menjadi anggota dari berbagai kelompok yang berbeda sehingga cenderung mementingkan kerjasama daripada konflik. Transaksi-transaksi yang melibatkan individu mempunyai konsekuensi luas terhadap masalah-masalah global akibat terbentuknya '*a well-informed world*'.

Liberalisme Interdependen

Varian liberalisme ini berangkat dari suatu keyakinan bahwa saling membutuhkan adalah bagian alamiah dari eksistensi manusia dan bentuk-bentuk kolektivitas dimana manusia menjadi anggota dari komunitas kolektif itu. Oleh karena itu manusia dan pemerintah pada dasarnya saling membutuhkan dan mereka dipengaruhi oleh kejadian di tempat lain yang dialami oleh manusia dan pemerintahan yang lain.

Logika berpikir dasar saling membutuhkan itulah yang selanjutnya menjadi pendorong berkembangnya, terutama pada sektor-sektor ekonomi, varian liberalisme interdependen ini. Kebahagiaan dan kemajuan (*progress*) sebagaimana dikatakan para liberalis klasik adalah ujung yang hendak dicapai secara bersama dengan asas saling membutuhkan. Dalam kaitannya dengan itu, cara-cara komersial kerap dipandang jauh lebih berbudaya dan menguntungkan dibandingkan penggunaan cara-cara kekerasan di dalam upaya mencapai kemajuan. Karena itu, varian ini juga sering disebut liberal komersial, dengan tesis utama, ketergantungan ekonomi adalah insentif terhadap perdamaian dan kerjasama (*commercial/interdependence liberalism thesis*).

Liberalisme interdependen ini menjadi basis kerjasama ekonomi yang fungsional, sekaligus menjadi pendorong berkembangnya berbagai bentuk kerjasama regional yang semakin terintegrasi seperti halnya dengan Uni Eropa. Di tingkat internasional, kondisi saling membutuhkan inilah yang pada akhirnya melahirkan masyarakat internasional yang diwarnai oleh berbagai kepentingan saling membutuhkan, yang oleh Robert Keohane dan Joseph Nye (2012) disebut dengan istilah '*complex interdependence*'. Hubungan antar-negara bukan lagi semata-mata hubungan antar-para pemimpin negara, tetapi meliputi berbagai aktor pada berbagai level dengan berbagai varian kepentingan. Di luar itu, hubungan transnasional antar-individu dan antar-kelompok juga semakin meningkat. Karena itu penggunaan

instrumen militer bukan lagi sesuatu yang berguna di dalam dunia internasional yang serba kompleks.

Keterbukaan eksternal (*external openness*) adalah salah satu kunci yang memfasilitasi interaksi dalam dunia yang serba-kompleks (Schneider, 2014: 173). Negara hadir sebagai institusi yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dari multi-aktor lainnya. Inilah yang kerap diperlihatkan dalam masyarakat uni Eropa beberapa dekade terakhir.

Liberalisme Institusionalis

Kaum liberalis institusional memfokuskan perhatiannya pada fungsi hukum dan peran institusi internasional, dengan tesis yang mengatakan hukum dan institusi internasional mendorong penyesuaian dan kerjasama internasional (*regulatory/institutional liberalism thesis*). Institusi internasional dapat berupa organisasi-organisasi internasional formal yang mewakili negara-negara, tetapi juga aturan-aturan resmi, kesepakatan-kesepakatan, dan konvensi-konvensi yang memfasilitasi interaksi antar-negara.

Akar dari liberalisme institusional ini dapat ditelusuri pada studi-studi tentang integrasi fungsional pada tahun 1940an dan 1950an serta studi-studi mengenai integrasi regional pada tahun 1960an. Studi-studi ini umumnya berkesimpulan bahwa cara menuju perdamaian dan kesejahteraan dapat dicapai jika negara-negara memusatkan (*pool*) sumber-sumbernya dan bahkan jika mungkin ‘membagi’ sebagian kedaulatannya agar komunitas yang terintegrasi dapat terbentuk, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan atau problem-problem bersama di kawasan regional dapat dipecahkan (Lamy, 2001: 189).

Kehadiran organisasi dan kesepakatan atau rejim-rejim yang ada diyakini mempromosi kerjasama

Liberalisme

antar-negara. Efek konfliktual multipolar anarki sistem internasional dapat dicegah melalui tingginya tingkat institusionalisasi, dimana *lack of trust* dapat diatasi melalui kehadiran institusi-institusi internasional. Aliran informasi yang cukup bagi negara-negara anggota melalui kehadiran institusi internasional dapat menjauhkan negara dari rasa saling curiga. Dengan begitu maka institusi internasional menghilangkan rasa takut satu-sama lain antar-negara. Selanjutnya institusi juga menyediakan forum bernegosiasi bagi negara-negara anggota sehingga konflik dapat dihindari (Jackson & Sørensen, 1999: 122).

Preskripsi yang ditawarkan para pendukung liberal institusional ini mendapatkan momentum baru semenjak tahun 1970an ketika fitur politik global semakin kompleks diwarnai oleh kompleksitas multi-aktor di luar negara yang diwarnai berbagai kepentingan. Transnasionalisme 1970an selanjutnya diikuti oleh globalisasi ekonomi sejak tahun 1980an secara simultan memberi ruang yang cukup terhadap tervalidasinya argumen-argumen liberalis institusional.

Elemen lain yang umumnya menjadi argumen kaum liberal institusionalis ialah fungsi institusi internasional di dalam memfasilitasi negara untuk dapat ‘memonitor’ apa yang dilakukan negara lain. Proses ini diyakini membantu terciptanya saling pengertian yang lebih baik, sehingga negosiasi dan kompromi dimungkinkan. Atas dasar inilah maka varian liberalisme ini juga sering disebut *regulatory liberalism*.

Banyak cara dan bukti yang kerap dipakai para pendukung liberalis institusional untuk mengatakan bahwa preskripsi-preskripsi mereka terverifikasi. Salah satu bukti yang kerap ditunjuk adalah terus meningkatnya jumlah organisasi internasional baik di level regional maupun di level internasional. Di samping jumlah, bidang-bidang yang menjadi perhatian dari organisasi-organisasi ini semakin spesifik. Ini membuktikan bahwa kehadiran institusi

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

internasional bermanfaat dan sangat dibutuhkan tidak saja komunitas negara tetapi masyarakat internasional pada umumnya.

Penutup

Perspektif liberalisme adalah salah satu dari beberapa perspektif yang berkembang dalam studi hubungan internasional. Perspektif liberalisme telah membawa dampak yang mendalam terhadap bentuk masyarakat industrial moderen. Walaupun sempat ‘tersisihkan’ posisinya oleh perspektif realisme selama berlangsungnya Perang Dingin, varian-varianya justru semakin berkembang banyak.

Berakhirnya Perang Dingin membawa momentum baru terhadap kebangkitan pengaruh perspektif liberalisme. Varian-varian perspektif liberalisme yang berkembang selama Perang Dingin, tampil semakin lebih nyata menyajikan berbagai alat untuk menjelaskan fenomena politik global, sekaligus menawarkan sejumlah preskripsi yang dibutuhkan oleh para pengambil kebijakan.

Di era dimana globalisasi ekonomi semakin meningkat dan meluas, perspektif liberalis tetap menjadi salah satu perspektif dominan dalam percaturan politik global (Burchill, 2001: 29). Pergeseran perkembangan percaturan politik global yang semakin multipolar secara langsung memberi ruang yang leluasa bagi terverifikasinya berbagai proposisi yang dikembangkan atas asumsi-asumsi dasar yang dikemukakan para pengusung perspektif liberalisme.

Daftar Pustaka

- Burchill, Scott, (2001), "Liberalism", dalam, Scott Burchill *et al*, *Theories of International Relations*, (eds.), Palgrave, 29-69.
- Connolly, Patrick J., (t.t.), "John Locke (1632-1704)", *Internet Encyclopedia of Philosophy: A Peer-Reviewed Academic Resource*, tersedia dan dapat diunduh, <http://www.iep.utm.edu/locke/>, diakses 01/08/2016).
- Deutsch, K. W. *et al*, (1957), *Political Community and the North Atlantic Area*, Princeton University Press.
- Doyle, M. W., (1986), "Liberalism and World Politics", *American Political Science Review*, 80(4), 1151-1169.
- _____, (1997), *Ways of War and Peace*, W. W. Norton.
- Dunne, Tim, (1997), "Liberalism", dalam, John Baylis, & Steve Smith, *The Globalization of World Politics*, (eds.), Oxford University Press.
- _____, (2001), "Liberalism", dalam, John Baylis & Steve Smith, *The Globalization of World Politics, An introduction to international relations*, (eds.), 2nd edition, Oxford University Press, 162-181.
- Gabriel, Jürg Martin, (1994), *Worldviews and Theories of International Relations*, Palgrave.
- Gray, John, (1995), *Liberalism*, Open University.
- Griffiths, Martin, (1999), *Fifty Key Thinkers in International Relations*, Routledge.
- Jackson, R., & Sørensen, G., (1999), *Introduction to International Relations*, Oxford University Press.
- _____, (2003), *Introduction to International Relations. Theories and Approaches*, Oxford University Press.

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

- Jahn, Beate, (2013), "Liberalism – in Theory and History", dalam, Rebekka Friedman, *et al*, *After Liberalism? The Future of Liberalism in International Relations*, (eds.), Palgrave Macmillan, 15-32.
- Jankowiak, Tim, (t.t), "Immanuel Kant", *Internet Encyclopedia of Philosophy: A Peer-Reviewed Academic Resource*, tersedia dan dapat diunduh, <http://www.iep.utm.edu/kantview/#SH6c>, diakses 01/08/2016).
- Jemadu, Aleksius, (2008), *Politik Global dalam Teori & Praktik*, Graha Ilmu.
- Kegley, Charles W., Jr, & Wittkopf, Eugene R., (1997), *World Politics, Trend and Transformation*, 6th edition, St. Martin's Press.
- Keohane, Robert O. & Nye, Joseph, (2012), *Power and Interdependence*, 4th edition, Longman.
- Lamy, Steven L. (2001), "Contemporary mainstream approaches: neo-realism and neo-liberalism", dalam, John Baylis & Steve Smith, *The Globalization of World Politics, An introduction to international relations*, (eds.), 2nd edition, Oxford University Press, 182-199.
- Moravcsik, Andrew, (t.t), "Liberalism and International Relations Theory", Paper No. 92-6, 1-53, tersedia: https://www.princeton.edu/~amoravcs/library/liberalism_working.pdf
- _____, (1997), "Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics", *International Organization*, 51(4), 513-553.
- Muller, Jerry Z., (1993), *Adam Smith in his Time and Ours, Designing the Discent Society*, Maxwell McMillan.
- Nye, J. Jr, (1988), "Neorealism and Neoliberalism", *World Politics*, 40(2), 235-251.

Liberalisme

- Panke, Diana & Risse, Thomas, (2007), "Liberalism", dalam, Tim Dunne, *et al*, *International Relations Theories, Discipline and Diversity*, (eds.), Oxford, 89-109.
- Rohlf, Michael, (2016), "Immanuek Kant", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2016 Edition), Edeard N. Zalta (ed.), URL = [https://plato.stanford.edu.archives/spr2016/entries/kant/](https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/kant/). Diunduh 01 Agustus 2016.
- Schneider, Gerald, (2014), "Peace through globalization and capitalism? Prospects of two liberal propositions", *Journal of Peace Research*, 51(2), 173-183.
- Steans, Jill & Pettiford, Lloyd and Diez, Thomas, (2005), *Introduction to International Relations, Perspectives & Themes*, 2nd edition, Pearson & Longman.
- _____, & Pettiford, Lloyd & Diez, Thomas and El-Anis, Imad, (2010), *An Introduction to International Relations, Perspectives & Themes*, 3rd edition, Pearson.
- Sweet, William, (t.t.), "Jeremy Bentham (1748-1832)", *Internet Encyclopedia of Philosophy: A Peer-Reviewed Academic Resource*, dapat diunduh pada <http://www.iep.utm.edu/bentham/> diakses 01/08/2016).
- Uzgalis, William, (2016), "John Locke", *The Standford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2016 Edition), Edard N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entris/locke/>. Diunduh 01 Agustus 2016.
- van de Haar, Edwin, (2009), *Classical Liberalism and International Relations Theory*, Palgrave Macmillan.
- Walter, Andrew Wyatt, (1996), "Adam Smith and the Liberal Tradition in Intrnational Relations", dalam, Ian Clark & Iver B. Neumann, *Classical Theories of International*

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

Relations, (eds.), Macmillan Press, 142-172.

Weber, Cynthia, (2005), *International Relations Theory, A Critical Introduction*, 2nd edition, Routledge.

Zacher, M. W & Richard, A. M., (1995), "Liberal International Theory: Common Threads, Divergent Strands", dalam, W. C. Kegley, Jr, *Controversies in International Relations Theory. Realism and the Neoliberal Challenges*, (ed.), St. Martin's Press, 107-150.

<<<<<>>>>>

Bab 4

Neorealisme

Radityo Dharmaputra

Pengantar

Neorealisme adalah salah satu perspektif utama dalam kajian teori-teori Hubungan Internasional kontemporer. Bab ini membahas tentang asumsi dasar neorealisme tentang anarki dan struktur sistem internasional yang dalam perkembangan perspektif neorealisme menjadi titik tolak penjelasan tentang perilaku negara, struktur politik internasional, agenda-agenda utama dalam hubungan internasional, serta bagaimana kaum neorealis memberikan penjelasan teoritik tentang cara agar stabilitas dan perdamaian internasional dapat dicapai. Pemahaman tentang hal-hal ini diharapkan dapat membantu pembaca menjelaskan berbagai fenomena interaksi hubungan internasional dengan menggunakan kacamata perspektif neorealis.

Neorealisme muncul sebagai kritik atas asumsi dasar realisme yang menganggap sifat dasar manusia (*human nature*) sebagai penjelasan atas berbagai perebutan kekuasaan dalam hubungan internasional (Mearsheimer, 2013: 78). Dalam pandangan neorealisme, sifat dasar manusia yang konfliktual tidak berdampak pada perilaku negara dalam politik internasional. Menurut pandangan neorealisme, yang lebih berpengaruh adalah struktur anarki internasional. Struktur ini memaksa negara untuk bertindak agresif.

Neorealisme, sebagaimana asumsi dasar realisme klasik, menganggap desain dari struktur internasional adalah

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

anarki. Hal ini ditandai dengan tidak adanya otoritas yang mengatur relasi antara negara. Dalam kondisi anarki, potensi suatu negara untuk menyerang atau diserang oleh negara lain tidak dapat diprediksi. Kondisi ketidakpastian yang dialami setiap negara dalam politik internasional tersebut yang menyebabkan setiap negara berusaha untuk mencapai kapabilitas keamanan (*security*) dan/atau kekuatan (*power*) semaksimal mungkin.

Kekuatan (*power*) dalam pandangan neorealisme adalah kapabilitas material yang mampu dikontrol oleh negara (Mearsheimer, 2013: 78). Dalam hal ini, neorealisme sepakat dengan realisme klasik bahwa militer dan ekonomi adalah penentu kualitas *power* suatu negara. Maka, dalam pandangan neorealisme, negara yang kuat adalah negara yang mempunyai kapasitas militer dan ekonomi yang kuat.

Namun tidak semua penstudi neorealisme sepakat mengenai seberapa besar kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh suatu negara. Kenneth Waltz (1979) berargumen bahwa negara tidak seharusnya mengejar kekuatan sebagai hegemon secara berlebihan, karena pada akhirnya sistem internasional akan mendorong aktor lain merasa terancam dan berbalik menyerang negara tersebut. Pandangan Waltz ini sering disebut dengan *defensive realism*. Argumen utama realisme defensif adalah negara harus menahan diri untuk tidak mengejar *power* berlebihan, namun cukup pada kuantitas yang dibutuhkan untuk bisa selamat (*survival*). Realisme defensif melihat kekuatan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Di sisi lain, John Mearsheimer (2001) melihat kekuatan adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap negara. Tujuan negara berinteraksi dalam hubungan internasional adalah untuk menjadi hegemon. Negara dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan harus berorientasi pada pencapaian kekuatan maksimal. Pandangan ini sering disebut sebagai *offensive realism* yang memposisikan

Neorealisme

pencapaian supremasi kekuatan (utamanya militer) sebagai tujuan interaksi setiap negara.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam pandangan neorealisme terdapat beberapa cabang pemikiran yang muncul untuk menganalisis fenomena hubungan internasional. Sebelum membahas masing-masing cabang pemikiran, subbagian selanjutnya membahas terlebih dahulu mengenai tokoh-tokoh yang menjadi rujukan dalam perspektif neorealisme beserta argumen utama yang disampaikan.

Para Penstudi Neorealisme

Ketika berbicara mengenai neorealisme, kita akan selalu bertemu dengan nama Kenneth Waltz. Sebagai peletak dasar, tulisan Waltz (1979), “Theory of International Politics”, menjadi basis utama prinsip-prinsip dasar neorealisme. Kemunculan neorealisme ini sejalan dengan *Great Debate* kedua dalam kajian HI, antara teori-teori tradisional yang menekankan pandangan kesejarahan dengan teori-teori lain yang menekankan prinsip saintifik. Waltz, melalui tulisannya di tahun 1959, “Man, State, and War”, serta tahun 1979, menganggap bahwa kajian mengenai politik internasional haruslah didasarkan pada prinsip behavioralis dan saintifik.

Salah satu prinsip yang membedakan neorealisme dengan realisme klasik adalah upaya Waltz (secara epistemologis) untuk mencari alasan umum di balik perilaku aktor internasional (negara). Mengutip Waltz (1979: 66), walaupun setiap negara memiliki perbedaan, namun selalu ada kesamaan yang mendasari perilaku negara. Secara logika, bila realisme klasik memfokuskan diri pada perilaku manusia sebagai penjelas dari perilaku negara, maka seharusnya setiap kebijakan negara bisa berbeda menurut logika individunya. Waltz menantang pandangan tersebut dengan mencoba menunjukkan bahwa ada aspek penjelas yang sama dari tindakan negara, yaitu struktur sistem internasional.

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

Penjelasan Waltz ini yang menjadi dasar perspektif neorealisme, yang juga sering dinamai realisme struktural. Posisi ini lantas dikembangkan pula oleh dua analis asal Amerika Serikat, Stephen Walt dan John Mearsheimer. Pandangan keduanya, yang walaupun berbeda namun berinduk pada kesamaan prinsip soal supremasi struktur internasional, melahirkan turunan utama neorealisme yaitu realisme defensif (Walt, 1985) dan realisme ofensif (Mearsheimer, 2001).

Penjelasan lanjutan mengenai pandangan turunan ini akan dibahas di subbagian selanjutnya. Namun, sebelum masuk pada pemahaman mendalam mengenai masing-masing cabang neorealisme, kita perlu memahami dulu asumsi dasar dan prinsip-prinsip utama dalam perspektif neorealisme.

Asumsi Dasar dan Prinsip Utama

Pandangan neorealisme memiliki beberapa asumsi dasar dan prinsip utama. Yang perlu diingat adalah, kemunculan neorealisme merupakan kritik terhadap pandangan realisme klasik. Menurut Waltz (1988, 615), kelemahan dasar teori realisme klasik adalah perhatian berlebihan pada aspek insidental dan peristiwa-peristiwa tak terduga. Oleh karenanya, teori mengenai politik internasional seharusnya hanya melihat hal-hal yang berulang secara terus-menerus. Dalam pandangan neorealisme, penekanan lantas diberikan pada arti penting struktur/sistem internasional yang tidak mudah berubah, konstan, dan memberikan tekanan pada aktor-aktor internasional (Mearsheimer, 2013).

Sejalan dengan realisme klasik, neorealisme juga memandang bahwa ciri khas politik internasional adalah adanya upaya untuk mencari dan berkompetisi memperebutkan kekuasaan (Dunne & Schmidt, 2014: 104). Namun, alih-alih menjelaskan melalui sifat dasar manusia

Neorealisme

(*human nature*), neorealisme berupaya menjelaskan gambar besar dari peta percaturan politik internasional.

Daripada menjelaskan perilaku masing-masing negara menurut kondisi masing-masing elitnya, neorealisme memilih untuk melihat kondisi sistemik dan struktural yang mendorong perilaku negara tersebut. Mengutip Booth (2011: 5), neorealisme menjelaskan kondisi sistem internasional (yang berisikan upaya *struggle for power*) sebagai hasil dari sebuah struktur dominan (yang anarkis) dengan menunjukkan dinamika relasi antarkomponen dalam sistem (negara sebagai unit utama), yang masing-masing berupaya untuk selamat dalam kompetisi internasional bercirikan pola distribusi kekuasaan khas (kemampuan unit).

Berdasarkan argumen Booth tersebut, maka ada 4 (empat) argumen utama neorealisme, yaitu penekanannya pada struktur internasional yang anarkis; negara dianggap sebagai aktor utama yang berprinsip satu-kesatuan; diwarnai dengan upaya masing-masing unit (negara) untuk mencari keselamatan diri (*survival*); serta adanya arti penting pola distribusi kekuasaan yang berdasarkan kemampuan/kapabilitas masing-masing unit (negara). Setiap asumsi utama ini dibahas mendalam pada masing-masing subbagian.

Supremasi Struktur Anarkis

Sejak Morgenthau (1950) mengutarakan idenya mengenai politik internasional, perdebatan dalam melihat politik internasional selalu terpusat untuk menganalisis negara sebagai aktor utama. Realisme klasik, yang menjadi perspektif utama pada saat itu, menganggap bahwa sumber perilaku negara (termasuk konsekuensi konflikturnya) adalah egoisme pemimpin politik negara (Rourke, 2009: 21). Konflik tidak dapat dihindari dalam politik internasional karena pada dasarnya semua manusia mempunyai sifat jahat yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Seperti diungkapkan

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

Booth (2011, 7), penulis-penulis besar dari perspektif realisme klasik (Hans J. Morgenthau, Reinhold Neibuhr, George F. Kennan, John H. Herz, dan Arnold Wolfers) menggunakan asumsi dasar “animus dominandi” dan “homo homini lupus” untuk menjelaskan bagaimana sifat dasar manusia yang “jahat” mendasari perilaku negara dalam sistem politik internasional yang penuh tragedi.

Analisis realisme klasik yang berfokus pada sifat dasar manusia sebagai pendorong perilaku negara ini menimbulkan permasalahan. Argumen bahwa permasalahan yang muncul dan kondisi politik internasional sekarang adalah hasil dari beberapa titik lemah negara (yang bila ditarik penjelasannya akan berakhir pada sifat alamiah manusia) memunculkan kesulitan bagi penstudi HI untuk menganalisis perilaku negara. Bagaimana bila ada negara yang memiliki aspek kultural berbeda? Benarkah setiap manusia memiliki hasrat yang sama untuk memperoleh kekuasaan? Kalau begitu kondisinya, bukankah seharusnya setiap manusia (dan negara) akan saling menyerang satu sama lain demi memperebutkan kekuasaan? Bagaimana lantas menjelaskan adanya kondisi ketiadaan perang (terutama sesudah berakhirnya Perang Dunia II) di level internasional?

Untuk itulah, neorealisme mencoba berangkat dari tradisi yang berbeda dengan realisme klasik. Bila realisme klasik lebih banyak membahas mengenai perilaku manusia dan agen (negara) yang mempengaruhi struktur internasional, neorealisme justru berfokus pada struktur internasional yang mempengaruhi perilaku aktor (negara). Dengan begitu, neorealisme terpengaruh juga oleh tradisi behavioralisme yang menginginkan ada teori dasar tentang perilaku negara yang bisa menjelaskan perilaku umum negara dalam semua kondisi.

Bagi neorealis, terutama Waltz, perilaku negara cenderung dipengaruhi oleh struktur internasional yang menjadi arena bagi politik internasional. Neorealisme juga

Neorealisme

melihat politik internasional sebagai *struggle for power*, namun neorealis lebih percaya bahwa perilaku negara yang cenderung konfliktual lebih dikarenakan struktur internasional yang anarkis daripada sifat dasar manusia yang konfliktual (James, 2002).

Bagaimana kita memahami sistem anarki yang dimaksudkan Waltz dan pemikir-pemikir neorealisme? Anarki, secara sederhana, dapat dimaknai sebagai ketiadaan otoritas tunggal dengan posisi di atas masing-masing aktor, sehingga pola interaksi antaraktor menjadi tidak teratur. Di level masyarakat domestik, institusi negara (dan pemerintahnya) menjadi satu upaya pembentukan otoritas tunggal yang menjamin keteraturan (*order*). Posisi negara, dalam pandangan realisme klasik, adalah sebagai *Leviathan* (monster dalam mitologi Yunani) yang memaksa manusia (secara individual) untuk mematuhi aturan-aturan yang ada agar tercipta keteraturan (Hobbes, 1981). Dengan begitu, kondisi yang anarkis bisa dihindarkan. Persoalannya, di level internasional, tidak ada otoritas tunggal yang lebih tinggi dari aktor negara. Inilah yang dimaksud dengan kondisi sistem/struktur internasional yang anarkis. Anarki disini tidak selalu identik dengan *chaos* dan ketidakteraturan. Mearsheimer (2013: 79) berargumen bahwa anarki pada dasarnya bentuk dari keteraturan. Anarki adalah absennya kekuasaan yang terpusat, artinya model keteraturan yang dimaksudkan bukan seperti politik domestik yang hierarkis (lawan dari anarki).

Konsekuensi dari sistem internasional yang anarkis ada 2 (dua). Konsekuensi pertama adalah tidak adanya otoritas yang mampu menjamin keamanan dari masing-masing negara. Menurut Rousseau (1750, dalam Dunne & Schmidt 2014: 103), kondisi sistem yang anarkis mendorong munculnya ketakutan, rasa saling curiga, dan perasaan tidak aman dari masing-masing aktor. Bayangkan kalau anda hidup di perumahan tanpa keberadaan polisi dan satuan pengamanan

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

(sebagai otoritas yang menjamin keamanan warga), sementara anda memegang asumsi bahwa setiap warga di perumahan memiliki niat jahat untuk menguasai harta benda tetangganya (*human nature* dan *struggle for power*). Suasana ketakutan dan saling curiga akan menjadi fitur umum dan utama dalam relasi antartetangga. Analogi ini yang juga terjadi, menurut neorealis, di level internasional, ketika saling curiga menjadi fitur hubungan antarnegara, bukan hanya karena sifat dasar manusia, melainkan karena ketiadaan otoritas.

Kondisi tersebut lantas memunculkan konsekuensi kedua, yaitu relevansi dari *self-help*, bahwa setiap negara harus menolong dirinya sendiri, agar tidak menjadi korban dari perilaku negara lain. Waltz (1979) berargumen bahwa kondisi anarki di dalam sistem internasional memaksa negara untuk melakukan apapun yang dibutuhkan untuk menjamin survivalitas negaranya, walaupun dengan konsekuensi peningkatan kemungkinan konflik antarnegara. Dalam argumen Waltz, negara akan dipaksa (oleh kondisi sistem yang anarki) untuk memaksimalkan keamanannya.

Setelah membicarakan asumsi dasar neorealisme mengenai arti penting sistem/struktur internasional yang anarkis, maka sebetulnya juga sudah tampak bahwa dalam pandangan neorealisme, negara adalah aktor utama dalam politik internasional. Persoalannya, bukan hanya aktor utama, negara dipandang berbeda dalam kerangka realisme klasik dan neorealisme. Seberapa berbeda pandangan soal negara ini dan apa konsekuensinya bagi perspektif ini? Pembahasan mengenai hal ini dibahas pada subbagian selanjutnya.

Negara sebagai Aktor Utama

Seperti telah disampaikan sebelumnya, neorealisme mengembangkan pandangannya terhadap fenomena hubungan internasional dari perspektif realisme klasik. Hal ini menyebabkan terdapat beberapa kesamaan antara

Neorealisme

realisme klasik dengan neorealisme. Dari sisi aktor, keduanya menganggap negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Negara adalah pusat organisasi kekuatan politik yang menjadi dasar hubungan internasional.

Neorealisme memiliki kesamaan asumsi dengan realisme klasik mengenai *realpolitik* atau upaya pencarian kekuasaan (*struggle for power*). Akan tetapi, realisme struktural tidak hanya melihat aspek “sifat dasar manusia” sebagai dasar perilaku negara.

Dinamika hubungan internasional ditentukan oleh negara-negara *superpower* sebagai aktor dominan (Mearsheimer, 2013: 79). Aktor-aktor dalam hubungan internasional baik aktor dominan maupun aktor lainnya berinteraksi dalam struktur yang anarki. Dalam neorealisme, negara sebagai aktor utama bergerak dalam merespon struktur internasional. Struktur internasional yang anarkis membuat negara menjadi curiga terhadap negara lainnya.

Pemahaman dasar dari neorealisme terhadap sifat dasar manusia yang konfliktual dihadapkan pada kondisi sistem internasional yang anarki membuat negara-negara mengalami kondisi saling curiga. Kecurigaan ini disebabkan oleh kesulitan untuk mengidentifikasi intensi dari perilaku suatu negara secara pasti (Mearsheimer, 2013: 79). Intensi atau niatan, adalah sesuatu yang sulit diukur dan dipastikan kebenarannya. Kondisi ketidakpastian seperti ini yang mendorong asumsi bahwa negara (aktor internasional) selalu ada pada posisi kewaspadaan tinggi sehingga mengedepankan peningkatan kapabilitas kekuatan atau kemampuan militernya.

Kecurigaan yang terjadi antarnegara tersebut salah satunya juga disebabkan oleh sifat negara yang rasional. Pengambilan keputusan yang terkait dengan negara selalu didasarkan pada pertimbangan strategis dan terukur. Mearsheimer (2013) menyatakan bahwa negara adalah aktor rasional yang bergerak berdasarkan tujuan untuk

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

keberlanjutan hidupnya dengan cara memaksimalkan kekuatannya demi mengamankan posisinya di dalam sistem internasional.

Upaya memastikan keberlanjutan hidup inilah yang sering menjadi sumber debat dalam neorealisme. Kemunculan realisme ofensif yang dibawa oleh John Mearsheimer misalnya, didasarkan pada argumennya bahwa tidak saja berupaya memaksimalkan keamanannya, negara juga akan berupaya memaksimalkan kekuatannya agar negara lain tidak bisa dan tidak berani bertindak agresif.

Sementara itu, Waltz dan para penstudi realisme defensif (seperti Stephen Walt) justru menekankan pada upaya maksimalisasi keamanan. Pembahasan khusus mengenai realisme ofensif bisa dilihat di subbagian “Perkembangan Neorealisme”. Walaupun ada perbedaan dalam hal upaya pencapaian posisi aman, namun neorealisme satu suara dalam memandang arti penting kapabilitas negara. Oleh karenanya, subbagian selanjutnya membahas asumsi dasar kapabilitas ini dengan lebih mendalam.

Kapabilitas Negara Dasar Pola Interaksi

Melanjutkan argumen dasar neorealisme mengenai kapabilitas negara sebagai dasar penciptaan keamanan (dan pencapaian kekuasaan), maka penting rasanya melihat aspek ini dengan lebih mendalam. Dalam struktur internasional yang anarkis, kapabilitas setiap negara dilihat dari seberapa besar kekuasaan/kekuatan yang dimiliki melalui kapasitas militer. Tidak terlalu penting melihat sistem politik negara, identitas atau ideologi negara, karena selama negara tersebut mempunyai kapasitas militer yang kuat, maka dia adalah aktor dominan dalam politik internasional. Neorealisme menganggap semua negara akan berperilaku sama di hadapan struktur internasional yang anarkis. Tidak ada lagi negara kapitalis, negara

Neorealisme

komunis, negara baik atau jahat; yang ada hanya negara kuat atau lemah yang diukur berdasarkan kapabilitas militernya.

Neorealisme berpandangan bahwa dalam struktur yang anarkis dan dihadapkan dengan kebutuhan untuk mempertahankan survivalitas negara, maka harus ada lebih dari satu aktor *superpower* dalam politik internasional (Mersheimer, 2013: 85). Tujuannya adalah untuk membentuk keseimbangan kekuatan (*balance of power*). Keseimbangan kekuatan, dalam pandangan neorealis, adalah kondisi ketika terdapat lebih dari satu aktor *superpower* yang menjadi penentu dinamika sistem internasional. Menurut Waltz (1979, 121), keseimbangan kekuatan bisa diwujudkan ketika ada 2 (dua) aspek yang terpenuhi, yaitu kondisi tatanan yang anarkis, dan tatanan tersebut berisikan unit/aktor yang ingin selamat dari ancaman.

Ide dasar dari keseimbangan kekuatan adalah *meeting force with force*, artinya keadaan seimbang akan tercapai bila terdapat dua kekuatan yang esensinya berimbang lantas saling bertemu. Logika sederhananya adalah bila aktor pemilik kekuatan tersebut saling serang maka kemungkinan untuk menang maupun kalah adalah 50:50 atau kemungkinan menang dan kalah sama-sama imbang. Dengan berangkat pada logika sederhana tersebut, maka aktor pemilik kekuatan yang berimbang tentunya akan memilih untuk tidak saling serang. Konsekuensinya adalah ketika negara (aktor internasional) ingin menggunakan kekuatan yang dimilikinya, maka secara otomatis akan ada suatu batasan dalam wujud kekuatan negara lain sebagai tandingan untuk membatasi, mengontrol, dan mengoreksi penggunaan kekuatan tersebut. Analogi sederhana yang bisa digunakan adalah, ketika di dalam sebuah lingkungan desa ada 10 (sepuluh) keluarga yang saling bersaing, maka kondisi keseimbangan kekuatan hanya bisa terjadi bila ada 2 (dua) keluarga utama yang jauh lebih kuat (secara ekonomi dan kemampuan persenjataan)

dibandingkan yang lain. Kedua keluarga ini lantas akan saling membatasi perilaku masing-masing dan perilaku keluarga lain karena bila sampai ada yang macam-macam, maka kemampuan salah-satu ataupun kedua keluarga ini cukup untuk membunuh pihak yang macam-macam tadi. Tatanan seperti inilah yang dibayangkan kelompok neorealis terjadi di level internasional.

Bagaimana lantas kita bisa menciptakan kondisi aman melalui keseimbangan kekuatan ini? Konsep ini mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat tercipta suatu keseimbangan yang ideal. Misalnya, adanya aktor-aktor politik yang berdaulat, artinya dalam suatu keseimbangan kekuatan, aktor-aktor yang terlibat harus berdaulat baik sebagai pihak yang dominan maupun pihak minoritas. Yang kedua adalah adanya distribusi kekuasaan yang relatif tidak seimbang. Persebaran kekuasaan yang tidak merata ini menyebabkan munculnya pihak mayoritas yang hegemon dan munculnya pihak yang kurang memiliki kemampuan sebagai pihak minoritas sehingga dapat diklasifikasikan menurut kapasitas kekuatan yang dimilikinya. Kondisi distribusi kekuasaan yang asimetris ini penting, karena bila banyak aktor yang terlibat memiliki kekuatan yang sama, maka yang ada adalah ketidakstabilan.

Selanjutnya, adalah persaingan dan konflik yang berkesinambungan. Hal ini berguna sebagai pemicu terjadinya kerjasama antar-aktor dalam kapasitas dan perannya sebagai pemilik kekuatan. Yang terakhir adalah pemahaman implisit antara pemimpin negara besar bahwa keberlanjutan dan kestabilan distribusi kekuatan yang ada akan menguntungkan mereka. Pemahaman ini bertujuan agar pemimpin negara sebagai otoritas tertinggi pengambil keputusan suatu negara dapat mengetahui keuntungan – keuntungan yang akan mereka dapatkan ketika membangun aliansi dengan negara-negara lain, yang dalam kriteria

Neorealisme

kekuatan mungkin berada di bawah mereka.

Namun, meskipun secara umum terlihat adanya dominasi, konsep keseimbangan kekuatan ini bertujuan untuk memelihara stabilitas internasional melalui pola penguasaan kekuatan antaraliansi atau kutub (*polar*) (Couloumbis, 1986). Contoh utama yang digunakan para penstudi neorealis adalah kontestasi Perang Dingin yang terjadi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Saat itu konstelasi internasional mengindikasikan adanya sistem bipolar yang berpusat pada Uni Soviet dan Amerika Serikat yang dianggap mempunyai kekuatan yang seimbang dan mampu menjadi pengontrol bagi satu sama lain.

Bagi Waltz (1964), sistem bipolar yang terjadi di era Perang Dingin adalah sistem yang paling stabil. Kestabilan ini, menurut Waltz, didasarkan pada 4 (empat faktor). Pertama, keberadaan hanya 2 (dua) kekuatan besar saat itu (AS dan USSR) menyebabkan ketiadaan kelompok periperi. Setiap insiden akan selalu melibatkan kedua kekuatan besar ini, dan kekuatan yang berimbang antara keduanya menyebabkan masing-masing tidak bertindak gegabah serta mempertahankan kestabilan sistem yang ada (karena takut akan diserang oleh pihak lainnya). Kedua, semakin banyaknya faktor yang ikut berpengaruh dalam kontestasi antarnegara *superpower* lantas menyebabkan semakin tidak relevannya perubahan di level nasional dan sistemik, karena kedua negara berfokus pada negara pesaingnya. Di sisi lain, semakin tingginya intensitas konflik antara AS dan Soviet juga memunculkan krisis yang berkelanjutan. Namun, sebagai faktor ketiga, Waltz justru berargumen bahwa krisis yang muncul berkelanjutan menyebabkan tiap negara tetap waspada dan justru berkontribusi positif pada kestabilan sistemnya. Ketiga aspek ini, mulai dari ketiadaan negara periperi, semakin tingginya intensitas konflik dan faktor yang terkait, serta seringnya tekanan dan krisis terjadi, bisa digabungkan dengan faktor keempat yaitu tingginya dominasi kekuatan dua negara

besar, menyebabkan keseimbangan yang diprediksikan akan bertahan lama sampai akhir abad 20 (Waltz, 1964).

Problemnya, apakah keseimbangan kekuatan hanya dapat terjadi dalam sistem bipolar? Bagaimana kalau negara besar yang terlibat lebih dari 2 (dua)? Ada satu tambahan menarik dari Mearsheimer (2013). Ia menuliskan bahwa beberapa penstudi neorealisme berargumen bahwa keseimbangan kekuatan (*balance of power*) tidak harus muncul dalam situasi bipolar. Dalam pandangan mereka, situasi multipolar (dengan banyak negara *superpower*) berpotensi menghasilkan situasi yang lebih aman. Ini didasarkan pada argumen bahwa upaya-upaya penggentaran (*deterrence*) lebih mungkin dilakukan dalam situasi multipolar, karena upaya penyeimbangan akan lebih mudah dilakukan dengan banyak peserta. Berbeda dengan argumen realisme defensif, walaupun mengakui bahwa terkadang tidak efektif, realisme ofensif percaya bahwa dalam jangka panjang kemungkinan keberhasilan upaya penggentaran dan penyeimbangan akan lebih sukses (seperti dalam kasus Prancis era Napoleon dan Jerman era Nazi). Selain itu, Mearsheimer (2013) juga berargumen bahwa di dalam situasi yang multipolar, maka konsentrasi tiap negara akan terpecah, tidak hanya pada aktor besar lainnya. Kondisi yang kompleks macam ini diasumsikan justru bisa mencegah konflik. Pandangan ini agak berbeda dengan Waltz, yang menekankan arti penting menghilangkan kompleksitas dari sistem internasional.

Bagaimana lantas runtuhnya stabilitas era Perang Dingin bisa dijelaskan oleh pandangan neorealisme? Di sinilah lantas perkembangan pemikiran neorealisme (atau realisme struktural) menemukan arti pentingnya. Subbagian berikutnya berbicara mengenai adanya perkembangan dari dua varian utama neorealisme, lantas dilanjutkan dengan kritik besar terhadap neorealisme sesudah berakhirnya stabilitas bipolar Perang Dingin.

Perkembangan Pemikiran Neorealisme

Defensive Structural Realism

Neorealisme defensif merupakan konsep besar dengan banyak varian argumen di dalamnya. Pandangan ini didasarkan pada argumen Robert Jervis (1978) mengenai dilema keamanan (*security dilemma*) dan argumen Waltz (1979) mengenai konsep keseimbangan kekuatan (*balance of power*). Secara umum realisme defensif menyatakan bahwa sistem internasional memang memberi ruang kepada negara untuk melakukan perilaku agresif. Dalam asumsi realisme defensif, kondisi sistem yang anarkis memberi ruang bagi negara-negara *superpower* untuk meningkatkan kondisi keamanannya. Kondisi ini, secara tidak langsung, menurunkan kualitas keamanan di negara-negara lainnya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa naiknya kualitas keamanan di negara A (yang ditandai dengan peningkatan kapasitas militer) akan berdampak terhadap menurunnya kualitas keamanan di negara lainnya (muncul kondisi terancam). Konsep tersebut yang oleh Jervis (1978) disebut sebagai kondisi dilema keamanan (*security dilemma*).

Dilema keamanan menyebabkan adanya kecurigaan antarnegara mengenai keselamatan dirinya di masa depan, niat/intensi dari setiap perilaku negara, dan kapabilitas kekuatan (militer) yang dimiliki oleh setiap negara. Di satu sisi, negara mungkin tidak bermaksud untuk mengancam negara lain, hanya melakukan langkah strategis untuk mencapai posisi-posisi internasional tertentu melalui peningkatan kualitas militer. Persoalannya, meneruskan argument Jervis, kondisi ini bisa dipandang sebagai ancaman oleh negara lain.

Dalam pandangan realisme defensif, negara cenderung mengeluarkan kebijakan yang agresif karena pengambil kebijakan dalam negara cenderung mempunyai pemahaman bahwa bersikap agresif adalah satu-satunya cara untuk memastikan keamanan dan keselamatan negara. Realisme

defensif tidak sepenuhnya sepakat dengan pandangan tersebut. Solusi yang diajukan adalah dengan mengambil kebijakan yang cenderung moderat, tidak selalu agresif dan tidak selalu pasif, sebagai cara paling efektif untuk menjamin kondisi keamanan dan survivalitas negara. Realisme defensif menyatakan bahwa negara-negara *superpower* seharusnya lebih membatasi diri untuk tidak secara sporadis mengejar kekuatan melalui kebijakan militer, diplomasi, dan ekonomi. Pandangan tersebut merupakan kritik terhadap realisme klasik yang mengatakan bahwa perilaku negara harus selalu agresif untuk menjamin survivalitas negara. Konsep-konsep kunci dalam realisme defensif antara lain: *offense-defence theory* yang disampaikan oleh Robert Jervis, Stephen Van Evera, Sean Lynn-Jones, dan Charles Glaser; *balance-of-power theory* yang disampaikan oleh Barry Posen dan Michael Mastanduno; *balance-of-threat theory* oleh Stephen Walt; *domestic mobilization theories* oleh Jack Snyder, Thomas Christensen, dan Aron Friedberg; serta *security dilemma theory* oleh Thomas Christensen, Robert Ross, dan William Rose.

Pada kuadran realisme defensif, Jervis dan Van Evera sering diasosiasikan sebagai pendukung argumen-argument Waltz. Jervis (1978) berargumen bahwa negara harus menyeimbangkan antara strategi ofensif dan defensif, namun faktanya strategi ofensif sebenarnya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan negara bertahan dari ancaman eksternal. Pandangan Jervis tersebut mengindikasikan keberpihakannya terhadap posisi realisme defensif yang menekankan pembatasan kekuatan/kekuasaan dari aktor internasional (negara). Selanjutnya, Jervis (1978) juga menjelaskan pentingnya strategi ofensif untuk tujuan defensif dalam kaitannya dengan dilema keamanan yang terjadi di dalam struktur internasional. Negara mempunyai kecenderungan untuk bertindak ofensif terhadap negara lainnya dengan alasan meningkatkan keamanan. Di sisi lain negara juga mempunyai kecurigaan terhadap negara lain

Neorealisme

karena seringkali intensi negara dalam melakukan tindakan di level internasional tidak dapat diidentifikasi dengan jelas.

Menggunakan dasar pemikiran yang sama dengan Jervis, Van Evera (1999) berargumen bahwa pada titik tertentu negara harus mengambil strategi yang agresif untuk mencegah terjadinya agresi di masa yang akan datang. Menurut Van Evera, argumen tersebut cocok bila dijalankan oleh negara yang tidak secara alami mempunyai wilayah geografi yang mampu melindungi dari serangan negara lain. Kedua penstudi tersebut sama-sama menggunakan realisme defensif sebagai pijakan untuk argumentasinya.

Salah satu penstudi realisme defensif yang juga memunculkan konsepsi baru adalah Stephen Walt. Walt memfokuskan studinya pada aliansi antar negara. Argumen utama Walt adalah mengenai *Balance of Threat*. Walt (1985) berargumen bahwa respon aliansi antar negara tergantung terhadap persepsi ancaman yang dilihat dari perilaku negara lain. Negara, menurut Walt, akan memilih beraliansi ketika muncul persepsi ancaman yang sama dengan negara lain untuk mengimbangi besarnya ancaman (*threat*) yang dilakukan lawan. Dalam pandangan Walt, negara yang beraliansi biasanya memiliki kapasitas kekuatan yang hampir seimbang untuk sampai pada prinsip penyeimbangan (*balancing*). Namun ketika muncul potensi ancaman, negara-negara yang relatif lemah juga akan memilih bergabung dengan aliansi negara kuat walaupun pengorbanan yang harus dilakukan cukup besar. Selama harga untuk melakukan perlawanan terhadap ancaman negara kuat lebih besar dari keuntungan yang potensial didapatkan, negara lemah akan melakukan pengikutan (*bandwagoning*) dengan bergabung dengan aliansi negara-negara kuat. Walaupun pada titik tertentu pengorbanan yang harus dilakukan tidak sedikit, misalkan wilayahnya digunakan untuk pos-pos militer oleh negara *superpower* atau sumber daya alamnya dieksploitasi, namun Walt berargumen bahwa negara tetap

akan memilih untuk mengikuti (bandwagon) negara besar bila dihadapkan pada potensi kerugian yang lebih besar (bila mencoba menyeimbangkan). Aliansi negara-negara Eropa untuk menghadapi ekspansi Jerman pada perang dunia satu dan perang dunia dua menjadi titik analisis Walt dalam argumennya mengenai *Balance of Threat*.

Varian realisme defensif ini pada akhirnya menekankan bahwa negara tidak seharusnya melakukan maksimalisasi kekuatan, tapi hanya mencari kekuatan yang “tepat/pas” (Waltz, 1979: 40). Apabila ada negara yang terlalu kuat, maka negara lain akan melakukan penyeimbangan (*balancing*) yang justru mendorong konflik semakin besar antarpihak. Oleh karenanya, sejalan dengan argument van Evera mengenai keseimbangan serangan-pertahanan (*offence-defence balance*), maka pertahanan menjadi opsi yang lebih rasional, bahwa menyerang lebih menguras sumberdaya daripada bertahan, sehingga negara yang diasumsikan rasional akan membatasi diri agar tidak menciptakan konflik besar.

Offensive Structural Realism

Berbeda dengan realisme defensif, realisme ofensif melihat sistem internasional yang anarkis serta tidak adanya otoritas berdaulat di atas negara memang mendorong negara untuk menerapkan kebijakan yang agresif sehingga tercipta kondisi konfliktual dalam struktur internasional yang anarki. Pandangan realisme ofensif juga diadaptasi dengan beberapa modifikasi dari pandangan Waltz. Perbedaan mendasar dengan realisme defensif adalah bahwa pandangan realisme ofensif menganggap ekspansi militer adalah kunci jika negara ingin menjamin keamanan dan survivalitas negaranya ditengah struktur internasional yang anarki. Berbeda dengan realisme defensif yang menekankan aspek keamanan negara, realisme ofensif yang dibawa oleh John Mearsheimer justru menekankan arti penting maksimalisasi kekuatan negara.

Neorealisme

Dalam bukunya “The Tragedy of Great Power Politics”, Mearsheimer (2001) berargumen bahwa perbedaan mendasar antara realisme defensif dan ofensif ada pada pertanyaan mendasar soal “how much power is enough?”. Dalam bahasa yang lebih sederhana, untuk menciptakan rasa aman bagi negara, seberapa kuat seharusnya negara itu? Menurut realisme defensif, bila negara terlalu memaksimalkan kekuatannya, maka sistem yang akan menghukum negara tersebut dengan mendorong negara lain untuk bertindak sama, yang pada akhirnya akan memicu konflik (Waltz, 1979). Realisme ofensif justru berpendapat bahwa negara seharusnya memaksimalkan kemampuannya dan, bila saatnya tepat, mengejar posisi hegemonis (Mearsheimer, 2001). Mengapa begitu? Karena realisme ofensif mengedepankan kemampuan negara untuk selamat (survivalitas) sebagai prioritas utama, dan keselamatan hanya bisa dicapai bila negara tersebut mampu memaksa negara lain agar tidak bisa mengancam (dengan memaksimalkan kekuatannya).

Berdasarkan prinsip tersebut, semua negara dalam pandangan realisme ofensif akan berlomba-lomba memaksimalkan kekuatan untuk menjamin survivalitas negaranya. Negara akan mengeluarkan kebijakan yang agresif dan ekspansif pada semua kesempatan selama keuntungan yang akan didapatkan diprediksi melampaui pengorbanan yang harus dikeluarkan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya negara menghadapi ancaman yang sama di setiap tempat, yakni absennya otoritas berdaulat di atas negara menyebabkan kekhawatiran akan mendapat serangan dari negara lain. Kondisi ini kemudian memaksa negara untuk meningkatkan kemampuan/kekuatannya dengan melakukan penambahan persenjataan, diplomasi unilateral, penerapan sistem ekonomi merkantilisme dan ekspansi secara agresif ke negara lain. Tujuan akhirnya adalah setiap negara akan berlomba menjadi negara hegemon, setidaknya di level regional dan pada akhirnya di level global.

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

Dalam pandangan realisme ofensif, negara tidak akan melakukan penyeimbangan (*balancing*) bila dihadapkan pada kekuatan yang terlalu besar. Daripada melakukan aliansi (seperti argument Walt) demi menyeimbangkan posisi, yang biasa dilakukan justru melempar tanggungjawab (*buck-passing*) pada negara lain agar melakukan penyeimbangan. Realisme ofensif juga tidak sependapat dengan Van Evera mengenai arti penting bertahan. Mearsheimer (2001) berargumen bahwa negara yang memulai peperangan biasanya justru mampu memenangkannya, sehingga mampu mengamankan dirinya sendiri.

Para penstudi realisme ofensif terbagi dalam dua kutub pemikiran, yakni pemikir yang percaya terhadap *balance of power* seperti John Mearsheimer, Eric Labs, Fareed Zakaria, Kier Lieber, dan Christopher Layne. Di sisi lain terdapat penstudi yang lebih cenderung menggunakan *hegemonic stability theory* seperti Robert Gilpin, William Wohlforth, and Stephen Brooks.

Dalam kuadran realisme ofensif, beberapa nama seperti Robert Gilpin menjadi pendukung argumen Mearsheimer. Robert Gilpin melalui bukunya “War and Change in World Politics” (1981) berargumen bahwa dinamika sistem internasional terletak pada siapa yang diuntungkan dan tidak diuntungkan dari sistem internasional. Pihak yang tidak diuntungkan akan secara aktif berusaha mengubah sistem internasional. Dalam pandangan Gilpin (1981) terdapat lima argumen utama, antara lain: (1) sistem internasional akan stabil jika tidak ada negara yang menganggap perubahan sistem internasional akan menguntungkan dirinya; (2) negara akan berusaha secara aktif mengubah sistem internasional jika keuntungan yang bisa diprediksi melebihi pengorbanan dan usaha yang harus dikalkulasi; (3) negara akan berusaha melakukan perubahan sistem internasional melalui penguasaan wilayah, hegemoni politik, dan ekspansi ekonomi sampai pada titik ketika keuntungan dari perubahan

Neorealisme

sistem (*marginal costs*) lebih besar dari kepuasan negara (*marginal benefits*) terhadap perubahan sistem; (4) ketika titik keseimbangan antara usaha dan keuntungan dari perubahan sistem internasional tercapai, negara cenderung memilih untuk mempertahankan status quo yang didasari oleh pertimbangan ekonomi; (5) Jika ketimpangan terhadap distribusi kekuatan dalam sistem internasional tidak dapat diselesaikan, perubahan sistem internasional akan terjadi. Gilpin, walaupun masih bisa dikaitkan dengan realisme ofensif, sebenarnya bisa dianggap mewakili varian lain dalam realisme, yaitu *rise and fall realism*.

Penutup

Persoalan mendasar terkait pandangan neorealisme atau realisme struktural adalah fokusnya pada struktur sistem internasional. Seperti yang diutarakan Waltz (1979), teori neorealisme masih perlu dukungan dari teori-teori lain untuk menjelaskan politik luar negeri negara yang justru seringkali berlawanan dengan analisis neorealis (terutama realisme defensif). Seperti yang diutarakan Mearsheimer (2013), realisme defensif biasanya berargumen bahwa ada aspek domestik (non-rasional) yang menjelaskan perilaku “menyimpang” negara seperti Jerman dan Jepang ketika memutuskan menginvasi negara lain dan memulai Perang Dunia.

Apa lantas yang dilakukan para penstudi neorealis? Mereka menggunakan argumen di level yang lebih rendah untuk menjelaskan irasionalitas negara. Barry Posen (1984) misalnya, menggunakan teori organisasi, Jack Snyder (1991) menggunakan dinamika politik domestik, sementara Van Evera (1999) menggunakan prinsip militarisme dalam negara. Sayangnya, penstudi realisme ofensif seperti Mearsheimer (2013) justru menganggap bahwa kecenderungan pola interaksi negara saat ini mengikuti preposisi dari realisme

ofensif, sehingga nyaris tidak perlu ada tambahan teori soal politik luar negeri.

Sebagaimana diutarakan Dunne & Schmidt (2014), kemunculan realisme neoklasik adalah upaya sebagian penstudi realisme untuk menjawab tantangan terkait keberadaan kasus-kasus yang tidak bisa dijelaskan oleh realisme defensif dan ofensif. Bila sebelumnya para penstudi neorealisme berargumen bahwa diperlukan penjelasan lain, atau bahkan tetap berpegang teguh pada aspek struktural, maka tokoh-tokoh realisme neoklasik seperti Schweller (1996) berargumen bahwa peneliti seharusnya memperhatikan kembali argumen dasar realisme klasik mengenai kemungkinan perbedaan antarnegara. Jadi, daripada memosisikan negara sebagai unit yang serupa dan merupakan satu kesatuan, Schweller (2004) menunjukkan bahwa perilaku politik luar negeri/politik internasional negara didasarkan pada pilihan-pilihan domestik. Dalam konteks ini, Schweller mencoba mengembalikan jiwa dasar realisme klasik ke dalam pemikiran neorealisme.

Problem yang muncul dari upaya-upaya untuk mengembalikan kemampuan dasar neorealisme menjelaskan persoalan ini ternyata justru menguatkan argumen bahwa realisme dan neorealisme memang tidak lagi mampu menjelaskan fenomena internasional. Seperti argumen Legro & Moravcsik (1999), semakin kuat dan mendetail argumen-argumen teoritik dari para penstudi realisme (dan neorealisme) kontemporer, maka justru menunjukkan bahwa teori dan pandangan mereka bukan lagi pandangan realis/neorealis. Di titik ini, rasanya kita perlu mengingat kembali argumen awal Waltz (2000) bahwa argumen dasar neorealisme adalah arti penting struktur internasional dalam mengondisikan perilaku negara. Sebagaimana Waltz sudah berargumen, neorealisme tidak sedang mencoba menjelaskan kebijakan luar negeri masing-masing negara, melainkan mencoba menjelaskan perilaku umum negara di

Neorealisme

level sistemik. Sebagaimana argumen Mearsheimer (2013), upaya melakukan revisi terhadap teori dasar neorealisme (seperti yang dilakukan oleh realisme defensif dan neoklasik) justru mengurangi kemampuan penjelas dari neorealisme. Oleh karenanya, rasanya perlu bagi kita untuk menempatkan neorealisme sesuai dengan karakter dan fungsi utamanya, yaitu melihat level sistemik saja, dan menyerahkan penjelasan fenomena anomali kepada pendekatan lain.

Daftar Pustaka

- Booth, Ken, (2011), “Realism redux: contexts, concepts, contests”, dalam Booth, Ken, *Realism and World Politics*, (ed.), Routledge.
- Coulombis, Theodore A. & Wolfe, James H., (1986), *Pengantar hubungan Internasional: Keadilan dan Power*, Prentice- Hall Inc.
- Dunne, Tim & Schmidt, Brian C., (2014), “Realism”, dalam John Baylis, *et al*, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, (ed.), 6th edition, Oxford University Press.
- Evera, Stephen Van, (1999), *Causes of War: Power and the Roots of Conflict*, Cornell University Press.
- Gilpin, Robert, (1981), *War and Change in World Politics*, Cambridge University Press.
- Hobbes, Thomas, (1981), *Leviathan*, Penguin Books.
- James, Patrick, (2002), *International Relations and Scientific Progress: Structural Realism Reconsidered*, Ohio State University Press.

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

Jervis, Robert, (1978), "Cooperation under the Security Dilemma", *World Politics*, 30(2), 167-214.

Legro, Jeffrey W. & Moravcsik, Andrew, (1999), "Is Anybody Still a Realist?", *International Security*, 24(2), 5-55.

Mearsheimer, John J., (2001), *The Tragedy of Great Power Politics*. W.W. Norton.

_____, (2013), "Structural Realism", dalam, **Tim** Dunne, *et al*, (2013), *International Relations Theories: Discipline and Diversity*, (eds.), 3rd edition, Oxford University Press.

Morgenthau, Hans J., (1950), *Politics Among Nations*, McGraw-Hill.

Posen, Barry, (1984), *The Sources of Military Doctrine France, Britain, and Germany Between the World Wars*, Cornell University Press.

Rourke, John T., (2009), *International Politics on The World Stage*, McGraw-Hill International Edition.

Schweller, Randall L., (1996), "Neorealism's status quo bias: What security dilemma?", *Security Studies*, 5 (3), 90-121.

_____, (2004), "Unanswered Threats: A Neoclassical Realist Theory of Underbalancing", *International Security*, 29 (2), 159-201.

Snyder, Jack, (1991), *Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition*, Cornell University Press.

Walt, Stephen M., (1985), "Alliance Formation and the Balance of World Power", *International Security*, 9 (4): 3-43.

Waltz, Kenneth, (1959), *Man, The State and War*, Columbia University Press.

_____, (1964), "The Stability of a Bipolar World", *Daedalus*,

Neorealisme

93 (3), 881-909.

_____, (1979), *Theory of International Politics*, McGraw Hill.

_____, (1988), "The Origins of War in Neorealist Theory",
The Journal of Interdisciplinary History, 18 (4), 615-628.

_____, (2000), "Structural Realism after the Cold War",
International Security, 25 (1), 5-41.

<<<<>>>>

Bab 5

Neoliberalisme

Vinsensio Dugis

Pengantar

Neoliberalisme adalah salah satu pendekatan teoritik atau perspektif utama dalam Hubungan Internasional yang menitikberatkan pada konsep rasionalitas dan perikatan atau *contracting* (Martin, 2007: 110). Ditilik dari sejarah kehadirannya, neoliberalisme merupakan salah satu varian turunan dari perspektif liberalisme yang hadir dan telah berkembang sebagai pesaing (*contender*) utama perspektif neorealisme. Sebagaimana telah disinggung pada Bab 3, empat turunan dari perpekstif liberalisme masing-masing adalah liberalisme republican (*republican liberalism*), liberalisme sosiologi (*sociological liberalism*), liberalisme interdependen atau komersial (*interdependence/commercial liberalism*), dan liberalisme institusional (*institutional liberalism*). Varian terakhir ini juga disebut *neoliberal institutionalism* atau lebih dikenal dengan neoliberalisme (*neoliberalism*).

Mengutip Steven Lamy (2001: 189), banyak penstudi menganggap neoliberalisme penantang (*challenger*) paling meyakinkan terhadap cara berpikir *power-politics* dari tidak saja kaum realis tetapi juga neorealis. Kegagalan perspektif realis dan terutama neorealis memprediksi berakhirnya Perang Dingin secara damai mengakibatkan ketidakpuasan terhadap kedua perspektif ini, dan selanjutnya mendorong munculnya wacana kebutuhan akan adanya perspektif lain yang dapat memberikan alternatif penjelasan. Di dalam situasi inilah perspektif neoliberalisme hadir memberi kri-

itik terhadap neorealisme dan menawarkan sejumlah prinsip mengenai anarki dan struktur sistem internasional serta preskripsi tentang bagaimana perdamaian dapat dicapai (Kegley & Wittkopf, 1997: 30-35).

Bab ini mengupas tentang sejarah kehadiran neoliberalisme sebagai salah satu perspektif teoritik dalam kajian Hubungan Internasional, asumsi dan prinsip-prinsip dasarnya tentang anarki dan pengaruh struktur sistem internasional terhadap perilaku negara, perdebatan dengan neorealisme dan agenda-agenda penting dalam hubungan internasional, serta bagaimana neoliberalis menawarkan preskripsi mengenai stabilitas dan perdamaian internasional.

Kemunculan Neoliberalisme

Sebagaimana disinggung di bagian pengantar, neoliberalisme hadir mengisi ruang ‘kegagalan’ neorealisme yang samasekali tidak memprediksi bahwa Perang Dingin dapat berakhir ‘secara damai’. Menghadapi fenomena berakhirnya Perang Dingin melalui jalan damai ini, para penstudi hubungan internasional tidak saja menerima kenyataan gagalnya neorealisme memprediksi, tetapi juga menilai ‘ketidacukupannya’ lagi untuk memberikan penjelasan terhadap perubahan sosial internasional secara umum (Kegley & Wittkopf, 1997: 30). Robert Jervis (1992) secara eskplisit menulis seusai Perang Dingin berakhir, bahwasanya pendekatan realisme dan neorealisme tidak lagi cukup menjadi penuntun untuk dapat menjelaskan masa depan politik internasional, dan inilah bukti kegagalan realisme (Lebow, 1995). Agenda-agenda internasional yang semakin meluas seusai Perang Dingin tidak lagi semuanya dapat dijangkau melalui penjelasan-penjelasan *power-politics* neorealisme (Scholte, 1993). Singkatnya, neorealisme dianggap sebagai perspektif yang sedang mengalami krisis (James, 1993) sehingga ada kebutuhan untuk mendapatkan perspektif lain yang lebih relevan

Neoliberalisme

dengan perubahan situasi politik global setelah berakhirnya Perang Dingin.

Di dalam situasi ini, ada sejumlah penstudi yang menganjurkan perlunya melihat kembali premis-premis dasar liberalisme yang sebelumnya sempat kehilangan pengaruh akibat dominasi perspektif realisme untuk dikembangkan sebagai alternatif pengisi ruang ‘ketidacukupan’ neorealisme pasca Perang Dingin. David Little (1993) dengan karyanya ‘The Recovery of Liberalism’ mengadvokasi perlunya melahirkan kembali ide-ide liberalisme. Sementara itu, pemimpin-pemimpin dunia ketika itu secara terbuka mulai menyatakan perlunya mengatasi persoalan-persoalan global melalui bentuk-bentuk kerjasama sebagaimana preskripsi dari sejumlah varian perspektif liberalisme semenjak tahun 1940-an. Dengan begitu, maka pada tahun 1990-an neoliberalisme muncul dan hadir sebagai satu perspektif baru yang memfokuskan diri pada cara-cara melalui mana organisasi internasional dan aktor-aktor non-negara dapat mempromosikan kerjasama internasional.

Meskipun kemunculannya baru pada tahun 1990-an, prinsip dan dalil-dalil utama neoliberalisme berkembang secara bertahap sesuai berakhirnya Perang Dunia II melalui teori-teori yang mengkaji tentang pentingnya kerjasama internasional. Pada tahun 1940-an hingga awal 1950-an, prinsip dan dalil-dalil neoliberalisme tumbuh dalam teori integrasi fungsional. Selanjutnya berkembang melalui teori neofungsionalis integrasi regional pada tahun 1950-an dan 1960-an, serta semakin meluas melalui teori interdependensi pada tahun 1970-an (Grieco, 1988: 486). Adapun prinsip yang terus berkembang pada tiga generasi teori pendahulu neoliberalisme ini ialah, menolak prinsip realisme yang melihat negara sebagai satu-satunya aktor hubungan internasional dan menekankan pentingnya kehadiran aktor-aktor non-negara, sementara dalil utama yang terus dikemukakan ialah tentang pentingnya peran institusi-institusi internasi-

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

onal dalam membantu negara untuk bekerjasama (Grieco, 1988: 486).

Di era 1980-an, preskripsi-preskripsi mengenai pentingnya institusi-institusi internasional sebagai media kerjasama negara dalam rangka mencapai stabilitas dan perdamaian internasional terus dipublikasikan dalam berbagai karya seperti misalnya oleh Arthur Stein (1983), Robert Axelrod (1984), Robert Keohane (1984), Robert Axelrod dan Robert Keohane (1985), Charles Lipson (1984). Para penulis ini umumnya berargumen bahwa meskipun mereka sepakat dengan kaum realis dan neorealis yang melihat situasi anarki sistem internasional sebagai penghambat kemauan negara untuk bekerjasama, negara pada prinsipnya tetap saja dapat bekerjasama, terutama dengan dan melalui bantuan kehadiran berbagai institusi internasional. Sebagai contoh, Axelrod dan Keohane (1985: 226) menulis:

Cooperation is not equivalent to harmony. Harmony requires complete identity of interests, but cooperation can only take place in situations that contain a mixture of conflicting and complementary interests. In such situations, cooperation occurs when actors adjust their behaviour to the actual or anticipated preferences of others. Cooperation, thus defined, is not necessarily good from a moral point of view.

Argumen serupa dikemukakan dan ditekankan kembali oleh Arthur Stein (2008) dengan menunjuk proliferasi institusi internasional pada berbagai wilayah di dunia yang dikatakannya sebagai bukti pentingnya kehadiran institusi sebagai media kerjasama negara. Di awal karyanya, Arthur Stein (2008: 201) menulis;

International politics today is as much institutional as intergovernmental. International institutions can be found in every functional domain and in every region in the world. Modern reality consists of an alphabet soup of institutions, that includes the United

Neoliberalisme

Nations (UN), World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF), Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), International Atomic Energy Agency (IAEA), Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Missile Technology Control Regime (MTCR), European Union (EU), Shanghai Cooperation Organization (SCO), Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), North Atlantic Treaty Organization (NATO), North American Free Trade Agreement (NAFTA), Gulf Cooperation Council (GCC), and so on.

Asumsi Dasar dan Prinsip Utama

Sebagaimana disinggung di bagian pengantar, pandangan neoliberalisme hadir mengisi ‘ketidackukupan’ neorealisme yang terlampau bertumpu pada dasar pijakan *power-politics* di dalam menyediakan penjelasan teoritik dan menawarkan preskripsi. Untuk itu tentu neoliberalisme mempunyai prinsip utama dan asumsi dasar sebagai titik tolak penjelasan teoritik serta dasar pengajuan preskripsinya. Oleh karena hadir sebagai kritik terhadap neorealisme, maka tak terelakkan adanya kemiripan dalam beberapa aspek antara neoliberalisme dan neorealisme. Rasionalitas sebagai pijakan berpikir dasar adalah satu elemen yang mirip antara neorealisme dan neoliberalisme, tetapi yang terakhir ini mengarahkan perhatian kita kepada peranan sentral institusi dan organisasi di dalam percaturan politik global (Martin, 2007: 110).

Prinsip utama yang disokong neoliberalisme berangkat dari cara melihat realitas lingkungan politik dan ekonomi internasional yang pada dasarnya sangat terinstitusionalisasi, dan organisasi internasional memainkan peran penting dalam hal distribusi internasional kesejahteraan dan kekua-

saan (Martin, 2007: 110). Menurut kaum neoliberalis, meskipun perubahan memang terjadi akibat distribusi kekuasaan dalam sistem internasional, institusi internasional tetap bertahan (*the durability of institutions*). Kaum neoliberalis selanjutnya juga melihat institusi sebagai mediator dan alat mencapai kerjasama antaraktor di dalam sistem internasional (Lamy, 2001: 189).

Secara prinsip, sebagaimana halnya neorealisme, neoliberalisme mengakui struktur anarki sistem internasional dan melihat negara sebagai aktor yang rasional. Meski demikian, neoliberalisme tetap menjadikan kerjasama antarnegara dalam situasi sistem internasional yang anarkis sebagai fokus perhatiannya. Dengan begitu, dapatlah dikatakan bahwa prinsip utama yang diusung neoliberalisme ialah optimisme terhadap kemungkinan kerjasama dibawah sistem internasional yang anarkis. Karya Stein (1983) dengan judul “Coordination and Collaboration: Regimes in an Anarchic World” serta karya Axelrod dan Keohane (1985) yang berjudul “Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions” adalah dua karya yang secara rinci mengelaborasi alasan di balik prinsip utama neoliberalisme, serta berbagai prasyarat yang memungkinkan kerjasama dapat terwujud.

Di atas prinsip utama tersebut maka Steven Lamy (2001: 189-190) setidaknya mencatat adanya empat asumsi dasar yang menjadi pijakan kerangka berpikir neoliberalisme, sekaligus titik tolak menawarkan preskripsi mengenai stabilitas dan perdamaian internasional.

Pertama, bahwa negara adalah aktor kunci dalam hubungan internasional, tetapi bukan satu-satunya aktor yang berpengaruh; negara adalah aktor yang rasional atau instrumental dan mempunyai kecenderungan memaksimalkan kepentingannya dalam berbagai isu.

Kedua, dalam lingkungan yang kompetitif, negara berusaha mendapat keuntungan yang absolut melalui ker-

Neoliberalisme

jasama, dimana perilaku rasional mendorong negara mencari nilai lebih melalui jalan kerjasama, walaupun negara juga tidak terlalu hirau dengan keuntungan yang diperoleh negara lain melalui kesepakatan kerjasama.

Ketiga, hambatan terbesar terhadap kesuksesan kerjasama adalah ketidakpatuhan atau kecurangan. Untuk itu kehadiran organisasi internasional menjadi penting adanya untuk tidak saja menjamin tercapainya kapatuhan tetapi juga menghindari terjadinya kecurangan.

Keempat, kerjasama tidak pernah berjalan tanpa masalah, tetapi negara akan mengalihkan loyalitas dan sumber-sumber yang dimilikinya kepada institusi jika pengalihan ini menguntungkan semua pihak, serta institusi menyediakan peningkatan kesempatan bagi negara untuk mengamankan kepentingan nasionalnya pada level internasional.

Perdebatan Neo-Neo

Kombinasi antara beberapa persamaan dasar (*rationality* dan *contracting*) serta ditopang oleh prinsip utama dan asumsi dasar di atas melahirkan perdebatan yang dikenal dengan *neo-neo debates* antara neoliberalisme dan neorealisme. Secara umum perdebatan tersebut terjadi dalam soal: (1) interpretasi atas situasi anarki sistem internasional, (2) pandangan tentang kerjasama internasional, (3) penilaian tentang capaian, (4) mengenai prioritas tujuan negara, (5) tentang intensi dan kapabilitas negara, dan (6) mengenai peran institusi dan rejim (Baldwin, 1993: 1-25).

Di dalam memberi interpretasi terhadap situasi anarki sistem internasional, baik neoliberalisme maupun neorealisme memberi definisi yang sama yaitu ketiadaan pemerintahan (*the absence of government*) dan negara bertindak secara rasional dalam kondisi sistem anarkis ini. Namun demikian, keduanya berbeda di dalam melihat konsekuensi

situasi ini. Neorealis berargumen bahwa konsekuensi dari sistem internasional yang anarki mengakibatkan kekawatiran terhadap keselamatan (*survival*) menjadi dorongan atau motif perilaku negara mencari solusi, yaitu mekanisme pertahanan diri (*self-help*) melalui peningkatan kapabilitas (grieco, 1988: 497-498). Sebaliknya neoliberalis mengkritik pandangan ini dan berpandangan bahwa anarki adalah fitur yang tetap dari politik global dan tetap saja memberi peluang kerjasama; situasi saling ketergantungan menjadi pintu masuk potensi kerjasama antar-negara (Axelrod & Keohane, 1985).

Di dalam hal memandang potensi kerjasama internasional, kedua perspektif sepakat melihatnya sebagai sesuatu yang sangat memungkinkan. Tetapi perbedaannya terletak pada soal seberapa jauh kemungkinan itu dapat terealisasi. Neorealis skeptis melihat kemungkinan realisasinya oleh karena pada prinsipnya negara cenderung memaksimalkan kepentingan masing-masing. Sementara itu, neoliberalisme berargumen bahwa keuntungan timbal-balik akan menjadi dorongan untuk kerjasama, dan ketika hal ini difasilitasi oleh institusi internasional, maka kerjasama internasional adalah peluang yang menguntungkan bagi semua pihak (Baldwin, 1993: 5).

Di dalam menyoal tentang capaian (*gains*), keduanya sama-sama melihat setiap negara akan senantiasa bertindak rasional dengan memperhitungkan apa yang dapat dicapai. Tetapi perbedaannya adalah ketika neorealis lebih memfokus pada siapa yang mendapat lebih banyak (*absolute gains*), neoliberalis lebih memfokuskan diri pada keuntungan secara umum dari transaksi (*relative gains*) bagi masing-masing pihak. Menurut neoliberalisme, capaian dapat dinilai secara berbeda tergantung dari masing-masing situasi (Baldwin, 1993: 4-5).

Mengenai prioritas tujuan negara, keduanya juga sepakat bahwa keamanan nasional dan kesejahteraan eko-

Neoliberalisme

nomi pada hakekatnya memang penting. Namun demikian, karena *survival* adalah tujuan paling tinggi dari suatu negara, maka neorealis cenderung melihat keamanan nasional sebagai prioritas tujuan negara. Sebaliknya, karena kerjasama adalah mekanisme yang dianggap paling dapat memediasi interaksi antarnegara, maka neoliberalis melihat kesejahteraan ekonomi menjadi prioritas tujuan negara, yang tentu saja dapat dicapai melalui kerjasama ekonomi antarnegara (Baldwin, 1993: 6).

Tentang intensi dan kapabilitas negara, keduanya mempunyai pandangan yang berbeda. Neorealis berargumen bahwa ketidakpastian akibat situasi sistem internasional yang anarkis akan cenderung mendorong negara fokus pada memperkuat kapabilitas sendiri. Sementara neoliberalis melihat bahwa sensitifitas yang berlebihan negara terhadap capaian yang relatif pada dasarnya dipengaruhi oleh persepsi negara tersebut terhadap negara lain. Karena itu, kapabilitas menurut kaum neoliberalis hanya diperhitungkan sepanjang ketika mempengaruhi intensi negara (Baldwin, 1993: 6-7).

.Mengenai peran institusi dan rejim internasional, neoliberalisme dan neorealisme menerima kehadirannya sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem internasional. Namun sekali lagi keduanya berbeda di dalam melihat sejauhmana kehadirannya penting (Baldwin, 1993: 7-8). Jika neorealis tidak begitu optimis dengan kehadiran institusi karena tidak mempunyai kekuatan memberi sanksi kepada yang melakukan pelanggaran, neoliberalis sebaliknya melihat, negara justru akan mendapat jauh lebih banyak keuntungan melalui kerjasama daripada tidak bekerjasama. Menurut kaum neoliberalis, institusi dan rejim internasional sangat penting, sebab melalui institusilah prinsip-prinsip, norma, aturan-aturan, serta prosedur-prosedur pengambilan keputusan dapat memfasilitasi kerjasama antarnegara. Perilaku dapat dibatasi norma dan aturan rejim-rejim yang ada, sementara keberadaan rejim dan institusi meningkatkan stabil-

itas dalam konteks sistem internasional yang anarki. Institusi dan rejim membuka peluang transparansi bagi setiap negara anggotanya, dan dengan begitu mengurangi beban transaksi serta dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh negara lain. Pengalaman bekerjasama melalui institusi, umumnya menghasilkan berbagai bentuk kesamaan (*new forms of commonality*) yang dalam prosesnya menjadi sumber kekuatan yang menjaga keberlangsungan kerjasama.

Kerjasama dan Peran Institusi

Sebelum membahas tentang bagaimana pandangan kaum neoliberalis mengenai kerjasama dan peran institusi dalam rangka menciptakan stabilitas dan perdamaian internasional, baik adanya diawali dengan gambaran neoliberalisme mengenai kompleksitas interdependens sistem internasional. Mengutip Keohane dan Nye (1977) yang dimaksudkan dengan situasi internasional yang serba saling tergantung (*complex interdependence*) ialah situasi politik global dimana semua aktor baik aktor negara maupun aktor bukan negara saling tergansung satu-sama-lain. Saling tergantung (*interdependence*) merujuk ke situasi dimana efek timbal-balik antar-negara atau antar-aktor di negara yang berbeda (Keohane & Nye, 1977: 8). Hubungan antar-aktor --baik negara maupun bukan negara-- di dalam situasi saling tergantung ini bersifat kooperatif dan kompetitif. Dengan demikian kebijakan dan tindakan satu aktor mempunyai dampak yang mendalam terhadap aktor lainnya. Kerjasama di dalam sistem yang kompleks ini dilakukan dengan dasar untuk kepentingan bersama.

Tedapat tiga karakteristik utama dari situasi *complex interdependence*, yaitu saluran penghubung yang jamak (*multiple channels*), tidak adanya hirarki antar-isu (*absence of hierarchy among issues*), dan peran kekuatan militer yang kecil (*minor role of military force*) (Keohane & Nye, 1977).

Neoliberalisme

Karakter pertama merujuk pada situasi dimana dalam hubungan internasional terdapat banyak saluran yang menghubungkan masyarakat, termasuk semua negara, antar-pemerintah, dan transaksi-transaksi lintas negara. Di dalam dunia yang kompleks ini, tidak hanya interaksi formal dan informal antar-elit pemerintahan yang menjadi sumber yang menghubungkan masyarakat, tetapi juga termasuk hubungan informal antar elit-elit non-pemerintah dan organisasi lintas negara yang lambat laun semakin penting juga. Hal serupa juga berlaku bagi perusahaan-perusahaan multinasional serta korporasi-korporasi global yang semakin banyak jumlahnya. Secara keseluruhan dan secara bersama-sama aktor-aktor ini berperan sebagai sabuk penyangga (*transmission belts*), membuat kebijakan di berbagai negara menjadi semakin sensitif satu-sama-lain.

Karakter kedua merujuk pada keadaan dimana tidak ada hirarki antar satu isu dengan isu lainnya. Tidak juga ada pembatas yang jelas antar isu-isu yang ada, termasuk antara isu domestik dan internasional. Akibatnya ialah antara isu politik, militer dan keamanan, ekonomi, serta social tidak lagi dapat dengan mudah dikatakan mana yang lebih penting.

Karakter ketiga merupakan implikasi dari karakter pertama dan kedua, dimana saling ketergantungan dalam berbagai isu membuat pilihan cara-cara militer untuk memecahkan persoalan bukan lagi menjadi prioritas utama sebagaimana yang umumnya dikemukakan oleh kaum neorealis.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kerjasama internasional dan peran institusi internasional di dalamnya adalah salah satu fokus terdepan argumen neoliberalisme dan menjadi titik tolak preskripsi kaum neoliberalis terhadap stabilitas dan perdamaian internasional. Karena itu, banyak pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai awalan untuk melihat bagaimana perspektif neoliberalisme menawarkan penjelasannya. Apakah kerjasama dalam hubungan internasional? Apa yang mendorong negara terlibat atau tidak terli-

bat dalam kerjasama dengan negara-negara lain? Bagaimana menjelaskan contoh-contoh aturan-aturan internasional yang dipatuhi oleh negara di dalam sistem masyarakat yang anarki?

Untuk dapat bekerjasama, Keohane (1982) menekankan pentingnya negara-negara mampu mengatasi sejumlah problem bersama, yang umumnya berakar pada perhitungan-perhitungan beban transaksi. Di dalam situasi demikian, tidak ada dorongan dari kekuatan luar yang dapat diharapkan berfungsi di dalam sistem internasional, sehingga setiap kesepakatan haruslah atas dorongan dari diri-sendiri. Itu berarti setiap negara harus mencari berbagai cara untuk menghindari godaan terjadinya kecurangan, dan diperlukan ketersediaan informasi mengenai intensi dan preferensi masing-masing negara. Disamping itu, di dalam rangka bekerjasama, negara-negara juga perlu mengkoordinasikan aksinya. Di dalam konteks inilah kehadiran organisasi dan bentuk-bentuk institusi internasional menjadi penting untuk dapat memitigasi aksi-aksi kolektif yang dapat mengancam kestabilan kerjasama.

Adapun alasan bagi setiap negara untuk bekerjasama dapat bervariasi. Tetapi salah satunya ialah karena adanya kondisi saling membutuhkan, yang mendorong negara-negara saling berhubungan secara terus menerus (Mingst, 2003: 64-65). Di tingkat global, kehidupan internasional mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, lingkungan, kebudayaan, hingga politik serta pertahanan dan keamanan. Keragaman ini memunculkan beraneka-ragam masalah dan kepentingan yang membutuhkan kerjasama untuk menemukan solusi-solusi.

Di dalam situasi hubungan internasional yang kompetitif, negara akan berusaha memaksimalkan capaiannya (*gains*). Untuk itu negara-negara akan semaksimal mungkin berupaya bekerjasama agar mendapatkan keuntungan tanpa perlu mengorbankan pihak lain. Situasi interdependensi

Neoliberalisme

akan dengan sendirinya tercipta setelah kerjasama telah terjalin dengan sangat erat. Dalam keadaan seperti ini, interdependensi mendorong masing-masing negara mengkalkulasi betul kemungkinan kerugian yang didapat jika mereka tidak melakukan kerjasama.

Di dalam setiap bentuk kerjasama hambatan-hambatan tentu saja dapat terjadi akibat misalnya friksi antarnegara, miskomunikasi, yang tentu saja potensial membahayakan kepentingan masing-masing negara. Sifat agresif biasanya muncul, terutama dari pihak negara yang secara militer kuat. Penyebabnya adalah kepentingan nasional yang kerap digunakan sebagai dasar pertimbangan para pengambil keputusan membuat kebijakan. Menurut kaum neoliberalis, karena masalah keamanan adalah masalah yang serius dan penting, maka perlu dibentuk institusi, melalui mana stabilitas dan keamanan kemungkinan dapat dijaga, dan ini tentu saja sangat menguntungkan bagi pihak negara yang dari sisi kapabilitas militer lemah (Mingst 2003: 65). Jadi neoliberalisme berusaha menghilangkan potensi-potensi konflik melalui institusi internasional sebagai instrumen utamanya dan institusi dalam hal ini berperan sebagai wadah untuk menjalin kerjasama. Dengan begitu maka sebagai suatu perspektif, neoliberalisme berupaya menciptakan perdamaian melalui kerangka kerjasama yang dikelola dalam sebuah institusi formal yang saling menguntungkan. Dengan berbagi keuntungan, semua pihak atau aktor internasional akan menjauhkan diri dari sikap unilateralisme dan lebih mementingkan aspek keuntungan bersama. Karena pendekatan neoliberalis cenderung menekankan kemungkinan kemenangan bersama, maka negara lebih tertarik pada lembaga atau institusi yang dapat menyediakan perjanjian yang menguntungkan semua pihak.

Fungsi dan peran institusi internasional baik dalam bentuk rejim maupun organisasi formal menurut perspektif neoliberalisme beragam (Martin, 2007: 111). Organisasi inter-

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

nasional menyediakan forum dimana negara-negara secara bersama dapat memitigasi kemungkinan ancaman terhadap kerjasama. Organisasi internasional juga dapat melakukan fungsi-fungsi monitoring, menyediakan jaminan bahwa semua pihak komit terhadap kewajiban-kewajiban yang telah disepakati. Organisasi internasional juga menjadi forum negosiasi untuk mengatasi masalah koordinasi dan mempelajari pilihan dan hambatan prefensi pihak negara lain. Organisasi internasional juga menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan antar-anggota. Mengenai pentingnya peran institusi internasional dalam politik global kontemporer, Stein (2008: 217) menulisnya sebagai berikut;

The world is full of international institutions. ... How much and how adequately these institutions of international governance tame anarchy is open to question, but the world is witnessing an increase in supranational governance, created by states and in which states increasingly live. Understanding and explaining international politics (and indeed even many areas of national politics) increasingly requires incorporating the role of international institutions.

Penutup

Dari pemaparan di atas, neoliberalisme adalah salah satu perspektif dalam hubungan internasional yang hadir dan memberi tantangan kepada cara pandang neorealisme terhadap struktur sistem internasional dan bagaimana implikasinya terhadap perilaku negara. Berbeda dengan neorealisme yang skeptis terhadap kerjasama dibawah sistem internasional yang anarki, neoliberalisme justru melihat adanya peluang kerjasama terutama melalui fasilitasi institusi internasional. Kerjasama, dalam kondisi-kondisi tertentu, dapat berkembang dengan dasar pertimbangan kepentingan yang saling menguntungkan.

kan. Organisasi internasional dan bentuk-bentuk institusi internasional lainnya dapat menjadi media yang memfasilitasi terjalannya kerjasama antarnegara yang saling menguntungkan itu.

Sebagai catatan akhir, perlu diingat bahwa prinsip dasar, asumsi, dalil-dalil serta preskripsi yang dikemukakan para penstudi neoliberalis umumnya dikemukakan pada konteks awal 1990-an, era dimana Perang Dingin berakhir tiga decade yang lalu. Dalam rentang waktu tiga dekade ini, beberapa situasi penting telah terjadi. Peristiwa 9/11 adalah satu diantara peristiwa penting yang telah mengubah banyak wajah politik global semenjak berakhirnya Perang Dingin. Seberapa jauh dalil-dalil perspektif neoliberalisme masih cukup kuat menawarkan penjelasan teoritik di dalam situasi global pasca 9/11? Apakah institusi internasional masih dapat dilihat sebagai medium kerjasama bagi banyak negara pasca 9/11? Selanjutnya, perkembangan penting lain yang cukup signifikan mengubah wajah politik global ialah globalisasi yang semakin meluas dan mendalam. Akibatnya, kompleksitas masyarakat internasional yang terjadi semakin meningkat, jauh lebih kompleks dari situasi yang digambarkan pada tahun 1970-an (*complex interdependence*) oleh para penstudi pendahulu perspektif neoliberalisme. Pertanyaannya adalah, apakah tuntutan akan rejim internasional sebagaimana diuraikan misalnya oleh Keohane (1982) pada tahun 1980-an mengalami pergeseran pada decade 2000-an? Ini adalah sejumlah pertanyaan mendasar yang tentu saja untuk menjawabnya masih memerlukan studi-studi yang mendalam yang perlu dilakukan kaum neoliberalis.

Daftar Pustaka

- Axelrod, Robert, (1984), *The Evolution of Cooperation*, Basic Books.
- _____ & Keohane, Robert O., (1985), "Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions", *World Politics*, 38(October), 226-254.
- Baldwin, David A., (1993), *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*, Columbia University Press.
- Grieco, Joseph M., (1988), "Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism", *International Organization*, 42(3), 485-507.
- James, Patrick, (1993), "Neorealism as a Research Enterprise: Toward Elaborated Structural Realism", *International Political Science Review*, 14(2), 123-148.
- Jervis, Robert, (1992), "A Usable Past for the Future", dalam, Michael J. Hogan, *The End of the Cold War*, (ed.), Cabridge University Press, 257-268.
- Kegley, Charles W., & Wittkopf, Eugene R., (1997), *World Politics, Trend and Transformation*, 6th edition, St. Martin's Press.
- Keohane, Robert O. & Nye, Joseph S., (1977), *Power and Interdependence: World Politics in Transition*, Little & Bown & Co.
- Keohane, Robert O., (1982), "The Demand for International Regimes", *International Organization*, 36(2), 325-355.
- _____, (1984), *After Hegemony: Co-operation and Discord in the World Political Economy*, Princeton University Press.
- Lamy, Steven L., (2001), "Contemporary mainstream approaches: neo-realism and neo-liberalism", dalam, John Baylis & Steve Smith, *The Globalization of Word Poli-*

Neoliberalisme

- tics, An introduction to international relations*, (eds.), 2nd edition, Oxford University Press, 182-199.
- Lebow, Richard Ned, (1995), "The Long Peace, the End of the Cold War, and the Failure of Realism", dalam, Richard Ned Lebow & Thomas Risse-Kappen, *International Relations Theory and the End of the Cold War*, (eds.), Columbia University Press, 23-56.
- Lipson, Charles, (1984), "International Cooperation in Economic and Security Affairs", *World Politics*, 37(October), 1-23.
- Little, David, (1993), "The Recovery of Liberalism; Moral Man and Immoral Society Sixty Years Later", *Ethics and International Affairs*, 7, 171-201.
- Martin, Lisa M., (2007), "Neoliberalism", dalam, Tim Dunne, Milja Kurki, Steve Smith, *International Relations Theory, Discipline and Diversity*, (eds.), Oxford University Press, 109-126.
- Mingst, Karen A., (2003), *Essentials of International Relations*, 2nd edition, W.W. Norton.
- Scholte, Jan Art, (1993), "From Power Politics to Social Change: An Alternative Focus for International Studies", *Review of International Studies*, 19(January), 3-21.
- Stein, Arthur, (1983), "Coordination and Collaboration: Regimes in an Anarchic World", dalam, Stephen D. Krasner, *International Regimes*, (ed), Cornell University Press, 115-140.
- , (2008), "Neoliberal Institutionalism", dalam, Christian Reus-Smit & Duncan Snidal, *The Oxford Handbook of International Relations*, (eds.), Oxford University Press, 201-221.

<<<<<>>>>>

Bab 6

Marxisme

Baiq L.S.W. Wardhani

Pengantar

Marxisme adalah salah satu perspektif dalam kajian teori-teori hubungan internasional alternatif. Bab ini mengupas tentang asumsi filosofis dasar Marxisme tentang hubungan negara dengan masyarakat. Berbeda dengan perspektif arus utama yang menyoroti sifat dasar manusia, Marxisme lebih banyak mengedepankan persoalan yang berkaitan dengan hubungan struktural manusia dengan lembaga yang mengikatnya.

Bab ini mengupas tentang asumsi filosofis dasar Marxisme, asal-usulnya, tokoh-tokoh utamanya, asumsi dasar dan prinsip-prinsipnya, perkembangannya, serta bagaimana 'potret' hubungan internasional dalam pandangan perspektif ini, serta bagaimana relevansinya dengan hubungan internasional kontemporer. Pemahaman tentang hal-hal ini diharapkan dapat membantu pembaca menjelaskan berbagai fenomena interaksi hubungan internasional dengan menggunakan kacamata perspektif Marxis.

Asal-Usul dan Tokoh-Tokoh Pendahulu

Sekali pun cukup populer sebagai salah satu perspektif dalam Ilmu Hubungan Internasional, Marxisme tidaklah terlahir sebagai “anak kandung” studi ilmu hubungan internasional seperti perspektif realisme dan liberalism yang dianggap sebagai perspektif utama. Awal mula kelahiran perspektif

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

Marxisme, yang diadopsi dari Sosiologi, adalah karena karena terdapat fenomena “stratifikasi sosial di antara negara-negara”, seperti adanya sebutan negara kaya, negara miskin, negara utara, negara selatan, dan sebagainya.

Kemunculan faham marxisme berawal dari kritikan Karl Marx (1818-1883) terhadap kapitalisme. Revolusi industri di Eropa melahirkan kesenjangan sosial dan hierarki di masyarakat sehingga menghasilkan kelas borjuis dan kelas proletar. Marx berpendapat bahwa hierarki tersebut melahirkan ketimpangan yang semakin lama semakin lebar sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi kaum buruh sehingga harus diakhiri. Dengan mengamati suburnya ketimpangan sosial yang disebabkan karena pesatnya revolusi industri, Marx memperkenalkan ide tentang revolusi proletar, sebuah bentuk revolusi yang akan mengakhiri ketidakadilan tersebut. Ide-ide yang dituliskannya menyebabkan Marx dikenal sebagai pelopor utama gerakan sosialisme ilmiah. Ajaran Marxisme berakar dari ajaran Karl Marx yang melahirkan ide tersebut pada abad ke 18.

Bersama Friedrich Engels, yang juga merupakan filsuf revolusioner yang berasal dari Jerman, mereka menulis buku berjudul “Manifesto Komunis” dan beberapa karya lain yang pada umumnya bertemakan kejahatan kapitalisme, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya, serta mendorong terciptanya sebuah tatanan yang memungkinkan terjadinya evolusi dalam sistem ekonomi dunia. Mereka menggambarkan, sosialisme merupakan awal dari evolusi besar yang akan berlanjut dengan komunisme. Mereka menyalahkan kemiskinan dan kelaparan yang mereka amati pada masyarakat Jerman sebagai dampak dari kejahatan masyarakat kapitalis. Marxisme sebagai faham justru mulai dikembangkan setelah kematian Marx pada 1883. Pemikiran Marx dijadikan sebuah ideologi baru yang diberi nama Marxis oleh para pemikir Jerman. Ajaran Marxisme tidak saja berkaitan dengan ajaran tentang pentingnya merombak

Marxisme

sistem ekonomi, namun juga sistem sosial dan politik, karena ketiganya merupakan hal yang tak terpisahkan.

Untuk memahami Marxisme, perlu difahami apakah yang dimaksud dengan kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menempatkan alat-alat produksi sebagai milik pribadi. Barang dan jasa yang diproduksi juga dilakukan demi untuk keuntungan dalam pasar bebas. Dalam pasar bebas, setiap orang bebas untuk menggunakan dan menjual milik pribadi mereka tanpa campur tangan pemerintah. Sementara itu Marxisme mengacu pada teori-teori politik dan ekonomi Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (1820-1895). Teori Marx pada dasarnya berpijak pada sejarah manusia. Marx meyakini bahwa sejarah ditentukan oleh perjuangan antarkelas, yaitu kelas penguasa dan kelas tertindas, yang keduanya memiliki kepentingan bertentangan yang bertolak belakang. Marx percaya bahwa jika kaum pekerja bisa menggulingkan kapitalisme, mereka akan mampu membangun sebuah masyarakat sosialis.

Sosialisme adalah ideologi yang mendukung sistem ekonomi yang menempatkan seluruh, atau sebagian besar sumber daya produktif dimiliki oleh pemerintah. Demikian pula produksi dan distribus barang dan jasa harus dilakukan oleh pemerintah dan bukan oleh perusahaan swasta. Setiap sisa produksi yang dimiliki oleh kaum swasta didistribusikan dan diatur oleh pemerintah dan bukan oleh proses pasar.

Ajaran Marx dan Engels yang tertuang dalam buku Manifesto Komunis berkembang pesat di hampir seluruh dunia. Pada prinsipnya, Marxisme melihat ketimpangan besar yang terjadi di tengah masyarakat. Ketimpangan besar itu terjadi antara apa yang disebutnya kaum “pemilik modal” dengan kaum “proletar”. Kaum pemilik modal merupakan sekumpulan orang yang mengumpulkan dan memiliki uang dan mempekerjakan kaum proletari dengan masa kerja yang lama namun berupah rendah. Sementara itu, kaum proletar adalah kaum pekerja yang bekerja untuk kaum pemilik

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

modal, yang pada umumnya merupakan kaum marginal dan tidak memiliki kemampuan untuk memiliki kekayaan materi untuk hidup memadai. Sebaliknya, kaum pemilik modal dapat dengan mudah memiliki kekayaan pribadi yang dihasilkan dari kerja keras kaum proletar. Menurut Marx, keadaan yang tidak seimbang ini harus diubah sebelum kaum proletar bergerak untuk melakukan pemberontakan untuk menuntut persamaan hak. Cara terbaik yang dapat dilakukan adalah mengubah faham kapitalisme menjadi faham komunisme.

Landasan filosofi Karl Marx sangat dipengaruhi oleh dialektika yang dikembangkan oleh Hegel pada 1818, yang mengungkapkan filosofi mengenai idealisme dan sejarah. Filosofi ini menjelaskan tentang gejolak sosial yang berkaitan dengan masa depan peradaban umat manusia, yaitu tentang siklus perubahan sejarah. Marx memikirkan sebuah konsep revolusioner dalam membentuk teori tentang masyarakat. Marx menjabarkan konsep penting mengenai negara dan kelas penguasa. Marx meyakini bahwa sejarah adalah hasil perjuangan kelas. Dalam proses terbentuknya kelas-kelas sosial, kapitalisme memiliki peranan besar.

Dalam perkembangannya, ajaran Marxisme mengalami dua periode, yaitu periode Marxisme klasik dan Marxisme modern. Periode Marxisme klasik menitikberatkan pada ajaran Marxisme yang lebih memfokuskan diri pada ajaran-ajaran sosialisme Marx dalam ambisinya menumbangkan sistem kapitalisme. Sementara itu, Marxisme modern Vladimir Illich Lenin, lebih memusatkan perhatian ajaran Marxisme tentang sistem politik, ekonomi dan ideologi komunis yang merupakan pesaing dari kapitalisme moderen yang berkembang pesat di negara-negara industri maju di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Dalam mengembangkan ajaran Marxisme, Lenin merupakan tokoh sentral. Lenin berhasil menyingkirkan Tsar Rusia terakhir dan mendirikan negara komunis Uni Soviet melalui Revolusi Bolshevik pada tahun 1917. Untuk selanjutnya, tokoh-tokoh ajaran Marxisme

Marxisme

akan dijelaskan melalui pemikirannya dalam sub-sub bab berikutnya.

Asumsi Dasar dan Prinsip-Prinsip Utama

Masyarakat terdiri dari berbagai kelas yang berbeda, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar (Jackson & Sorensen, 1999: 239). Kaum borjuis merupakan pihak yang memiliki modal dan alat-alat produksi, sedangkan kaum proletar merupakan pihak pekerja yang tidak memiliki modal dan hanya memiliki kemampuan dan kekuatan kerja untuk ‘dijual’ kepada kaum borjuis. Kaum borjuis identik dengan kapitalis, kelompok yang akan dikalahkan oleh proletar. Perjuangan kelas adalah hakikat dari perjuangan ideologi Marxisme.

Ada pun prinsip-prinsip dasar Marxisme sebagai berikut. Pertama, Marxisme menekankan gagasan bahwa kehidupan sosial pada dasarnya adalah “konflik kepentingan”, yaitu kepentingan antara kaum Borjuis (orang-orang yang memiliki dan menguasai alat-alat produksi dalam masyarakat) dan kaum Proletar (mereka yang hanya menjual tenaga kerja mereka di pasar Kapitalisme).

Kedua, Marx menekankan terdapatnya kelas-kelas sosial di dalam masyarakat. Konsep kelas sosial digunakan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa masyarakat berubah. Perubahan itu disebabkan karena terdapat konflik kelas yang merupakan proses dimana perubahan datang melalui oposisi kelas sosial. Konflik terjadi karena mereka mengejar apa yang menurut mereka adalah kepentingan kolektif mereka di dalam masyarakat.

Ketiga, Marxisme adalah teori politik yang memberikan perhatian pada dua hal: pertama, untuk menyatakan kontradiksi politik dan ekonomi yang melekat dalam Kapitalisme; kedua, untuk menunjukkan jalan menuju pembentukan masyarakat komunis di masa depan.

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

Keempat, terdapat dua kelas besar dalam masyarakat kapitalis, yaitu Kaum Borjuis dan Kaum Proletar. Kelas Borjuis mungkin dibagi lagi menjadi: *The Haute* (Borjuis kelas Tinggi), yaitu borjuis pemilik perusahaan besar); *The Petit* (Borjuis Kecil), yaitu Borjuis pemilik usaha kecil; dan para Profesi, yaitu orang-orang yang tidak memiliki alat-alat produksi, namun membantu menjalankan industri sehari-hari. (diambil dari www.sociology.org.uk/as4i4c1.pdf)

Salah satu keyakinan dalam ideologi marxisme adalah bahwa lambat laun kapitalisme akan digantikan oleh sosialisme. Kapitalisme akan menjadi ideologi yang usang dengan hilangnya dukungan atas kapitalisme karena ideologi ini tidak lagi mampu memajukan peradaban manusia. Kapitalisme tidak lagi dipercaya sebagai sistem yang menyejahterakan rakyat karena sifatnya yang eksploitatif. Eksploitasi membuat konflik antar kelas sosial semakin tidak terelakan, akibat tidak setaranya ekonomi antar keduanya. Kapitalisme akan menciptakan industri-industri besar yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja. Lambat laun orang akan berpaling memilih sosialisme, justru karena kapitalisme telah mempersiapkan kondisi yang mendukung lahirnya sosialisme. Modus produksi kapitalisme sesungguhnya bersifat sosial, yaitu dengan pengeralan tenaga kerja sebanyak-banyaknya agar hasil produksi dapat dijual dengan murah. Kontradiksi kapitalisme adalah, sekali pun produksi dilakukan secara massal, keuntungan yang diperoleh dari proses tersebut hanya dinikmati segelintir orang. Sekali pun demikian, tenaga kerja yang melakukan proses produksi akan senantiasa berada di posisi marjinal karena ketidakmampuan mereka menikmati hasil produksi yang telah dilakukannya. Apabila keadaan ini dibiarkan berlarut-larut, maka tidak menutup kemungkinan buruh akan melakukan perlawanan atas ketidakadilan yang mereka rasakan. Kaum buruh akan menuntut dilakukannya nasionalisasi atas nilai-nilai produksi sehingga nilai lebih produksi akan mereka kuasai. Kekuatan kelas buruh inilah

Marxisme

yang menjadi kekuatan sosialisme untuk hidup dan diterima masyarakat.

Motif utama sosialisme adalah terpenuhinya kebutuhan manusia. Sifat demokratis sosialisme muncul dalam berbagai kegiatan mulai dari produksi, distribusi, sampai konsumsi, sehingga hasil produksi dapat dinikmati oleh setiap orang, termasuk kaum miskin. Pada saat seperti inilah kapitalisme mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan ini akan diikuti oleh munculnya kekuatan politik yang dipimpin oleh buruh. Hal yang harus dilakukan oleh buruh adalah menghancurkan negara yang dikuasai oleh pemilik modal (borjuis). Ketidaksetaraan yang dipicu oleh perbedaan yang mencolok pada kemampuan pemenuhan kebutuhan manusia telah mendorong kaum Marxis mewujudkan cita-citanya, yaitu revolusi politik yang mampu menggulingkan tatanan kapitalis. Revolusi politik itu harus dapat menciptakan masyarakat sosialis, yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan (Burchill & Linklater, 1996:161). Negara sosialis yang didirikan oleh buruh harus didasarkan pada tujuan menyejahterakan kaum buruh dan harus memiliki karakter yang berbeda dengan negara kaum borjuis yang telah dihancurkannya. Bentuk negara sosialis adalah masyarakat tanpa kelas.

Dasar dari kritik Marxis terhadap kapitalisme adalah bahwa “kapitalisme akan gagal karena kaum proletar akan memberontak terhadap upaya untuk memiskinkannya” (Gilpin, 1987: 40). Karl Marx memperkenalkan tiga aturan hukum ekonomi. Hukum ini mendukung teorinya tentang sistem ekonomi dan politik yang tidak bisa berkembang di bawah rezim kapitalis. Komunis revolusioner Rusia, Vladimir Lenin, kemudian memperkenalkan hukum keempat. Hukum ekonomi Marxisme ini berlaku sampai hari ini, bahkan sangat relevan pada era globalisasi.

Hukum pertama disebut hukum disproporsionalitas. Hukum ini menyatakan, dalam rangka mengejar keuntungan

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

dan akumulasi modal, ekonomi kapitalis cenderung memproduksi jenis barang tertentu (Gilpin, 1987: 36). Hal ini akan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam persepsi upah dari seseorang penerima [upah] untuk membeli barang yang berlebihan tersebut. Marx berpendapat bahwa “disproporsionalitas antara produksi dan konsumsi terjadi karena anarki pasar [yang hal ini] menyebabkan depresi periodik dan fluktuasi ekonomi” (Gilpin, 1987: 36). Para pendukung Marx melihat krisis ekonomi global yang terjadi saat ini dapat difahami melalui pandangan Marx tentang disproporsionalitas. Contohnya, kasus Prime Mortgage di Amerika Serikat muncul karena hal ini. Modal yang melimpah dan murah menggelembungkan nilai dan meningkatkan pembangunan dan investasi di sektor perumahan. Gelembung aset ini dapat ditemukan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Spanyol dan Inggris. Gelembung pasar ini menciptakan produksi yang berlebihan di perumahan, sehingga mengantar ekonomi dunia ke jurang kehancuran ekonomi.

Hukum kedua Marx disebut hukum akumulasi modal dan konsentrasi yang berlangsung di antara kelas pemilik modal, menunjuk kepada kebutuhan yang terus meningkat untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan risiko investasi. Marx membangun teori bahwa kapitalisme yang tak terikat akan mendorong “peningkatan konsentrasi kekayaan di tangan beberapa pihak yang efisien dan menumbuhkan banyak” (Gilpin, 1987: 36). Selanjutnya, Marx berpendapat bahwa, ketika upah tenaga kerja turun, kelas proletar akan memicu konflik dengan tuntutan untuk dilakukannya revolusi sosial.

Hukum kapitalisme ketiga menurut Marx, “Karena modal terkumpul dan semakin lama menjadi berlebih, terjadi penurunan, dan hal ini menyebabkan berkurangnya insentif untuk berinvestasi (Gilpin, 1987: 36).

Terakhir, hukum kapitalisme keempat yang disumbangkan oleh Lenin, menyatakan bahwa “ketika

Marxisme

ekonomi kapitalis mencapai kedewasaan, dan ketika modal terakumulasi, dan ketika tingkat keuntungan menurun, ekonomi kapitalisme dipaksa untuk mencari koloni dan menciptakan ketergantungan untuk melayani pasar [kapitalis], sebagai outlet investasi dan sebagai [pemasok] sumber makanan dan bahan mentah (Gilpin, 1987: 39).

Pendukung teori Marxis menuding kolonialis, merkantilis dan gerakan-gerakan neo-kolonialis yang telah mengeksploitasi negara-negara yang belum berkembang ekonominya. Di saat ekonomi konsumen dari dunia barat telah mencapai puncaknya, investor dan korporasi mencari mencari negara-negara seperti India dan China sebagai sumber/pemasok tenaga kerja dan sebagai outlet untuk produk-produk mereka karena di negara-negara ini kelompok kelas menengah dan kelas atasnya mulai bertumbuh dengan daya beli yang meningkat.

Dalam memandang kekuasaan, Marxis menganalisisnya melalui empat cara yang saling berkaitan. Pertama, keprihatinan pada hubungan kekuasaan (*power relations*) sebagai manifestasi dari maksud tertentu atau konfigurasi dari dominasi kelas bukan sebagai murni sebagai fenomena interpersonal yang tidak memiliki dasar yang kuat di dalam struktur sosial. Fokus pada dominasi kelas tidak berarti bahwa kekuasaan dan resistensi melestarikan aktor sosial dengan identitas kelas yang jelas dan kepentingan kelas. Ini hanya berarti bahwa Marxis tertarik pada kesalinghubungan antara pelaksanaan kekuasaan sosial dan reproduksi dan / atau transformasi dominasi kelas. Marxis menyadari pentingnya faktor-faktor seperti identitas, antagonisme, dan dominasi, walaupun selalu dalam konteks hubungan factor-faktor inidengan dominasi kelas.

Kedua, Marxis mempersoalkan hubungan dan keberlangsungan antara ekonomi, politik, dan dominasi kelas ideologi. Masalah ini masih menjadi sentral dari analisis Marx yang menimbulkan perdebatan berkepanjangan. Berbagai

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

pendekatan dalam debat menempatkan basis kekuasaan kelas dalam hubungan sosial produksi yang dikontrol negara, atau hegemoni intelektual.

Ketiga, Marxis menyadari pula adanya keterbatasan yang melekat dalam setiap pelaksanaan *power* yang berakar pada bentuk dominasi kelas tertentu. Hal ini dicobanya untuk menjelaskannya melalui kontradiksi struktural dan antagonisme terjadi di dalamnya. Marxis beranggapan bahwa semua bentuk kekuatan sosial yang berkaitan dengan dominasi kelas pada dasarnya rapuh, tidak stabil, bersifat sementara, dan sementara dan selalu dilakukan dalam rangka mengamankan dominasi kelas.

Keempat, Marxis juga membahas masalah strategi dan taktik. Mereka menyediakan analisis empiris dari strategi yang bertujuan untuk mereproduksi, menolak, atau menggulingkan dominasi kelas dalam periode tertentu. Mereka juga sering terlibat dalam perdebatan politik tentang identitas, kepentingan, strategi, dan taktik yang paling tepat untuk kelas tertindas lainnya untuk menantang subordinasi atas mereka.

Perkembangan: Marxisme dan Strukturalisme ala Marxist

Perkembangan Marxisme sebagai sebuah ideologi tidak lepas dari kontroversi. Para pemujanya berasal dari kaum miskin dan tertindas, sementara itu kelompok yang membencinya terdiri dari mereka yang berpandangan bahwa ideologi ini mendorong tumbuhnya kediktatoran dan penyebaran komunisme yang anti-agama serta menghilangkan aspek individu sebagai salah satu aspek penting dalam pengembangan aspek rasional dalam sejarah umat manusia.

Kaum Marxis meyakini, tumbangnya kapitalisme akan diawali dengan bangkrutnya negara-negara industri maju

Marxisme

yang mengembangkan sistem kapitalisme, seperti Inggris, Prancis, dan Jerman. Amerika Serikat akan bernasib sama dengan negara-negara tersebut. Namun apa menjadi harapan kaum Marxis tidaklah terjadi. Sebaliknya, kapitalisme semakin tumbuh dan berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan berlimpahnya hasil produksi dari negara-negara kapitalis, sehingga memaksa mereka menjualnya ke negara-negara lain. Hal ini memunculkan ideologi baru yang disebut dengan imperialisme.

Perkembangan perspektif Marx tersebut kemudian memunculkan Strukturalisme atau lebih dikenal sebagai Neo-Marxisme (Hobden & Jones, 2008). Sebagian orang juga menyebut Neo-Marxisme dengan sebutan Strukturalisme, atau juga sering disebut sebagai struktural Marxism dan *Scientific* Marxisme (Steans & Pettiford, 2009). Pada dasarnya Neo-marxis mengkritisi pemikiran Marx yang berkembang pada periode pasca perang Dunia II dan sesudahnya, serta mengkritisi perkembangan baru dalam ekonomi internasional dengan munculnya korporasi global sebagai aktor baru. Neo-marxisme melihat tatanan dunia dan sistem internasional sebagai rangkaian dari hubungan sosial, ekonomi dan politik yang saling terhubung satu sama lain dan membentuk sebuah struktur (Steans & Pettiford, 2009). Berbeda dengan Marxisme ortodoks yang percaya bahwa revolusi akan melalui dua tahap, yakni revolusi borjuis yang diikuti dengan revolusi sosialis, kaum neo-marxis menekankan perhatiannya pada imperialisme yang dilakukan oleh kapitalis di dunia ketiga. Menurut para neo-marxis, negara Dunia Ketigapun telah siap untuk melakukan revolusi sosialis. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan revolusi di RRC pada tahun 1949 dan pada Revolusi Kuba pada tahun 1950-an.

Strukturalisme/Neo-Marxisme memiliki dua teori utama yang dikembangkan kaum struktural, yaitu *dependency theory* dan *world-systems theory*. Struktur tersebut membentuk tatanan baru yang berpengaruh besar dalam

studi hubungan internasional. “Teori Ketergantungan” (*Dependency Theory*) ialah teori yang lahir sebagai reaksi dari teori-teori tentang modernisasi yang berkembang pada tahun 1950an. Teori ini menjelaskan hubungan ketergantungan antara negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang menempati posisi “satelit” atau “pinggiran” (*periphery*) dalam tata kelola ekonomi global dengan negara-negara kapitalis atau “metrololis” atau “pusat” (*core*). Yang termasuk dalam kategori ini adalah negara ekonomi global, seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis. Teori Ketergantungan muncul sebagai kritik pada Marxisme. Terdapat semacam pembagian kerja internasional (*division of labour*), yang memposisikan negara pinggiran sebagai pemasok bahan mentah dan barang setengah jadi. Sementara itu, negara “pusat” merupakan penghasil barang-barang jadi (Jackson & Sorenson, 1999). Selanjutnya, penganjur Teori Dependensi melihat adanya eksploitasi yang dilakukan oleh negara *core* terhadap negara *periphery*. Negara *core* menciptakan sistem tertentu yang membuat negara *periphery* teragantung kepada negara *core*. Untuk melanggengkan ketergantungan itu, negara *core* membuat berbagai kebijakan melalui pengiriman tenaga ahli, penasehat politik, dan MNC. Negara *periphery* itu muncul sesungguhnya karena adanya hubungan asimetris dengan negara *core*.

Pemikir Neo-Marxisme lainnya adalah Immanuel Wallerstein yang menitikberatkan perkembangan ekonomi dan struktur dalam sistem internasional. Teorinya disebut sebagai “Teori Sistem Dunia” (World System Theory). Berbeda dengan Marxisme yang menekankan perhatiannya pada rivalitas antarkelas, para strukturalis lebih menekankan perhatiannya pada struktur di dalam sistem internasional. Menurut mereka, terdapat ketidakseimbangan dalam perkembangan ekonomi sehingga memunculkan kelompok-kelompok yang berbeda dalam sistem internasional. Kelompok-kelompok ini muncul akibat kaum kapitalis yang memunculkan hubungan asimetris dan eksploitatif. Hubungan seperti

ini menimbulkan ketergantungan antara negara. “Teori Sistem Dunia” membagi negara di dunia ke dalam tiga kelompok yaitu Negara *Core*, Negara *Semi-Periphery*, dan negara *Periphery*. Teori Sistem-Dunia dicetuskan oleh Immanuel Wallerstein melalui dua tulisannya, yaitu *The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis* (1974) dan *The Modern World System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century* (1976). Teori Sistem-Dunia berdasarkan pada tiga asumsi, yakni pertama, adanya dominasi pusat terhadap pinggiran; *Kedua* terdapatnya ketidakseimbangan pertukaran antara pusat dan pinggiran; *Ketiga*, aktivitas perdagangan yang dipercaya sebagai penggerak utama perkembangan sosial ternyata tidak sepenuhnya berperan dalam masyarakat pra-modern (Flammini, 2008: 51).

Selanjutnya, menurut Wallerstein, terdapat dua bentuk pembuatan keputusan tentang distribusi sumber daya menurut Teori Sistem Dunia, yaitu *world-empire* dan *world economy*. *World empire* menekankan pada sistem politik terpusat, sementara *world economy* menggantungkan distribusi sumber daya melalui pasar karena tidak terdapat otoritas terpusat (Wallerstein dalam Hobden dan Jones, 2001). “Teori Sistem Dunia” memaparkan bahwa kapitalisme digerakkan oleh perusahaan besar yang bermotif mencari keuntungan sebesar-besarnya. Karena itulah terjadi perluasan volume produksi dalam perekonomian dunia. Perluasan produksi yang terjadi di negara pusat menyebabkan ekonomi internasional semakin terstruktur yang struktur itu menciptakan kesenjangan. Di antara negara pinggiran dan pusat, terdapat negara *semi-periphery*, yaitu negara yang belum mencapai posisi pusat, namun sudah meninggalkan posisi pinggiran. Negara *semi-periphery* adalah “negara dunia kedua” yang bercirikan tidak, atau belum demokratis, tidak mempunyai pengaruh yang cukup besar dan kurang mempunyai kesejahteraan tinggi, seperti India dan

China. Berbeda dengan Marxisme, neo-marxisme melihat imperialisme dari sudut pandang negara *periphery*, dengan cara melihat dampak imperilalisme pada negara-negar dunia ketiga. Menurut kaum Neo-Marxis, revolusi sosialis akan terjadi setelah revolusi borjuis, dan revolusi itu akan berlangsung di negara-negara dunia ketiga seperti China dan Kuba.

Seperti Wallerstein dan Frank, Samir Amin adalah salah satu pengkritik Marxisme Ortodox. Tulisan-tulisannya yang dihasilkan mulai tahun 1974 sampai 2016 tentang imperialisme dan ‘Eurocentrism’ memberikan karakter yang kuat pada argumennya mengenai globalisasi yang dianggapnya merupakan kedok dari imperialisme. Samir Amin dapat dikatakan merupakan, orang yang pertama pencetus perspektif neo-Marxis karena pandangan kritisnya mengenai globalisasi, ekspansi kapitalisme global, dan imperialisme. Meskipun ia tidak menentang globalisasi Amin menentang wacana ideologis dominan globalisasi. Sebagai alternatif, Amin membangun sebuah proyek humanis globalisasi, satu satunya adalah melalui cara pandang sosialis (socialist outlook) (Amin, 1997b: ix). Beberapa hasil keterlibatan kritisnya dengan globalisasi membuatnya mendapat julukan sebagai sarjana yang menjembatani antara neo-Marxis dan teorisasi Marxis tentang globalisasi dan imperialisme (Noonan, 2010: 150). Amin menyatakan bahwa beberapa aspek globalisasi dilahirkan oleh neoliberalisme, keruntuhan komunisme, hegemoni Amerika Serikat merupakan bentuk penguatan dari Eurosentrisme yang menjadi penopang utama kapitalisme dan globalisasi. Amin secara konsisten berpendapat bahwa masalah utama dari imperialisme dan globalisasi berasal dari hubungan antara pusat dengan pinggiran yang mengalami ketimpangan. Hasilnya adalah perkembangan dan pembangunan yang tidak sama dan tidak merata di antara keduanya sehingga menciptakan kutub abadi, yaitu “*centre*” dan “*periphery*”.

Perkembangan Marxisme menunjukkan tingkat yang pesat dengan munculnya buku berjudul “Empire” tulisan Michael Hardt dan Antonio Negri (2000) memberikan wawasan yang berbeda dalam memahami Marxisme. Mereka memperkenalkan konsep desentralisasi dan deteritorialisasi dari kedaulatan tanpa negara. Inilah yang mereka sebut sebagai “empire”. Mereka menyatakan bahwa imperialisme telah berlalu, dan terjadi ‘pergeseran sejarah yang signifikan’ (Hardt dan Negri 2000, 8). Pergeseran yang mereka maksudkan adalah globalisasi produksi kapitalis dan perubahan dalam hubungan kekuatan global di mana kekuatan ekonomi dan kekuatan politik terjadi secara bersama-sama dan membentuk ‘a properly capitalist order’ (Hardt & Negri, 2000: 8-9). Proses globalisasi tidak berjalan searah: terdapat globalisasi ‘dari atas’ (*top-down*), yang dapat ditolak; Ada pula globalisasi ‘dari bawah’ (*globalization from below*) di mana ‘kekuatan kreatif dari orang banyak yang menopang Empire. Globalisasi jenis ini juga mampu secara mandiri membangun counter-Empire, melalui sebuah organisasi politik alternatif dari arus global dan pertukaran’ (Hardt & Negri, 2000: xv). Untuk mengulas keberadaan ‘Empire’. Hardt dan Negri menekankan analisisnya pada globalisasi dari atas, yakni globalisasi yang dilakukan oleh negara.

Untuk menjelaskan rumitnya sistem yang berlangsung dalam “empire”, mereka menggambarkan bahwa di tengah ‘Empire’ terdapat berbagai perpaduan kompleks dari sistem dan hierarki. Agar mampu berfungsi, ‘Empire’ memerlukan kekuatan yang mapan untuk mendukungnya. Menurut Hardt dan Negri hal ini agak paradoks mengingat ‘Empire’ adalah entitas yang terdesentralisasi dan ter-de-teritorialisasi. Kompleksitas Empire didukung oleh banyak hal, salah satunya adalah melemahnya kedaulatan negara. Berbagai proposisi Hardt dan Negri tentang empire menimbulkan banyak pertanyaan, seperti apakah AS bertindak sebagai negara imperialis atau hanya sebuah kekuatan besar yang telah memiliki kapasitas yang diperlukan untuk menjaga ketertiban

dalam jaringan desentralisasi dari kekuatan kapitalis? Apakah globalisasi mengubah sistem negara dan mengikis negara-bangsa sedemikian rupa ke sebuah titik yang menempatkannya pada bentuk-bentuk politik yang tidak diperlukan lagi? Apa yang telah berubah dalam kapitalisme? Adalah imperialisme sudah berlalu? (Noonan, 2010: 169). Menurut Hardt dan Negri, transisi dari modernitas ke postmodernitas dan munculnya 'Empire', merupakan manifestasi dari kekaisaran sebelumnya (Romawi, Spanyol, dan Inggris). Bentuk baru tidak dibatasi oleh batas-batas nasional, juga tidak memerlukan 'pusat' (Noonan, 2010: 169).

Menilik tulisan-tulisan yang mengkritisi Marxisme ortodox di atas, nampak bahwa Neo-Marxisme dan Strukturalisme menawarkan cara pandang alternatif dalam menyikapi perkembangan ekonomi-politik internasional. Mereka melancarkan kritik terhadap marxisme yang dianggap terlalu utopis dalam mencapai tujuannya. Dalam mencapai perdamaian dan keamanan, baik marxis maupun variannya bersepakat tentang adanya kesetaraan dan penghapusan kelas. Dalam kondisi seperti itu masyarakat hidup dalam sistem sosioekonomi yang tidak terdapat eksploitasi.

Potret Hubungan Internasional dan Relevansi Kontemporer

Apabila dibahas dalam kajian keilmuan, khususnya kajian ilmu Hubungan Internasional, ditemukan bahwa ajaran Marxisme terus berkembang mengikuti proses perubahan dunia. Banyaknya interpretasi dan varian Marxisme yang lahir setelah meninggalnya Marx, memang sebagian menimbulkan kebingungan. Beberapa varian tersebut bahkan menimbulkan kontradiksi dalam ajaran Marxisme itu sendiri. Justru di sinilah letak dinamika perspektif Marxisme.

Marxisme

Perbedaan mendasar antara perspektif Realisme dan Liberalisme dengan Marxisme adalah fokusnya pada aspek ekonomi, bukan pada konflik dan kerja sama antar negara. Tidak seperti pandangan liberalisme, Marxisme beranggapan bahwa sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari campur tangan pemerintah/negara. Marxisme juga menolak pandangan kaum realis yang lebih mengutamakan politik daripada ekonomi. Jika perspektif Realisme dan Liberalisme memandang konflik dalam hubungan internasional terjadi dalam hubungan antarnegara, Marxisme memandang hubungan antarkelaslah yang menjadi penyebab konflik. Dengan demikian Marxisme mengesampingkan hubungan antarnegara yang merupakan komponen penting dalam sistem internasional.

Kontribusi penting kajian Marxisme dan strukturalisme di dalam Hubungan Internasional adalah pengenalannya pada dimensi ekonomi dan pemahaman pada sisi emansipatoris. Selain itu, salah satu yang membedakan antara pendekatan utama dalam Hubungan Internasional dengan pendekatan Marxist adalah sifat “ahistoris” pendekatan utama, terutama pendekatan realis yang cenderung melihat negara sebagai lembaga yang otonom dan bebas. Sebaliknya, melalui materialisme historis, Marxisme mewakili sebuah teori normatif dan analisis sistematis yang bersifat alternatif dalam disiplin Hubungan Internasional dengan menanggapi secara terbuka kepada peristiwa dan dogmatisme konvensional yang dominan dalam teori hubungan internasional. Metodologi Marxisme yang bersifat dialektik adalah metodologi yang kurang dimanfaatkan dalam teori HI kontemporer, yang sekaligus merupakan keterbatasan yang signifikan untuk studi politik dunia. Tidak adanya pemahaman tentang faktor historis dalam teori-teori mainstream, menjadikan faktor tersebut penting untuk memahami politik dunia. Perspektif Marxis menawarkan dasar untuk memahami politik dunia melalui unsur intersubjektif antarmanusia.

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

Setelah lebih dari satu abad berkembang dan melalui evolusi panjang, sebagai pendekatan teoritik, Marxisme belum banyak digunakan sebagai alat analisis. Selain itu, di dalam Marxisme juga terjadi kontradiksi dan beberapa bagian bahkan telah usang. Sekalipun demikian, kontribusi besar Marxisme untuk teori Hubungan Internasional bersifat tambal sulam dan agak terbelakang/tidak terlalu populer dalam literatur Hubungan Internasional. Perspektif konvensional Hubungan Internasional cenderung meminggirkan peran materialisme historis di dalam tatanan politik global, sehingga mengaburkan pemahaman kritis dari kontribusi yang bersifat interpretatif perspektif Marxisme. Sebagai suatu disiplin didominasi oleh teori ahistoris dan berpusat pada negara, Hubungan Internasional tidak mampu menangani secara analitis dan normatif atas transformasi kontemporer yang terjadi dalam sistem global. Ketidakmampuan perspektif Hubungan Internasional utama/dominan untuk memahami historisitas sistem negara disebabkan karena kuatnya pengaruh realisme struktural.

Pada dasarnya, kajian kontemporer Hubungan Internasional yang mempersoalkan ketimpangan dan ketidakadilan dapat dikaji melalui perspektif Marxisme, khususnya Neo-Marxisme dan Strukturalisme. Tulisan para sarjana Neo Marxist/Strukturalis seperti yang telah ditampilkan di atas, menemukan relevansi apabila digunakan untuk menganalisis masalah kontemporer Hubungan Internasional yang banyak menimbulkan kesenjangan. Sebagai contohnya, berakhirnya Perang Dingin memunculkan spekulasi tentang kemenangan kapitalisme dan berakhirnya komunisme. Negara-negara dengan sistem politik komunis seolah-olah menunjukkan ketidakberdayaannya dengan diadopsinya sistem pasar, tak terkecuali China, yang merupakan negara komunis terbesar dan paling berpengaruh. Keberhasilan pembangunan Korea Selatan yang dikontraskan dengan keterpurukan Korea Utara juga sering digambarkan sebagai contoh “kegagalan” komunisme.

Marxisme

Muncullah pertanyaan, apakah “keterbelakangan” ekonomi yang dialami pewaris komunisme seperti Kuba dan Vietnam juga menunjukkan tidak ketidakberhasilan penerapan ajaran Marxisme dalam praktek?

Perkembangan Marxisme sebagai sebuah paradigma bahkan tidak pernah ada habisnya. Interpretasi yang beragam atas ajaran Marxisme memberi ruang yang luas bagi pengembangan pendekatan baru, bahkan gerakan baru. Secara umum, para pengembang Marxisme seringkali dikelompokkan dalam aliran alternatif/radikal. Pada umumnya terdapat tiga pola dalam perkembangan Marxisme. Pertama, mengkritisi ajaran Marxisme Ortodox; Kedua, mengkritisi perkembangan kapitalisme dan dampaknya bagi masyarakat luas; Ketiga, mereka yang berkontribusi dalam menyuarakan hak-hak sipil dan dekolonialisme. Kelompok ketiga ini melahirkan gerakan “Kiri Baru” (the New Left). Gerakan “Kiri Baru” adalah fenomena unik di tengah arus deras kapitalisme. Gerakan ini memberi warna tersendiri terhadap kajian Marxisme. Salah satu tulisan yang mengawali lahirnya gerakan “Kiri Baru” dan munculnya kaum alternatif/radikal baru di antaranya adalah C. Wright Mills (1916-1962) yang menulis buku *The Power Elite* pada tahun 1956. Buku tersebut mengungkapkan bahwa Amerika Serikat semakin dikuasai oleh kelompok elite yg terdiri atas pengusaha-pengusaha besar dan pemilik modal yang berkolaborasi dengan pemerintah dan pemimpin-pemimpin serikat buruh. Pada tahun 1958 Mills menulis buku *Causes of World War III*, Mills mengamati munculnya militerisme di antara elit karena banyak elite adalah orang-orang militer. Menurut Mills, munculnya negara militer adalah untuk melayani kepentingan elit masyarakat industri. Kemunculan elit militer tidak lain merupakan wujud dari kurangnya visi dan kepemimpinan yang inovatif. Kepemimpinan militeristik ini didukung oleh perusahaan-perusahaan besar yang bekerjasama dengan elite pemerintah (Elwell, n.d). Tulisan

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

Mills memicu munculnya para penerus ajaran Marx yang berciri radikal.

Aliran Kiri Baru semakin populer dan berkembang dengan banyak pengikut setelah terbitnya buku berjudul “Monopoly Capital” yang ditulis oleh Paul Baran dan Paul Sweezy pada tahun 1968. Tulisan mereka memberi kontribusi besar bagi teori Marxist, sekaligus mengatasi kebuntuan teori tersebut dalam menjelaskan peran perusahaan-perusahaan besar dalam kompetisi global. Tulisan Baran dan Sweezy menggeser perhatian dari asumsi ekonomi kompetitif kepada ekonomi monopoli yang berkaitan dengan hadirnya perusahaan-perusahaan raksasa yang mendominasi proses akumulasi modal di era kontemporer (Mattick, 1978). Tulisan Baran dan Sweezy membuka era baru dengan lahirnya pendekatan Neo-Marxisme dengan mengetengahkan analisis tentang transformasi di dalam kondisi ekonomi dan politik global.

Berbagai isu hubungan internasional dapat dianalisis melalui perspektif Marxisme, mulai dari globalisasi sampai dekolonisasi; mulai dari perang melawan terorisme sampai konflik etnis; mulai dari kejahatan transnasional sampai kegagalan regionalisme; mulai dari isu imigrasi sampai perubahan iklim; mulai dari munculnya korporasi global sampai protes lokal, dan sebagainya. Tersedia ruang yang amat luas untuk mengulas persoalan hubungan internasional kontemporer melalui perspektif Marxisme.

Daftar Pustaka

- Amin, Samir, (1997), *Capitalism in the Age of Globalization*, Zed Books.
- Buhle, Paul, (1987), *Marxism in the United States: Remapping the American Left*, Verso, Haymarket Series.
- Burchill, Scott & Linklater, Andrew, (1996), *Theories of International Relations*, St. Martin's Press.
- Elwell, Frank W., (n.d.), "C. Wright Mills on the Power Elite", Online [<http://www.faculty.rsu.edu/users/f/felwell/www/Theorists/Essays/Mills2.htm>] Diakses 12 November 2016.
- Evans, Graham & Newnham, Jeffrey, (1998), *The Penguin Dictionary of International Relations*, Penguin Group.
- Flammini, R., (2008), "Ancient Core-Periphery Interactions: Lower Nubia During Middle Kingdom Egypt (CA. 2050-1640 B.C.)", Dalam: *Journal of World-Systems Research*, Volume XIV/1, 50-74.
- Gilpin, Robert, (1987), *The Political Economy of International Relations*, Princeton University Press.
- Hardt, Michael & Negi, Antonio, (2000), *Empire*, Harvard University Press.
- Hobden, S & Jones, Richard W., (2001), "Marxist theories of International Relations", dalam, Baylis, John & Smith, Steve, *The Globalisation of World Politics*, (eds.), Oxford University Press.
- Jackson, Robert & Sorensen, Georg, (1999), *Introduction to International Relations*, Oxford University Press.
- Jessop, Bob, (2012), "Marxist Approaches to Power", dalam, Amenta, E. & Nash, K., Scott, A. *The Wiley-Blackwell Companion to Political Sociology*, (eds.), Oxford:

Blackwell, 3-14.

Malo, Egri, "What should Marxism propose to International Relations?", London Metropolitan University, London, UK online [<http://www.academicus.edu.al/nr10/Academicus-MMXIV-10-131-169.pdf>]. Diakses 12 November 2016

Mattick, Paul, (1987), "Anti-Bolshevik Communism Paul Mattick", Merlin Press, 1978. Online [<https://www.marxists.org/archive/mattick-paul/1966/monopoly-capital.htm>]. Diakses 20 November 2016.

Murphy, Craig, (2007), "The Promise of Critical IR, partially kept", *Review of International Studies*, Vol.33, hal.121.

Noonan, Murray, (2010), *Marxist Theories of Imperialism: Evolution of a Concept*. Ph.D Thesis. Melbourne, Victoria University.

Steans, Jill, Pettiford, Lloyd & Diez, Thomas, (2005), *Introduction to International Relations, Perspectives & Themes*, 2nd edition, Pearson & Longman.

Walker, RBJ., (1989), "History and Structure in the Theory of International Relations", *Millennium – Journal of International Studies*, 18(2), 167.

Wesson, R., (1976), *Marxism: For and Against*, Temple Smith.

Wight, M., (1960), "Why is there no International Theory?", *International Relations*, 2(1), 35-48.

www.sociology.org.uk/as4i4c1.pd. *Marxism: Basic Principles*.

<<<<<>>>>>

Bab 7

Konstruktivisme

I Gede Wahyu Wicaksana

Pengantar

Konstruktivisme adalah pendekatan teoritis Hubungan Internasional (HI) yang mulai populer sejak dekade 1990an setelah Perang Dingin berakhir. Bab ini membahas mengenai; asal mula kemunculan perspektif konstruktivisme dalam Studi HI kontemporer, karakteristik dasar dan prinsip utama konstruktivisme, cara pandang konstruktivis tentang politik global, dan relevansi konstruktivisme sebagai referensi teoritis maupun metodologis untuk kegiatan analisis serta riset hubungan internasional.

Sebagai penuntun diskusi, perlu disampaikan bahwa yang dimaksud konstruktivisme dalam buku ini adalah perspektif teoritis HI yang berseberangan secara ontologi, epistemologi dan metodologi dengan rasionalisme ala Amerika (*American rationalism*) termasuk neorealisme dan neoliberalisme (neo-neo) di satu sisi, dan bukan merupakan bagian dari teori kritis¹ (*critical theory*) atau perspektif pospositivisme, seperti feminisme, Teori Kritis Mazhab Frankfurt dan posmodernisme. Agar lebih jelas, maka pembahasan mengenai konstruktivisme disituasikan dalam konteks perdebatan; rasionalisme vs. konstruktivisme dan konstruktivisme vs. teori kritis sebagaimana dikemukakan oleh Reus-Smit (2005).

1 Teori Kritis (dengan awalan huruf besar digunakan untuk merujuk kepada teori-teori sosial dan HI yang diinspirasi oleh Mazhab Frankfurt. Sedangkan teori kritis (tanpa awalan huruf besar) digunakan untuk merujuk teori-teori sosial dan HI posstrukturalis secara umum yang mencakup; Mazhab Frankfurt, posmodernisme, feminisme, dan poskolonialisme.

Kemunculan Konstruktivisme dalam Studi HI

Kemunculan konstruktivisme dalam Studi HI tidak terlepas dari pengaruh diskursus-diskursus konstruktivis yang lebih dahulu berkembang dalam Filsafat Ilmu dan Filsafat Sosial. Gagasan fundamental konstruktivis secara umum berkaitan erat dengan hakikat pengetahuan yang senantiasa terikat pada ide atau konsep ciptaan manusia; oleh sebab itu manusialah yang membuat dunia sosial (terjemahan dari *social world*) dimana mereka tinggal (Phillips, 2007: 61-62). Dengan demikian fakta dalam wujud fisik maupun sosial tidak bisa berbicara sendiri kepada para pengamat, namun hanya merespon pertanyaan yang diajukan oleh sang pemilik ide/pengamat. Para penganut cara pandang konstruktivisme tentang hakikat dunia sosial dalam Studi HI mengadopsi premis konstruksi sosial (*social construction*) bahwa individu dan kelompok secara aktif menciptakan lingkungan tempat mereka berinteraksi – dari level mikro hingga makro, walaupun mereka tidak mampu mengatur seluruh kejadian dan faktor eksternal seperti yang diinginkan. Sehingga dalam konteks politik global tindakan para aktor dimungkinkan, dan pada waktu bersamaan dibatasi, melalui pelbagai kondisi serta institusi yang sudah berevolusi secara historis. Cara pandang konstruktivis mengenai karakter hubungan antaraktor internasional demikian dikonseptualisasikan oleh Alexander Wendt (1992) menjadi sebuah proposisi ‘anarchy is what states make of it’, yang kemudian menjadi ciri khas dan label paradigma konstruktivisme HI.

Berbeda dengan teorisasi mapan (*established theories*), seperti perimbangan kekuatan (*balance of power*) dari realisme dan perdamaian demokratis (*democratic peace*) dari liberalisme, konstruktivisme bukan merupakan sebuah teori pengetahuan mengenai masalah-masalah sosial dan politik, melainkan sebuah kerangka berpikir analitis yang memuat beberapa asumsi tentang aktor dan faktor yang tidak ditemukan, diperhatikan, dan dimuat dalam teori-

Konstruktivisme

teori HI yang berasal dari paradigma realisme/neorealisme dan liberalisme/neoliberalisme. Misalkan, Weber (2005) menjelaskan konstruktivis berasumsi tentang perubahan dalam politik global tidak hanya dapat dilakukan oleh aktor negara berdaulat. Terdapat aktor-aktor lain, di samping negara sebagai aktor penting, seperti individu, kelompok elit, birokrasi, korporasi, organisasi internasional dan gerakan sosial yang berperan di tengah arena hubungan antarbangsa. Sehingga konstruktivisme berbeda dengan neo-neo yang memposisikan negara sebagai satu unit aktor utuh (*unitary actor*).

Mengenai faktor yang bekerja di balik politik global, konstruktivis tidak serta merta mengabaikan peran dan pengaruh faktor kekuatan material, seperti kapabilitas militer, namun berpandangan bahwa seperangkat ide yang tertuang dalam norma internasional turut menentukan bagaimana aktor-aktor negara dan nonnegara bertindak di tengah arena internasional. Anarki bukanlah suatu tatanan diskrit (terputus secara evolusioner) dan eksklusif, namun mempunyai elemen-elemen yang beroperasi secara kontinyu sesuai aturan main hukum internasional yang mengatur perilaku dan relasi antaraktor, disebut pula subyek hukum internasional. Selain itu mekanisme kooperatif seperti diplomasi berfungsi signifikan untuk merekonsiliasikan perbedaan ekspektasi aktor-aktor yang menginterpretasi kehadiran satu dengan yang lain secara berbeda. Dengan kata lain konstruktivis berpendapat aspek sosial efektif dalam mempengaruhi praktek politik global (Kubalkova ed. 2000).

Aspek sosial yang dimaksud –ide dan norma– oleh konstruktivis beraneka ragam, sehingga menghasilkan perdebatan dan kontradiksi internal di antara para konstruktivis. Apabila literatur tentang kemunculan HI konstruktivis ditelusuri secara seksama, maka akan diperoleh bermacam ketidaksepakatan intelektual yang tajam di antara para konstruktivis. Sebagai contoh dalam konstruktivisme ada

aliran konvensional (Hopf, 1998) dan aliran kritis (Price dan Reus-Smit 1998). Ketidaktepahaman antara konstruktivisme konvensional dan kritis terpusat pada pertentangan yang berakar pada gagasan awal yang mengilhami kemunculan proyek riset konstruktivis dalam Studi HI. Konstruktivisme konvensional hadir sebagai revisi dan reformasi terhadap perspektif neo-neo yang didominasi oleh argumentasi mengenai kekuatan dan kepentingan material aktor di tengah sistem internasional yang anarkis. Bagi konstruktivis konvensional identitas aktor juga berimplikasi pada sistem internasional, dan terbukti berpengaruh lebih besar daripada kapabilitas dan kepentingan strategis negara. Sedangkan konstruktivisme kritis hadir sebagai agenda revisi dan reformasi terhadap kelemahan-kelemahan teoritis neo-neo yang tidak memberi ruang fleksibel bagi eksplorasi wacana kritik sosial, termasuk skeptisisme, konflik dan transformasi sosial. Mereka terinspirasi oleh Sosiologi posstrukturalis Foucault, Derrida, Gramsci dan varian Marxisme Mazhab Frankfurt. Meskipun demikian Adler (2005: 11) melihat perbedaan antara konstruktivisme konvensional dan kritis hanya sebatas pilihan subyektif para penstudi dan peneliti. Pada dasarnya mereka memiliki pandangan sama dalam hal tujuan yakni 'sees the world as a project under construction, as becoming rather than being'. Jadi kedua spektrum konstruktivisme HI menolak eksistensialisme.

Lebih lanjut Adler (2005: 12) menambahkan kesamaan antara konstruktivisme konvensional dan kritis tampak secara ontologis, epistemologis dan metodologis. Dari sisi ontologi – pengertian tentang eksistensi dan ruang lingkup obyek studi, konstruktivis sepakat bahwa dunia sosial merupakan struktur dan proses yang bermakna secara intersubyektif dan kolektif. Dari sisi epistemologi – pengertian mengenai esensi pengetahuan, konstruktivis berbagi pandangan bahwa interpretasi adalah bagian intrinsik dari riset berbasis Ilmu Sosial, dan mereka menekankan kepada generalisasi yang bersifat kontingensi; tergantung kepada berbagai variabel.

Konstruktivisme

Dan dari sisi metodologi – prinsip-prinsip operasionalisasi penelitian, konstruktivis baik yang berlabel konvensional maupun kritis menolak prinsip individualisme metodologis neo-neo yang secara berlebihan menempatkan unit-unit eksplanasi dan relasi di antara mereka ke dalam beberapa peringkat analisis, misalkan individu, negara dan sistem. Para konstruktivis keleluasaan di dalam memperlakukan variabel-variabel penjelas fenomena dan tidak mau terikat secara ketat oleh kaedah-kaedah positivisme neo-neo.

Asumsi Dasar dan Prinsip Utama Konstruktivisme

Sebagai sebuah perspektif teoritis alternatif terhadap neo-neo dalam Studi HI kontemporer, konstruktivisme menawarkan gagasan-gagasan yang berbeda dengan tiga unsur fundamental kerangka analisis dan teorisasi neo-neo, yang meliputi; individualisme metodologis, materialisme kepentingan yang berlandaskan pada pilihan-pilihan rasional, dan sistem anarkis yang mendorong perilaku strategis aktor internasional. Untuk memudahkan pemahaman mengenai asumsi dasar dan prinsip utama konstruktivisme, dirumuskanlah pertanyaan sederhana yakni; mengapa aktor (negara berdaulat) melakukan tindakan eksternal tertentu? Jawaban yang diberikan oleh neo-neo sangat mudah ditebak; tindakan eksternal atau kebijakan luar negeri ditujukan untuk meraih kepentingan nasional (kepentingan keamanan bagi neorealis dan kepentingan ekonomi bagi neoliberal) di bawah kondisi sistemik yang anarkis. Dengan cara berpikir neo-neo hubungan antara negara berdaulat dengan aktor internasional lain – misalkan negara-negara tetangga di kawasan dikelola dengan logika strategis. Kerja sama dibuat berdasarkan atas identifikasi kesamaan kepentingan material. Kebijakan yang tidak segaris dengan haluan materialisme strategis dalam jangka menengah maupun jangka panjang akan dapat merongrong kapabilitas nasional berupa infrastruktur keamanan dalam perspektif neorealis dan sumber daya ekonomi beserta kemampuan

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

produksi dalam perspektif neoliberal. Sebagai konsekuensi penyimpangan orientasi kebijakan strategis, maka negara berdaulat bisa menjadi negara gagal (Crawford, 2000).

Respon neo-neo tidak akan cukup untuk menjangkau aspek-aspek interaksi internasional yang lebih luas dan kompleks. Ambil contoh dinamika yang berkenaan dengan posisi dan keterlibatan aktor nonnegara serta isu keamanan transnasional seperti terorisme; agenda komunitas global seperti perubahan iklim, migrasi, dan keberagaman hayati yang memiliki dimensi persoalan mengenai mekanisme koordinasi berbeda dengan imperatif anarki tentang keharusan untuk berkompetisi dengan dukungan kekuatan nasional. Di luar tema-tema empiris dan kasus unik tersebut, masih ada sederet pertanyaan problematis yang mengarah kepada kritik terhadap reliabilitas neo-neo sebagai penjelasan untuk fenomena politik global pasca Perang Dingin. Dua yang paling menarik adalah; bagaimana neo-neo bisa menjelaskan dengan cara apa sistem internasional mengkondisikan perilaku negara-negara berdaulat sehingga mau menerima otoritas supranasional di atas kepentingan strategis mereka; sebagaimana didemonstrasikan dalam pergeseran kebijakan dari aliansi militer menuju masyarakat internasional seperti Uni Eropa dan ASEAN (Acharya, 2000). Selain itu ada pula fenomena yang mengindikasikan mengapa sistem internasional yang didukung oleh orde militer dan ekonomi kekuatan adi daya seringkali gagal mencegah krisis di wilayah-wilayah subsistem. Arah pertanyaan ini adalah seberapa valid instrumen strategis kebijakan luar negeri bisa menjamin stabilitas di dalam masyarakat internasional yang plural (Weber, 2007: 100-101).

Pertanyaan-pertanyaan di atas, dan masih banyak lagi, yang diajukan oleh para pengkritik neo-neo membuat status akademik perspektif alternatif menjadi kian meningkat. John Gerard Ruggie (1998) menantang neo-neo terutama argumentasi utilitarian yang mendasari materialisme strategis,

Konstruktivisme

dan kemudian menunjukkan bahwa banyak fenomena politik dan diplomasi internasional yang tidak bisa dijelaskan secara gamlang oleh rasionalisme. Richard Ashley (1986) menguji asumsi teoritis neorealisme dan berhasil membuktikan bahwa perilaku kebijakan luar negeri tidak bisa dipisahkan dari pemaknaan yang ditimbulkan terhadap agensi bersangkutan. Argumen Ashley menjadi salah satu 'batu bata' fondasi pembentukan kerangka berpikir konstruktivisme yang mengedepankan signifikansi identitas dan nilai serta norma dalam politik global. Kedua perangkat analisis yang bersifat ideasional diabaikan oleh teori HI rasionalis. Namun bagi konstruktivisme, mereka berpengaruh; siapa dan bagaimana negara berinteraksi di lingkungan eksternal menjadi sorotan utama konstruktivisme (Kowert, 2001). Konstruktivis memberikan perhatian besar terhadap cara negara mengkonsepsikan atau mempersepsikan kepentingan keamanan dan ekonomi. Oleh sebab itu, mereka mendedikasikan sumber daya intelektual guna mengkonfirmasi arti penting kesamaan kepercayaan dan nilai (*shared beliefs and values*) di antara aktor-aktor internasional, serta efektivitas institusi-institusi global dalam proses negosiasi dan pembuatan aturan bersama demi mengamankan proses interaksi internasional yang dinamis (Hobson, 2000). Sudah barang tentu konsentrasi konstruktivis berada di luar jalur logika kepentingan pribadi yang melandasi tindakan rasional menurut neo-neo.

Asumsi dan contoh yang ditampilkan di atas bisa menjadi pegangan bagi para penstudi HI yang tertarik dengan konstruktivisme mengenai mengapa nilai, norma, ekspektasi, aturan main dan pembelajaran atau sosialisasi senantiasa muncul sebagai konsep-konsep pokok dalam karya para konstruktivis. Konstruktivisme lalu dapat dipahami sebagai perspektif HI yang mengedepankan makna dan interpretasi bersama sebagai komponen analitis esensial di balik tindakan para aktor. Konstruktivis memposisikan peran gagasan lebih penting daripada teori HI konvensional yang berfokus pada kepentingan material (Katzenstein ed. 1996). Berbeda dengan

neo-neo yang menganggap faktor di balik perilaku aktor – dalam hal ini materialisme strategis – bersifat relatif konstan, konstruktivis menganut pandangan bahwa aspek ideasional di balik perilaku aktor akan selalu mengalami perubahan sebagai respon terhadap aneka dimensi sosial dan sosialisasi yang terus berlangsung (Klotz, 1995). Dengan demikian konstruktivis selalu mengadakan proses konstruksi dan rekonstruksi terhadap fakta dan praktek sosial yang bekerja di balik tatanan politik global (Wendt, 1999: 3-4).

Perkembangan Konstruktivisme dan Teori Kritis

Setelah meninjau secara ringkas perbedaan asumsional yang menempatkan konstruktivisme dalam posisi kontradiktif terhadap rasionalisme, pada bagian ini dibahas mengenai perkembangan perspektif konstruktivisme yang mengindikasikan posisi terpisah dan mandiri dari teori kritis, walaupun konstruktivis berhutang intelektual kepada para teoritis kritis seperti Teori Kritis Mazhab Frankfurt dan posmodernisme Perancis. Meskipun demikian perlu disampaikan bahwa teori kritis bukan satu-satunya sumber referensi bagi para perintis konstruktivisme dalam Studi HI. Ruggie, Kratochwil, dan Onuf mempelajari tradisi keilmuan di luar teori kritis yang bahkan bernuansa positivisme, seperti Hukum Internasional, Sosiologi modern, dan Filsafat untuk meramu kritik mereka terhadap rasionalisme. Walhasil, konstruktivisme pun menjadi ajang uji coba transdisiplinaritas *versus* interdisiplinaritas² dalam Studi HI. Bagi mereka yang jarang membaca koleksi literatur HI dengan pendekatan teoritis maupun metodologis transdisiplin, walaupun sudah terbiasa dengan kajian interdisiplin, akan berpendapat

2 Pengertian transdisiplin dan interdisiplin dalam Studi HI secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Transdisiplin berarti memanfaatkan perangkat ontologi, epistemologi dan metodologi dari disiplin di luar HI demi kepentingan keilmuan HI. Sedangkan interdisiplin berarti mengkombinasikan antara unsur-unsur epistemologi dan metodologi disiplin HI dengan disiplin lain, namun tetap berpijak pada ontologi HI, demi kepentingan keilmuan HI. Sehingga kedua metode keilmuan hanya berbeda dalam hal proporsi adopsi, absorpsi dan properti instrumen pengetahuan selain HI.

Konstruktivisme

bahwa usaha akademik konstruktivis melanggar kaedah-kaedah paradigmatik sains normal (*normal science*) yang mengutamakan pencapaian keajegan teori dan metode sebagaimana ditandaskan oleh filosof Thomas Kuhn (1970). Karakter transdisiplin konstruktivisme semakin kental terutama setelah tragedi 11 September 2001 yang membuka lebar ruang diskusi mengenai faktor-faktor sosial khususnya identitas religiokultural sebagai representasi kekuatan nonnegara yang berpengaruh terhadap dinamika kepentingan dan perilaku aktor kebijakan luar negeri di arena politik global (lihat misalkan Shaffer ed. 2006).

Konsekuensi dari agenda transdisiplin ataukah interdisiplin dalam konstruktivisme adalah perbedaan cara pandang mengenai metodologi riset di antara para konstruktivis. Di satu sisi, para konstruktivis interdisiplin tidak mau sepenuhnya mengakui dan mengadopsi metodologi ala perspektif teori kritis, dan sebaliknya menyandingkan metodologi dan teori kritis dengan unsur-unsur positivisme. Mereka berpendirian konservatif khususnya menyoal keperluan menjadi peneliti yang obyektif dan mendasari penilaian epistemologis menurut bukti empiris. Sementara itu, kalangan konstruktivis transdisiplin menolak positivisme dan mengambil haluan teoritis kritis yang percaya bahwa tidak ada peneliti maupun obyek penelitian beserta relasi di antara mereka yang benar-benar linear – lepas dari intervensi subyektivitas (Klotz dan Lynch, 2014: 16-20). Agar lebih jelas mengenai tren tema-tema transdisiplin yang saat ini menjadi warna konstruktivisme HI, maka perlu untuk meninjau terlebih dahulu aspek-aspek penting dari teori kritis yang menjadi landasan pemikiran para konstruktivis.

Teori kritis merupakan himpunan pengetahuan yang kompleks, dan bahkan sangat kompleks untuk diceritakan hanya dalam satu bab buku. Sintesis teori kritis mencakup bidang multidisiplin; mulai dari psikologi, filsafat, anthropologi, hingga seni dan tata ruang. Oleh sebab itu

hanya akan diperkenalkan beberapa bagian kecil, yang mendasar dan penting, dari teori kritis yang secara langsung berkontribusi untuk mentransformasi paradigma Studi HI kontemporer. Ulasan dapat dimulai dari fondasi dasar ontologis ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh seorang sarjana terkemuka dari Mazhab Frankfurt Jurgen Habermas (dikutip dari Fultner, 2014) yang menulis buku *Knowledge and Human Interest*, yakni sebagaimana telah disinggung di sub-bab mengenai asal usul konstruktivisme, fakta tidak berbicara secara langsung atau independen kepada para peneliti/penstudi/pengamat. Mereka yang berkepentingan terhadap fakta yang kemudian memberikan pemaknaan atau definisi sesuai dengan tujuan masing-masing. Karena itu, konstruksi fakta berimplikasi kepada relasi antara subyek dan obyek penelitian yang tidak pernah netral atau obyektif. Habermas mengemukakan sebuah konsep yang disebut *knowledge constitutive interests* untuk menggambarkan bahwa segala tindakan manusia untuk memproduksi pengetahuan – mulai dari rasa ingin tahu, membuat pertanyaan atas permasalahan yang dijumpai, sampai formulasi jawaban teka teki yang digeluti – merupakan refleksi dorongan kepentingan personal/individual. *Knowledge constitutive interests* dibedakan menjadi tiga jenis, yang secara mudah bisa dipahami sebagai; *instrumental* yang merujuk kepada pengetahuan tentang relasi antarmanusia; *strategic* yang merujuk kepada tujuan untuk mengkoordinasikan tindakan manusia demi mencapai maksud sosial dan politis tertentu; dan *emancipatory* yang merujuk kepada tindakan untuk melawan relasi sosial dan politik yang menindas dan agresif. Konsep *emancipatory knowledge constitutive interest* sangat berpengaruh terhadap teori HI khususnya membidani kelahiran teori normatif kosmopolitanisme. Dua sarjana HI kontemporer yang mendasarkan pemikiran serta karya mereka pada konsep *emancipatory knowledge constitutive interest* adalah Andrew Linklater (2007) dan Richard Shapcott (2001) yang berupaya menteorikan perubahan global melalui etika dialog.

Baik Linklater maupun Shapcott menyarankan komunikasi sebagai kegiatan yang inheren – bermuatan moral – dalam setiap aspek kehidupan manusia, dan di level internasional, menjadi media perubahan yang konstruktif. Argumentasi mereka memang terdengar idealis, bahkan utopis, bagi para positivis dan rasionalis yang selalu meminta bukti serta metode pembuktian bahwa setiap orang pasti akan bertindak secara etis karena didorong oleh moralitas. Tetapi kritik rasionalis yang menyatakan bahwa di dunia nyata, realita sangat berbeda dengan imajinasi teori kritis terlalu menyepelekan kualitas argumentasi yang dibangun oleh para kosmopolitan teori kritis. Yang menjadi inti dari teori etika Linklater dan Shapcott sebenarnya adalah tindakan yang dimaksudkan untuk mengatasi normativitas; tindakan seseorang (pembuat kebijakan atau politisi) adalah etis, atau sebaliknya tidak etis, tergantung kepada pemahaman mereka tentang etika, dan bukan karena tujuan emansipatori yang bersandar kepada etika.

Bjola dan Komprobst (2013) memberikan contoh sederhana mengenai praktek diplomasi untuk memahami cara berpikir Habermas, Linklater dan Shapcott tentang kebenaran etika dan moralitas dalam tindakan manusia. Banyak orang mengatakan diplomasi adalah ‘berbohong demi kepentingan negara’. Seorang diplomat tidak akan pernah menyampaikan kebenaran seperti apa adanya apabila hal dimaksud berkaitan dengan kepentingan nasional. Namun, berbohong hanya akan menjadi strategi yang efektif manakala mereka yang dibohongi menganggap benar. Jika semua diplomat berbohong, maka kegiatan diplomasi akan terhenti seketika, sebab diplomasi membutuhkan paling tidak sekali waktu ada kebenaran yang diungkapkan. Ilustrasi diplomasi dan berbohong mengisyaratkan terdapat kesenjangan antara nilai moral dan nilai strategis. Berbohong sebagai sebuah respon strategis – memanipulasi lawan dengan cara memberi informasi yang bukan sebenarnya – ternyata merugikan bagi proses diplomasi. Terlebih lagi kebohongan hanya akan

efektif ketika pihak lain menempatkan kebenaran sebagai yang terpenting dari berbagai hal lain.

Contoh mengenai kebohongan sebagai praktek diplomasi mengilustrasikan relasi antara individu dan bentuk-bentuk kolektivitas dalam kosa kata moralitas. Konstruksi relasi demikian memetakan ekspektasi yang terbentuk menuju proses bersifat mutualistik, sekaligus memberi indikasi praktis dan peristiwa saat mana ekspektasi tidak terpenuhi. Sebuah perumpamaan lain misalkan adalah dalam sebuah kelas Studi HI di universitas, mahasiswa mengharapkan agar pemikiran dan opini mereka mendapatkan apresiasi. Tetapi karena perilaku dan metode pengajaran dosen yang kurang tepat, harapan tersebut tidak tercapai. Sehingga, para peserta kelas mengeluh dan mengadu kepada otoritas institusi pendidikan bahwa pengajar tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Axel Honneth (1998) mengembangkan teori pengakuan (*recognition theory*) sebagai refleksi dimensi moral dalam relasi sosial. Gagasan Honneth diterima baik dalam disiplin Sosiologi, Ilmu Politik dan Filsafat abad ke-21. Dalam konteks teorisasi HI, Haacke (2005) mengadopsi teori pengakuan Honneth ke dalam teori normatif. Dari perspektif teori normatif, prinsip komunikasi dan dialog sebagaimana dicetuskan oleh Teori Kritis merupakan faktor yang menentukan sifat dan kualitas relasi sosial (implementasi strategis konsep komunikasi dan dialog dalam level hubungan antarbangsa terlihat dalam konsep *trust-building* pada proses diplomasi dan negosiasi). Teoritis Kritis percaya bahwa relasi sosial yang dibangun atas dasar ketidakjujuran tidak akan bermanfaat bagi pihak mana pun, sebab di balik interaksi terdapat tujuan moral demi kebaikan bersama. Oleh sebab itulah, kebajikan (*goodwill*) memegang peranan penting dalam kerja sama antaraktor. Secara umum teori kritis menekankan kepada hakikat relasi kemanusiaan sebagai sarat konflik; dan melekat pada situasi konflikatif,

Konstruktivisme

serba hadir tindakan koersi dan dominasi sehingga terjadi ketidakseimbangan. Tekanan terus menerus yang dialami oleh elemen-elemen sosial dalam interaksi asimetris mendorong upaya perlawanan atau resistensi yang bertujuan semata-mata demi memperoleh pengakuan; sifat pengakuan yang diperjuangkan adalah timbal balik. Dengan demikian, Teori Kritis yang bersumber dari dialektika Hegel dan Marx memandang aspek-aspek seperti moralitas, tujuan bersama, keadilan dan pengakuan penting bagi keberlangsungan sistem secara normal (George, 1994).

Jadi bila dibuat sebuah perbedaan konseptual dasar mengenai status dan fungsi norma dalam interaksi sosial, teori kritis dan konstruktivisme berada di dua sisi yang saling berlawanan. Konstruktivis akan mengatakan sebuah norma internasional valid manakala telah ada kesepakatan umum mengenai signifikansi norma tersebut sebagai referensi tindakan kolektif. Sedangkan, teoritis kritis akan menginterogasi terlebih dahulu berbagai konteks wacana dan motivasi di balik konsensus tentang suatu norma internasional (Cochran, 2004). Meskipun demikian, perbedaan mengenai cara adopsi dan adaptasi perangkat normatif dalam sistem sosial dan relasi antarbangsa di antara konstruktivis dan teoritis kritis bukanlah satu-satunya poin 'pemisah' intelektualitas mereka. Karya-karya individual para konstruktivis maupun teoritis kritis mendemonstrasikan divergensi dalam lebih banyak area khusus; termasuk makna identitas, nilai kolektif, legitimasi politik dan atribut sosial kultural yang melekat pada aktor internasional kontemporer. Untuk keperluan pengenalan, cukup kiranya disampaikan konsepsi dasar normatif yang membedakan kedua perspektif teoritis HI yang sebenarnya mempunyai orientasi analisis sama, yakni ikhwal ketertindasan yang membutuhkan upaya transformasi sosial dan politik.

Relevansi Konstruktivisme untuk Analisis dan Riset HI

Relevansi konstruktivisme sebagai penyedia kerangka analisis dan instrumen riset HI dapat dipetakan dalam dua area pokok dengan varian tematis masing-masing yang lebih spesifik.

Pertama adalah area studi dan riset tradisional, yang mencakup kebijakan luar negeri (*foreign policy*), diplomasi dan konflik internasional, serta organisasi dan hukum internasional. Disebut tradisional karena sejak HI menjadi disiplin mandiri (lepas dari bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan) pada awal 1920an, tema-tema dimaksud telah menjadi pokok bahasan. Dalam perkembangan Studi HI di Amerika Utara dan Eropa Barat, tema-tema tradisional didominasi oleh perspektif neo-neo yang memposisikan negara sebagai aktor utama yang berinteraksi dalam sistem internasional anarkis. Sedangkan kehadiran konstruktivisme sebagai paradigma alternatif memberi warna analisis berbeda, yaitu dengan mereformulasi asumsi dasar aktor utama dan anarki menjadi multiaktor dengan kondisi sistemik bersifat diskursif – tergantung pada bagaimana cara pandang setiap aktor internasional (Reus-Smit, 1995).

Intervensi konstruktivisme membuat pengetahuan dan penelitian HI yang menyoroti perilaku kebijakan luar negeri berbeda secara ontologis dan epistemologis. Dari aspek ontologi, konfigurasi aktor yang mempengaruhi proses pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri bersifat plural. Dalam perspektif neo-neo kebijakan luar negeri dirumuskan dan dijalankan oleh negara berdaulat diwakili elit pemerintahan – individu dan kelompok – beserta para diplomat. Sedangkan dari kaca mata konstruktivis, proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan melibatkan relasi antara struktur negara dengan elemen kekuatan masyarakat. Karakteristik interaksi politik antaraktor tidak melulu didominasi oleh kompetisi kepentingan material, tetapi lebih

kompleks melibatkan ide, nilai dan institusi (Hill, 2003).

Para konstruktivis menjelaskan bagaimana aspek nonmaterial mempengaruhi kebijakan luar negeri, misalkan melalui dua konsep dasar, yakni identitas dan norma. Aktor-aktor internasional bertindak menurut identifikasi mereka terhadap eksistensi aktor lain dan respon mereka terhadap kaedah interaksi yang berlaku dalam lingkungan tertentu (Sato dan Hirata eds. 2008). Resultan dari kedua jenis pengamatan baik terhadap identitas maupun norma adalah persepsi masing-masing aktor tentang situasi eksternal. Berdasarkan atas pemahaman situasional inilah kebijakan luar negeri didesain sebagai respon kognitif, psikologis dan sosial (Beach, 2012). Pendekatan konstruktivis mengenai orientasi kebijakan luar negeri bersifat humanis (*human-centric approach*), yang berarti bahwa faktor intrinsik dalam diri individu yang ambil bagian dalam proses politik berperan penting untuk menentukan arah dan target tindakan (Almezaini, 2012). Jadi tidak seperti para neo-neo rasionalis yang kukuh dengan kalkulasi material strategis, yang mengandaikan individu dan kebijakan ataupun tindakan dilakukan senantiasa berdasarkan perhitungan untung rugi.

Gaya analisis konstruktivis kemudian memberikan nuansa epistemologi sosiokultural di dalam konseptualisasi dan teorisasi HI kontemporer. Misalkan penggunaan konsep persepsi sebagai unit deskripsi fundamental di balik perilaku aktor negara membuka wacana baru bagi tema-tema terkait. Diplomasi dan konflik internasional yang menurut neo-neo adalah media implementasi strategi kebijakan luar negeri dengan landasan pilihan-pilihan rasional semata, kini mempunyai pengertian yang beragam. Konstruktivis menambahkan pemahaman bahwa diplomasi dan konflik antarbangsa merupakan proses interaksi yang ditentukan oleh derajat kesenjangan ataupun keselarasan persepsi satu aktor dengan yang lain mengenai berbagai hal yang menyangkut hubungan mereka, terutama apakah hubungan dua arah di

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

antara mereka mengindikasikan gejala penciptaan kebaikan bersama (*common good*) (Clunan, 2009); dalam hal ini tampak pengaruh Teori Kritis Habermas, Linklater dan Shapcott dalam konsepsi dan metode berpikir konstruktivis. Lebih jauh lagi para konstruktivis mengeksplorasi komponen-komponen sosiokultural yang mendukung proses pembentukan persepsi individual, seperti ajaran agama dan etnisitas (Lapid dan Kratochwill, 1996). Hasilnya adalah percampuran yang tidak mudah dirumuskan secara matematika antara faktor material dan ideasional di balik hubungan antaraktor internasional (Burchill, 2005).

Modifikasi dan penataan ulang paradigma pemikiran juga terjadi dalam subyek positivis seperti organisasi dan hukum internasional. Di antara berbagai tema penting dalam HI tradisional, kajian organisasi dan hukum internasional termasuk yang paling akhir, namun tidak berarti kurang mengesankan, dalam mengadopsi konstruktivisme. Secara substansi kajian mengenai organisasi dan hukum internasional dibingkai melalui kombinasi filsafat hukum modern, Sosiologi empiris klasik dan teori politik Weberian. Dimensi naturalistik sangat kuat dalam berbagai karya akademik HI yang membahas misalkan relevansi organisasi dan hukum internasional dalam menciptakan tatanan dunia yang harmonis (Dunoff, 2013). Pengaruh teori-teori liberal tentang perang dan damai, yang paling populer adalah perdamaian demokratis, terefleksi dalam argumentasi para pengkaji organisasi dan hukum internasional yang memprioritaskan sinergi antara demokrasi/demokratisasi dan perdamaian/upaya resolusi konflik melalui kehadiran pihak ketiga – dalam hal ini Perserikatan Bangsa Bangsa dan lembaga advokasi dan peradilan internasional (Armstrong, Farrell dan Lambert, 2007). Landasan argumentasi liberal ialah penyelesaian konflik internasional melalui mekanisme institusi dan hukum internasional hanya akan efektif apabila ditunjang oleh kekuatan material (*material power*) yang memadai. Dengan kata lain, sumber tertib internasional tetap tergantung kepada

Konstruktivisme

bagaimana aktor-aktor dapat mengelola distribusi kekuatan, yang mana peran norma dan institusi hukum internasional bersifat komplementer.

Sementara itu, para konstruktivis memberikan penekanan yang berbeda dengan materialisme ataupun positivisme hukum internasional ala liberalisme. Faktor identitas, kesepahaman mengenai identitas kolektif lebih berpengaruh daripada observasi kondisi alamiah para aktor. Konstruktivis menggunakan persepsi sebagai alat analisis yang secara kritis memandang bahwa penerimaan maupun penolakan atas keberlakuan tradisi dan aturan main dalam interaksi antarbangsa dilatarbelakangi oleh faktor konsensus. Akibatnya, determinasi kekuatan fisik aktor tidak akan efektif membuat kepatuhan terhadap kaedah internasional yang diterapkan dalam sistem, melainkan seberapa besar kesepakatan bersama; dalam bentuk apa kesepakatan bersama; dan untuk berapa lama kesepakatan bersama bisa dipertahankan melalui komunikasi dan dialog antaraktor. Dalam proses penerimaan norma internasional, konstruktivis mengatakan model sosialisasi yang dipraktikkan di berbagai tempat dan isu berbeda menurut karakter relasi sosial dan budaya yang berlangsung antaraktor (Kratochwill, 2014).

Kedua adalah area riset nontradisional yang mencakup isu transnasionalisme dengan pendekatan interdisipliner dan transdisipliner. Disebut nontradisional karena dua alasan. Yang pertama adalah alasan akademik terkait dengan perkembangan Studi HI terutama pada dekade 1980an yang mendemonstrasikan perdebatan teoritis dan metodis antara neo-neo rasionalis positivis dengan teori kritis; babak yang dikenal juga sebagai 'Third Debate'. Diskursus *Third Debate* memproduksi beberapa sintesis teoritis HI dengan variasi yang rumit. Salah satu yang mudah untuk dibaca adalah tiga kategorisasi teori HI yang masih mencerminkan relevansi level analisis aktor dan faktor, yakni *statist theory*, *transnationalist theory*, dan *structuration theory*. Pokok bahasan di antara

mereka adalah; manakah yang lebih kuat antara negara atau masyarakat dalam menentukan arah perkembangan politik domestik dan global. *Statist theory* menyatakan negara sebagai yang lebih kuat, sementara *transnationalist theory* menyebut kekuatan masyarakat lintas batas dapat melampaui kekuatan negara. *Structuration theory*, yang diinspirasi oleh teori strukturasi dari Anthony Giddens memberi jalan tengah, yaitu bukan persoalan mana yang lebih menentukan antara kekuatan negara atautakah masyarakat, melainkan bagaimana negara dan masyarakat bisa saling mengakomodasi diri untuk menciptakan mekanisme relasi yang progresif (Reus-Smit, 2008). Penulis seperti George Snedeker (2004) berargumen – dengan memakai teori strukturasi Giddens – bahwa negara dan masyarakat menghadapi dilema yang sama ketika berurusan dengan kekuatan ketiga yakni pasar dan kapital di era globalisasi. Dalam konteks inilah teori kritis merespon dengan konsep dialog dan komunikasi ala Habermas (lihat misalkan karya Mackendrick, 2007).

Yang kedua, *Third Debate* memunculkan reaksi negatif namun produktif dari sekelompok sarjana HI yang mengkritik dan menolak perdebatan antarparadigma tanpa akhir. James D. Long et al. (2012) menyebutkan bahwa HI sudah terlalu lama terjebak ke dalam pertentangan metateori yang abstrak, dan konsekuensinya adalah HI kehilangan signifikansi aksiologis atau praktis dari tujuan kegiatan intelektual, seperti aplikasi teori untuk memperbaiki kualitas pembuatan dan implementasi kebijakan serta mendorong perubahan sosial dan politik yang bermanfaat. Intinya, Long dan rekan-rekannya mengeluhkan soal terlalu besar porsi abstraksi yang tidak aplikatif dibandingkan produk akademik yang langsung berguna bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu, HI dan khususnya teori HI harus memberikan perhatian lebih serius, proporsional dan profesional kepada usaha mencari solusi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat internasional (*problem-solving oriented theories*). Gagasan Long et al. (2012) disebut juga pragmatisme. Dalam Ilmu

Konstruktivisme

Sosial dan Filsafat Ilmu, pragmatisme sudah lama dikenal dan menjadi bagian epistemologi yang absah. John W. Burton (dikutip dalam Dunn, 2004) mengembangkan tradisi pragmatisme dalam HI melalui kajian teoritis dan praktis mengenai hakikat konflik dari sisi kebutuhan dasar manusia sebagai alternatif paradigma realisme dengan visi politik kekuatan (*power politics*), dan menyusun kerangka kerja resolusi konflik berdasarkan ukuran-ukuran praksis seperti akses terhadap bahan pangan dan sumber energi.

Pragmatisme dalam konteks teori dan metodologi HI dikembangkan menjadi prinsip-prinsip riset yang membuka jalan selebar-lebarnya bagi kombinasi konseptual dan teoritis lintas paradigma (Wallace, 1996). Semboyan mereka adalah 'eclecticism' atau eklektikisme. Terminologi eklektikisme diadopsi metode analisis Sastra dan Filsafat posstrukturalis, yang dengan cara sederhana dapat dinyatakan sebagai; kombinasi konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode apapun dari berbagai sumber tradisi keilmuan yang relevan untuk kepentingan memecahkan suatu permasalahan (Sil dan Katzenstein, 2010: 1-2). Dengan demikian, bila kedua orientasi teori dan metodologi luaran *Third Debate* ini digabungkan maka menjadi eklektikisme pragmatisme/eklektik pragmatis (Franke dan Weber, 2012). Kata kuncinya adalah *problem solving with combinative approaches*.

Di tengah kedua perkembangan teoritis dan metodis inilah konstruktivisme memperoleh ruang gerak semakin luas untuk mengintervensi studi dan riset HI kontemporer. Salah satu terobosan agenda praktis sekaligus akademik yang dipromosikan para konstruktivis sejak awal 1990an adalah transnasionalisme kosmopolitan (*cosmopolitan transnationalism*).

Fokus kajian transnasionalisme kosmopolitan adalah pada fenomena migrasi global. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan institusi sosial, perpindahan individu dan kelompok yang melewati batas negara secara

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

global mengalami pergeseran tren bila dibandingkan dengan migrasi pada masa sebelum abad ke-19. Para konstruktivis memotret fenomena migrasi global sebagai input, unit eksplanasi sekaligus subyek analisis dengan kerangka berpikir yang mengindikasikan sintesis pragmatisme dan eklektikisme. Apabila dibuat ringkasan kerangka analisis yang dihasilkan, maka diperoleh tiga kategori teori, yang terdiri atas realis konstruktivisme, liberal institusionalisme, dan konstruktivisme kultural (Gallarotti, 2010).

Ketiga teorisasi menawarkan penjelasan berbeda mengenai tren, implikasi dan solusi permasalahan migrasi global. Realis konstruktivisme menjelaskan bahwa migrasi global merupakan efek langsung dari pelemahan kedaulatan negara yang diakibatkan oleh penguatan dimensi nonpolitik interaksi sosial di tingkat domestik maupun global. Migrasi global berpotensi menimbulkan aneka macam ancaman teritorial dan sosial dalam bentuk seperti degradasi semangat nasionalisme dan kebangkitan ideologi transnasional berbasis aspirasi etnisitas dan terorisme. Jalan keluarnya menurut realis konstruktivis adalah rekonsiliasi antara agensi dan motivasi elit serta masyarakat yang selama proses internasionalisasi peran aktor subnasional menjadi semakin terpisah jauh (Nassar, 2004).

Liberal institusionalisme berargumen bahwa fenomena migrasi global adalah konsekuensi historis dan empiris dari perkembangan interaksi sosial di berbagai sektor ekonomi dan budaya yang diuntungkan oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi, transportasi serta keuangan. Tidak ada satu kekuatan politik maupun bersenjata yang akan mampu mencegah dan mengeliminasi pengaruh aktivitas migrasi global, terutama karena tidak mungkin untuk membendung arus pertukaran ide dan gaya hidup kosmopolitan yang terus berlangsung di mana mana. Konsep kosmopolitan tumbuh menjadi retorika dan sekaligus tujuan obyektif para migran yang menginginkan perubahan tatanan global menjadi ‘...a

Konstruktivisme

borderless world for all humankind'. Untuk menangani eksekusi negatif migrasi global, seperti terorisme dan kriminalitas, maka yang harus dilakukan oleh negara dan masyarakat internasional adalah memperkuat institusi dan norma aplikatif yang mengatur persoalan terkait migrasi lintas batas (Tamas dan Palme, 2006).

Cara pandang yang ketiga, konstruktivisme kultural, menyoroti pada peran budaya populer sebagai *social template* yang mengalami proses reproduksi dan rekonstruksi secara massif dan terinternalisasi sampai ke level unit terkecil seperti komunitas dan keluarga. Melalui sintesis antara teori Sosiologi kritis, Anthropologi dan Ekonomi, konstruktivisme kultural mewacanakan konsep 'cultural state and political society' untuk mendeskripsikan kecenderungan dan faktor pendukung keinginan seseorang dan kelompok untuk pindah dari suatu negara ke negara lain (Friedman dan Randeria eds. 2004). Identitas menjadi elemen paling menonjol dalam analisis konstruktivisme kultural, baik yang menyangkut respon negara, organisasi internasional maupun kelompok sosial terhadap muatan material maupun ideasional dari fenomena migrasi global.

Produk yang paling kontroversial dari konstruktivisme kultural adalah konsep *global commonwealth of citizens*. Dengan mengambil unsur-unsur konsep *international society* dari *The English School of International Relations*, konstruktivis kultural mencoba 'mengawinkan' konsep peradaban, lokalitas, dan orde internasional menjadi ramuan teoritis baru mengenai karakteristik sistem internasional yang didiami oleh aktor sosial tanpa batas teritorial nasional. Preskripsi mereka pun berdasarkan kepada agenda seperti perlindungan identitas, antifundamentalisme, dan demokrasi kosmopolitan sebagai metode preventif dan kuratif implikasi negatif migrasi global (Archibugi, 2008).

Penutup

Pada Bab ini sudah dilakukan survei yang menginformasikan secara ringkas mengenai pengertian dasar, asumsi pokok, perkembangan dan relevansi konstruktivisme sebagai pendekatan teori dan metodologi HI kontemporer. Perlu ditekankan kembali bahwa hakikat konstruktivisme bukanlah teori formal seperti teori-teori rasionalis mengenai kekuatan dan konflik, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, serta referensi teori HI skala menengah (*middle-range theory*) seperti integrasi regional dan komunitas keamanan. Konstruktivisme adalah seperangkat argumentasi tentang karakteristik sistem, perilaku aktor serta proses interaksi yang ditujukan untuk mengatasi kesulitan dan/atau kelemahan yang ditemukan dalam neo-neo rasionalisme sebagai paradigma akademik HI. Oleh sebab itu, konstruktivisme memuat berbagai jenis gagasan yang tidak disampaikan maupun kritik terhadap neorealisme dan neoliberalisme.

Membaca konstruktivisme dan produk-produk HI konstruktivis memang acapkali lebih sulit bila dibandingkan dengan neo-neo. Hal ini tentu bisa dipahami sebab dalam perkembangan konstruktivisme menuju salah satu perspektif HI, terjadi bermacam dialektika yang menghasilkan sintesis pemikiran bercorak interdisipliner dan transdisipliner. Walaupun demikian, konstruktivisme menampilkan suatu wawasan berpikir HI yang orisinal dan progresif. Untuk menyimpulkan secara sederhana, maka dikemukakan proposisi berikut; dalam konteks ontologi, subyek Studi HI menjadi interaksi antarnegara bangsa plus aktor-aktor nonnegara bangsa; dalam konteks epistemologi, teori HI menjelaskan hubungan kausal antara *power*, *wealth* dan *identity*; dan dalam konteks metodologi, Studi HI bersifat positivis, postpositivis dan boleh menggabungkan aneka ragam pendekatan relevan dalam bentuk pragmatisme eklektis.

Daftar Pustaka

- Acharya, Amitav, (2000), *The Quest for Identity: International Relations of Southeast Asia*, Oxford University Press.
- Adler, Emanuel, (2005), *Communitarian International Relations*, Routledge.
- Almezaini, Khalid S., (2012), *The UAE and Foreign Policy: Foreign Aid, Identities and Interests*, Routledge.
- Archibugi, Daniele, (2008), *The Global Commonwealth of Citizens: toward Cosmopolitan Democracy*, Princeton University Press.
- Armstrong, David, Theo Farrell & Helene Lambert (2007), *International Law and International Relations*, Cambridge University Press.
- Ashley, Richard, (1986), "The Poverty of Neorealism", dalam, Robert O. Keohane, *Neorealism and Its Critics*, (ed.), Columbia University Press.
- Beach, Derek, (2012), *Analyzing Foreign Policy*, Palgrave Macmillan.
- Bjola, Corneliu & Markus Komprobst, (2013), *Understanding International Diplomacy: Theory, Practice and Ethics*, Taylor and Francis.
- Burchill, Scott (2005), *The National Interest in International Relations Theory*, Palgrave Macmillan.
- Clunan, Anne L., (2009), *The Social Construction of Russia's Resurgence: Aspirations, Identity and Security Interests*, Johns Hopkins University Press.
- Cochran, Molly, (2004), *Normative Theory in International Relations: A Pragmatic Approach*, Cambridge University Press.
- Crowford, Robert M. A., (2000). *Idealism and Realism in International Relations*, Routledge.

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)

- Dunn, David J., (2004), *From Power Politics to Conflict Resolution: the Work of John W. Burton*, Palgrave Macmillan.
- Dunoff, Jeffrey L., (2013), *Interdisciplinary Perspectives on International Law and International Relations: the State of the Art*, Cambridge University Press.
- Franke, Ulrich & Ralph Weber, (2012), "At the Papini Hotel: on Pragmatism in the Study of International Relations", *European Journal of International Relations*, 18(4), 669-691.
- Friedman, Jonathan & Shalini Randeria, (2004), *Worlds on the Move: Globalization, Migration and Cultural Security*, I. B. Tauris.
- Fultner, Barbara, (2014), *Jurgen Habermas Key Concepts*, Taylor & Francis.
- Gallarotti, Giulio, (2010), *The Cosmopolitan Power: A Synthesis of Realism, Neoliberalism and Constructivism*, Palgrave Macmillan.
- George, Jim, (1994), *Discourses of Global Politics: A Critical (Re)introduction to International Relations*, Lynne Rienner Publishers.
- Haacke, Jurgen, (2005), "The Frankfurt School and International Relations; On the Centrality of Recognition", *Review of International Studies*, 31(1), 181-194.
- Hill, Christopher, (2003), *The Changing Politics of Foreign Policy*, Palgrave Macmillan.
- Hobson, John M, (2000), *The State and International Relations*, Cambridge University Press.
- Honneth, Axel, (1998), *The Struggle for Recognition; the Moral Grammar of Social Conflict*, Polity Press.
- Hopf, Ted, (1998), "The Promise of Constructivism in

Konstruktivisme

- International Relations Theory”, *International Affairs*, 23(1), 171-200.
- Katzenstein, Peter J., (1996), *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*, Columbia University Press.
- Klotz, Audie, (1995), “Norms Reconstituting Interests: Global Racial Equality and US Sanctions against South Africa”, *International Organization*, 49(3), 451-478.
- Klotz, Audie & Cecelia M. Lynch, (2014), *Strategies for Research in Constructivist International Relations*, Taylor and Francis.
- Klotz, Audie & Deepa Prakash, (2008), *Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide*, Palgrave Macmillan.
- Kratochwill, Friedrich V., (2014), *The Status of Law in World Society: Meditations on the Role and Rule of Law*, Cambridge University Press.
- Kubalkova, Vendulka, (2001), *Foreign Policy in A Constructed World* (ed.), M.E. Sharpe.
- Kubalkova, Vendulka, Onuf, Nicholas dan Paul Kowert, (1998), *International Relations in A Constructed World*, (eds.), M.E. Sharpe.
- Kuhn, Thomas S., (1970), *The Structure of Scientific Revolutions*, 2nd edition, Chicago University Press.
- Lapid, Yosef & Friedrich V. Kratochwill, (1996), *The Return of Culture and Identity in International Relations Theory*, Lynne Rienner.
- Linklater, Andrew, (2007), *Critical Theory and World Politics: Citizenship, Sovereignty and Humanity*, Taylor and Francis.
- Long, James D et al., (2012), *TRIP Around the World: Teaching, Research and Policy Views on International*

Relations in the 20th Country, TRIP Project.

- MacKendrick, Kenneth, (2007), *Discourse, Desire and Fantasy in Jurgen Habermas' Critical Theory*, Taylor & Francis.
- Nassar, Jamal R., (2004), *Globalization and Terrorism: the Migration of Dreams and Nightmares*, Rowman & Littlefield.
- Phillips, Andrew B., (2007), "Constructivism", dalam, Marin Griffiths, *International Relations Theory for the Twenty-first Century. An Introduction*, (ed.), Routledge.
- Price, Richard & Christian Reus-Smit, (1998), "Dangerous Liaisons: Critical International Theory and Constructivism", *European Journal of International Relations* 4(3), 259-294.
- Reus-Smit, Christian, (1995), *Beyond Foreign Policy: Constructivism, the State, and the Changing Global Order*, Centre for International Relations, Monash University.
- , (2005), "Constructivism", dalam, Scott Burchill et al., *Theories of International Relations*, 3rd edition, Cambridge University Press.
- , (2008), "Constructivism and the Structure of Reasoning", dalam, Richard Price, *The Limit of Moral and Possibility in World Politics*, (ed.), Cambridge University Press.
- Ruggie, John G., (1998), *Constructing the World Polity: Essays on International Institutionalization*, Routledge.
- Sato, Yoichiro & Keiko Hirata, (2008), *Norms, Interests and Power in Japanese Foreign Policy* (eds.), Palgrave Macmillan.
- Shaffer, Brenda, (2006), *The Limits of Culture: Islam and*

Konstruktivisme

Foreign Policy, MIT Press.

Shapcott, Richard, (2001), *Justice, Community and Dialogue in International Relations*, Cambridge University Press.

Sil, Radra & Peter J. Katzenstein, (2010), *Beyond Paradigm: Analytical Eclecticism in the Study of World Politics*, Palgrave Macmillan.

Snedeker, George, (2004), *The Politics of Critical Theory: Language, Discourse/Society*, University Press of America.

Tamas, Kristof & Joakim Palme, (2006), *Globalizing Migration Regimes: New Challenges to International Security*, Ashgate.

Wallace, William, (1996), "Truth and Power, Monks and Technocrats: Theory and Practice in International Relations", *Review of International Studies*, 22(3), 301-321.

Weber, Cynthia, (2005), *International Relations Theory: A Critical Introduction*, Routledge.

Weber, Martin, (2007), "Constructivism and Critical Theory", dalam, Richard Devetak, Anthony Burke dan Jim George, *An Introduction to International Relations: Australian Perspectives*, (eds.), Cambridge University Press.

Wendt, Alexander, (1992), "Anarchy Is What States Make of It: the Social Construction of Power Politics", *International Organization*, 46(2), 391-425.

_____, (1999), *Social Theory of International Politics*, Cambridge University Press.

<<<<<>>>>>

Para Penulis

Baiq L.S.W. Wardhani



Staf pengajar pada Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga sejak tahun 1987. Alumnus S1 Program Studi Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga, S2 dan S3 dari Monash University, Australia.

I Basis Susilo



Staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga sejak tahun 1980 dan membidani berdirinya Program Studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Alumnus S1 Program Studi Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada, S2 dari Universitas Indonesia dan University of Minnesota, Amerika Serikat.

I Gede Wahyu Wicaksana



Staf pengajar pada Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga sejak tahun 2004. Alumnus S1 dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Airlangga, S2 dari Universitas Gadjah Mada dan S3 dari University of Western Australia, Australia.

Radityo Dharmaputra



Staf pengajar pada Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga sejak tahun 2011. Alumnus S1 dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Airlangga, S2 dari Universitas Airlangga dan University of Glasgow, Scotlandia.

Vinsensio Dugis



Staf pengajar pada Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga sejak tahun 1989. Alumnus S1 dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Airlangga, S2 dari Adelaide University, Australia dan S3 dari Flinders University of South Australia, Australia.